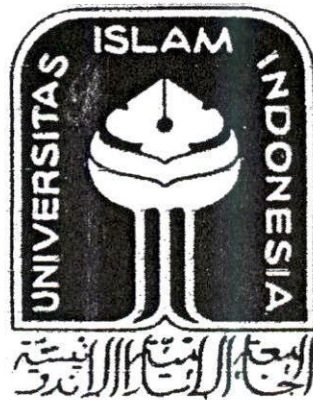


**SISTEM BRETTON WOODS DALAM PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH**



**Oleh:**

**Ayif Fathurrahman, SE, SEI**

**NIM : 09913003**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2011**

**SISTEM BRETTON WOODS DALAM PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH**



**Oleh:**

**Ayif Fathurrahman, SE, SEI**

**NIM : 09913003**

**Pembimbing :**

**Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2011**



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 364/PS-MSI/Peng./X/2011

TESIS berjudul : **SISTEM BRETTON WOODS DALAM PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH**

Ditulis oleh : Ayif Fathurrahman

N. I. M. : 09913003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu  
Ekonomi Islam



Yogyakarta, 29 Oktober 2011  
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA FIAI  
 MAGISTER STUDI ISLAM  
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**TIM PENGUJI  
 UJIAN TESIS**

Nama : Ayif Fathurrahman  
 Tempat/tgl.lahir : Puruk Cahu, 28 Februari 1987  
 N. I. M. : 09913003  
 Konsentrasi : Ekonomi Islam  
 Judul Tesis : **SISTEM *BRETTON WOODS* DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
 Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA (.....)  
 Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)  
 Penguji : Drs. Yusdani, M.A (.....)  
 Penguji : Drs. H. Asmuni, MA (.....)



(.....)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)

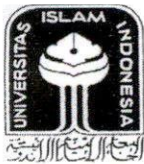
**UNIVERSITAS  
 ISLAM  
 INDONESIA**

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2011  
 Waktu : 08.00–09.00 WIB  
 Hasil / Nilai : **87, 25 / A**



Mengetahui  
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII

**Dr. H. Imam Effendi, MA**



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**NOTA DINAS**  
No. : 967/PS-MSI/ND/X/2011

TESIS berjudul : **SISTEM BRETTON WOODS DALAM PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH**

Ditulis oleh : Ayif Fathurrahman

NIM : 09913003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 19 Oktober 2011  
Ketua Program

**UNIVERSITAS**  
**ISLAM**  
**INDONESIA**

Dr. H. Imam Effendi, MA



**MAGISTER STUDI ISLAM**  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Faks. 523637

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS berjudul : **SISTEM BRETTON WOOD DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Ditulis oleh : Ayif Fathurrahman

NIM : 09913003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 18 Agustus 2011  
Pembimbing

Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag

## MOTTO

Ketahuiilah bahwa siapa yang bertaqwa dilindungi Allah, siapa yang bertawakal dicukupkn kebutuhannya, siapa yang bersyukur ditambah rizkinya, siapa yang bersedekah dilipatgandakan balasannya, karena itu jadikanlah taqwa andalan hatimu, serta penerang matamu, dan ketahuilah tiada amal tanpa niat, tiada ganjaran tanpa rasa takut kepada-Nya serta tiada yang baru bagi yang tidak memiliki kreasi.

(Quraisy Syihab)

Pengetahuan yang paling berharga adalah pengetahuan manusia tentang dirinya, dan sikap yang paling agung adalah keberadaan seseorang sesuai pengetahuannya.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kebahagiaan yang tiada tara dari lubuk hati yang paling dalam dengan selesainya penyusunan Tesis ini. Hasil dari jerih payah ini saya persembahkan khusus kepada :

- ✓ Bapak dan Ibu yang selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Kasih sayang yang menjelma menjadi spirit bagi anak-anak untuk selalu meraih sukses.
- ✓ Adikku yang bayangnya selalu mengingatkanku untuk selalu bangkit dan semangat.
- ✓ Guru-guruku, baik guru yang nyata ataupun maya atas ilmu-ilmu yang sangat berguna bagi pengembangan keilmuanku.
- ✓ Almameterku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan  
dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)

ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	ó	apostrof
ي	ya'	y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

contoh :

أحمد يتونه ditulis *Ahmadiyyah*

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

ditulis *jama'ah* جماعة

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh :

كرامة الأولياء ditulis *karamatul-auliya'*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh :

بينكم ditulis *bainakum*,

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh :

قول ditulis *qaul*

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم ditulis *a'antum*

مؤمنون ditulis *mu'annas*



### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh :

القران ditulis *al-Qur'an*      القياس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila didikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis *as-Sama*      الشمس ditulis *asy-Syams*

### I. Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh :

نوى الفروض ditulis *zawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut, contoh :

أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji selalu tercurahkan kepada Allah sang penguasa alam semesta, puji yang tiada henti mengalir dari hamba-Mu ini yang berserah diri. Syukur kehadiran illahi robbi yang dengan izin-Nya lah penyusunan Tesis ini yang berjudul “SISTEM BRETTON WOOD DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena hanya dengan keikhlasannyalah kita semua mampu mengenal beberapa kemajuan berpikir yang berkembang dalam masa sekarang ini.

Dalam penyusunan Tesis ini, tentunya penyusun mendapatkan beberapa sumbangsih bantuan dan dorongan moral maupun bimbingan berbagai pihak, baik langsung maupun tak langsung. Oleh karena itu izinkan penyusun untuk mengucapkan rasa bangga dan terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu terselesaikannya penyusunan Tesis ini, yaitu :

1. Allah SWT. atas segala nikmat, petunjuk dan hidayah-Nya serta ilham yang diberikan kepada penyusun dalam berekspresi.
2. Kedua orang tua penyusun yang telah menjadi guru pertama dalam menjalani kehidupan ini, adikku dan guru-guru yang telah menjadi orang tua penyusun di saat jauh dari orang tua kandung.
3. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Drs. H Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Imam Effendi, MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

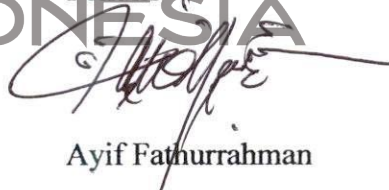
6. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan selaku Pembimbing Penulis dalam menyusun Tesis ini.
7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Kawan-Kawan seperjuangan Ekonomi Islam MSI UII angkatan 2009
9. Teman-teman Pondok Pesantren UII yang selalu bergembira bersama-sama, dan tempat berbagi cerita.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sampai terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya, segala kesalahan dan kekurangan adalah semata karena kebodohan penulis. Dan bila dalam tesis ini terdapat kebenaran, semua semata karena ridho, tuntunan dan petunjuk Allah SWT, Sang Maha Pencipta nan sempurna.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

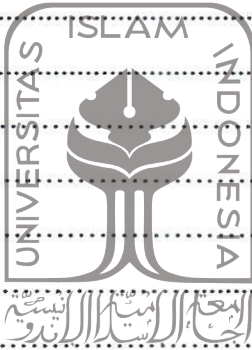
Selokan Mataram, 18 Agustus 2011

Penulis



Ayif Fathurrahman

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Pengesahan .....	ii
Tim Penguji Ujian Tesis .....	iii
Nota Dinas .....	iv
Persetujuan Pembimbing .....	v
Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Transliterasi .....	viii
Kata Pengantar .....	xi
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar .....	xv
Abstrak .....	xvi
	
<b>UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</b>	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Pembahasan .....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM BRETTON WOODS .....	29
A. Pengertian dan Sejarah Sistem Bretton Woods .....	29

B. Mekanisme Sistem Bretton Woods .....	36
C. Kejatuhan Sistem Bretton Woods .....	41
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAQASID SYARIAH.....	44
A. Pengertian Maqasid Al-Syariah .....	44
B. Dimensi Maqashid Syariah .....	49
C. Maqasid al-Syariah sebagai Metode Istinbath Hukum .....	53
D. Maslahat Sebagai Tujuan Maqashid Syariah .....	56
BAB IV SISTEM BRETTON WOOD DALAM TINJAUAN MAQASID AL-SYARIAH .....	59
A. Faktor Lahirnya Sistem Bretton Woods .....	59
a. Tingginya Fluktuasi Nilai Tukar .....	60
b. Ketidakpastian Hubungan Perdagangan Antarnegara.	65
c. Ketidakseimbangan Neraca Pembayaran ( <i>Balance of         payment</i> ) Negara .....	74
d. Perang Devaluasi .....	77
B. Sistem Bretton Wood dalam Tataan Perekonomian Global .....	77
C. Pengaruh Sistem Bretton Wood terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia .....	82
D. Faktor dan Dampak Sistem Bretton Wood terhadap Stabilitas Perekonomian Global dalam Tinjauan Maqasid Syariah .....	87
BAB V PENUTUP .....	109
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	125
DAFTAR PUSTAKA .....	128
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 4.1	Rata-rata pertumbuhan Ekonomi Tahunan Dalam Periode yang Berbeda, antara tahun 1820-1973 ( <i>weight average of 16 Countries</i> ) (%) .....	92
Tabel 4.2	Pertumbuhan di Negara G-7 (% per tahun) .....	93
Tabel 4.3	Diskripsi Statistik Inflasi Dan Data Riil Pertumbuhan Per Kapita G-7 Periode 1948- 1989 .....	94
Tabel 4.4	Supply (Parmanent) Dan Demand (Temporary) Shock Tahun 1948-1989 Data Tahunan .....	96



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar	1.1 Alur Kerangka Berpikir .....	28
Gambar	2.1 Figur Sistem Kurs Tetap Bekerja ( Analisis Permintaan dan Penawaran) .....	37
Gambar	2.2 Figur Sistem Kurs Tetap Bekerja ( Analisis Keuangan) .....	40
Gambar	3.1 Hirarki Maqasid AS-Syariah .....	50
Gambar	4.1 Kurva Pengaruh Kenaikan Inflasi terhadap Impor .....	62
Gambar	4.2 Kurva <i>Demand Inflation</i> .....	64
Gambar	4.3 Analisis Pengaruh Positif Ekspor terhadap Pertumbuhan Output Dalam Negeri .....	67
Gambar	4.4 Transaction Exposure Menurut Eiteman .....	72
Gambar	4.5 Penyesuaian Neraca Pembayaran dengan Perubahan Nilai Tukar .....	80
Gambar	4.6 Rata-rata Perdagangan Dunia di 35 Negara .....	99
Gambar	4.7 Perubahan Tingkat Kurs Nominal antara tahun 1880-1989 .....	105
Gambar	4.8 Tingkat Perubahan Kurs Riil antara Tahun 1880-1989 ..	106
Gambar	4.9 Rata-Rata Bulanan Premi Pasar Paralel: 1946-1998 .....	108

# **SISTEM BRETTON WOODS DALAM PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH**

## **ABSTRAK**

**Ayif Fathurrahman, SE, SEI**

**NIM : 09913003**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem moneter internasional, khususnya tentang sistem Bretton Woods dalam Perspektif Maqashid al-Syariah, ditinjau dari dua sudut pandang : Faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan dampaknya terhadap kondisi perekonomian dunia.*

*Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat ilmiah secara holistik. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data literer atau library research (studi pustaka). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Critical Discourse Analysis atau disingkat dengan CDA (analisis wacana). CDA merupakan bantuan dalam analisis berbasis bahasa-data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, pendekatan kritis ekonomi-politik dan pendekatan historis.*

*Hasil dari penelitian ini adalah : Faktor-faktor dominan yang terjadi pada masa Perang kedua II adalah tingginya fluktuasi nilai mata uang, ketidakpastian hubungan perdagangan internasional, ketidakseimbangan neraca pembayaran (Balance of payment) Negara, dan competitive devaluation di masing-masing Negara. Faktor-faktor tersebut yang menjadi pertimbangan dilahirkannya Sistem Bretton Woods, agar bisa mengantisipasi krisis keuangan global seperti terjadi pada periode sebelumnya Perang Dunia I yaitu, Beggar they neighbor policy.*

*Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, Sistem Bretton Woods memegang peranan penting kala itu dalam menjaga eksistensi al-kulliyât al-khams yang meliputi aspek agama (hifzu ad-din), jiwa (hifzu an-nafs), keturunan (hifzu an-nasl), akal (hifzu al-'aql), dan harta (hifzu al-mal).*

**Kata Kunci : Sistem Bretton Wood, Maqasid Syariah, Stabilitas.**

## BRETTON WOODS SYSTEM IN PERSPECTIVE MAQASID SHARIA

### ABSTRACT

Ayif Fathurrahman, SE, SEI  
NIM : 09913003

*This study aims to analyze the international monetary system, especially on the Bretton Woods system in the perspective of maqasid al-Sharia. It was viewed from two perspectives: the background factors and their impact on global economic conditions.*

*This study is a qualitative descriptive type of research, namely a study trying to uncover the circumstances of a scientific nature in a holistic manner. In writing this thesis, the author uses data collection techniques literereir or library research. Data analysis techniques used in this study is Critical Discourse Analysis, or abbreviated with the CDA. CDA is an aid in language-based analysis of data. The approach used in this research are the normative approach, a critical political economy approach and historical approach.*

*The results of this study are: the dominant factors that occurred during the second War II is the high currency exchange rate fluctuations, uncertainties of international trade relations, the imbalance of the balance of payments Country and Devaluation competitive in respective States. These factors into consideration birth to the Bretton Woods system, in order to anticipate the global financial crisis such as occurred in the previous period of World War I, namely Beggars They neighbor policy.*

*In the perspective of maqasid al-Sharia, the Bretton Woods system plays an important role in maintaining the existence at that time Kulliyat al-khams covering aspects of religion (hifzu ad-din), soul (hifzu an-nafs), heredity (hifzu an-nasl) , reason (al-'aql hifzu), and property (hifzu al-mal).*

Keywords: Bretton Woods, Maqasid Sharia, Stability.

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Krisis keuangan global yang terjadi tiga tahun yang telah lalu, tepatnya pada bulan Oktober 2008, sangat terkait erat dengan kondisi perekonomian Amerika yang mengalami instabilitas. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat telah berkembang menjadi masalah serius. Guncangan yang terjadi pada Negara adikuasa tersebut dipastikan telah memberikan dampak terhadap perekonomian global. Gejala perekonomian yang terjadi di Amerika Serikat telah mempengaruhi stabilitas ekonomi di beberapa kawasan. Keterbukaan ekonomi antarnegara, memungkinkan terjadinya resesi di suatu Negara untuk mengarah dan mempengaruhi Negara lainnya.

Dalam sejarah krisis keuangan dunia, tercatat bahwa stabilitas ekonomi global telah terguncang berkali-kali. Amerika Serikat sendiri pernah mengalami guncangan luar biasa pada tahun 1929 yang dikenal dengan “*The Great Depression*” atau “*The Black Thursday*”,<sup>1</sup> kemudian guncangan krisis pun menyusul pada tahun 1985, tahun 1987, tahun 1997, dan 2000, serta belakangan pada tahun 2008. Guncangan krisis ini selalu bermula dari adanya gesekan di sektor pasar saham. Dan dalam rangka

---

<sup>1</sup> Thomas Johnston, *The Depression Years*, dikutip dari <http://library.thinkquest.org/3483/Right/gd.html>, diakses tanggal 5 April 2010. Peristiwa ini memunculkan aliran Keynes yang menggantikan aliran klasik (Adam Smith, dkk). Penjelasan serupa, juga terdapat pada buku karya Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economic : Ekonomi Syari'ah bukan Opsi tetapi Solusi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 301

memulihkannya selalu dengan suntikan modal atau pemberian talangan dana dari pemerintah ke perusahaan yang mengalami kebangkrutan.

Roy Davies dan Glyn dalam bukunya *The History of Money from Ancient Time to Present Day*, menguraikan sejarah kronologi krisis sektor secara komprehensif. Menurut catatan mereka, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih dari 20 kali krisis besar yang melanda banyak Negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun sekali telah terjadi krisis finansial hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.<sup>2</sup>

Namun demikian, sekitar tahun 1950-1972, ekonomi dunia menunjukkan stabilitas yang relatif baik, karena pada periode ini tidak ditemukan badai krisis yang berarti. Menurut catatan Sjamsul,<sup>3</sup> keadaan ini merupakan pengaruh dari diberlakukannya *Bretton Woods Agreements*, yang mengeluarkan regulasi di sektor moneter relatif lebih ketat dan tetap (*Fixed Exchange Rate Regime*). Di samping itu, IMF pada awalnya masih memainkan perannya dalam mengatasi anaomali-anomali keuangan di dunia. Jadi regulasi khususnya di perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan renzim nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia menjadi terkendali.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Roy Davies dan Glyn Davies, *A History of Money from Ancient Time to Present Day*, (New York : Oxpert University Press, 1996), hlm. 13

<sup>3</sup> Sjamsul Arifin Wibisono, Charles P.R. Joseph, Shinta Sudrajat, *IMF dan Stabilitas Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta : PT Elex Media Kompotindo, 2007). hlm 11

<sup>4</sup> Hendro Wibowo, *Sistem Keuangan Islam dan Implikasi Bunga bagi Perekonomian*, dikutip dari <http://hendrowibowo.niriah.com/> diakses tanggal 18 Maret 2010

Namun pada tahun 1971, kesepakatan Bretton Woods mulai terusik dengan mekanisme bunganya yang tak dapat dibendung, sehingga memnimbulkan kesulitan-kesulitan dalam mempertahankan nilai tukar *fixed exchange rate* ini. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankannya, seperti dibentuknya kesepakatan *Smithsonian* walaupun hanya bertahan 2-3 tahun saja.<sup>5</sup> Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1971 Amerika Serikat melakukan demoneterisasi emas yang menandai berakhirnya sistem Bretton Woods<sup>6</sup>. Sejak saat itu dunia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali (*Managed floating*), yang kemudian diterapkan dengan uang kertas (*fiat money*) tanpa didasarkan dengan nilai emas.

Seiring dengan berjalannya waktu, *full fledged managed money standard* memunculkan berbagai guncangan kondisi perekonomian global, sehingga pada gilirannya mendatangkan berbagai opsi untuk mengakhiri sistem ini sebagai sistem moneter internasional. Rontoknya sistem *fiat money* yang diusung oleh Amerika Serikat dalam tsunami finansial global membangkitkan kembali desakan untuk dilakukannya perombakan radikal dan desain ulang terhadap bangunan arsitek sistem finansial global guna mencegah terulangnya krisis yang sama pada masa mendatang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Anonim, *Sekilas Tentang Sistem Bretton Woods*, dikutip dari <http://einvening.wordpress.com>, diakses pada tanggal 5 April 2010

<sup>6</sup> Tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba Presiden Richard Nixon yang dibantu oleh Menteri Keuangan George Shultz, William Simon dan Paul Volcker, AS membatalkan sebagian kesepakatan Bretton Wood itu secara sepihak, khususnya aturan tentang kurs mata uang.

<sup>7</sup> Lihat "Menghidupkan kembali Bretton Woods", *Kompas*, 31 Oktober 2008

Di antara tokoh yang paling kencang menyuarakan dan paling agresif mengupayakan dukungan dari negara-negara lain adalah Perdana Menteri Inggris Gordon Brown dan Perdana Menteri Perancis Nicolas Sarkozy.<sup>8</sup> Sarkozy bersama pemimpin Eropa lainnya berhasil mendesak Presiden AS, pada saat itu masih George W Bush untuk melangsungkan pertemuan darurat membahas gagasan tersebut, pada forum G-20 di Washington, pada tanggal 15 November 2008.<sup>9</sup> Gagasan mereformasi sistem finansial global juga mendapat dukungan kuat dari para pemimpin negara Asia dan Eropa yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa (ASEM) di Beijing, pada tanggal 24-25 Oktober 2008.<sup>10</sup>

Terlepas apakah Bretton Woods akan bisa direalisasikan kembali atau tidak, jelas gagasan ini merupakan respon atas *full fledged managed money standard* yang secara mutlak tak ada hubungannya dengan emas, yang selama ini diterapkan dan banyak memunculkan masalah perekonomian global, yang pada gilirannya menciptakan kondisi perekonomian global semakin terpuruk. Berdasarkan catatan sejarah, Bretton Wood lahir karena kebutuhan adanya sistem moneter yang handal

---

<sup>8</sup> Menurut PM Inggris, Gordon Brown, bahwa sekarang adalah saarnya dunia membuat sebuah sistem keuangan internasional yang baru, dikutip dari <http://www.erasuslim.com/berita-dunia-pm-inggris-ajak-pemimpin-dunia-buat-sistem-keuangan-baru.htm>, diakses tanggal 19 Maret 2010

<sup>9</sup> Wacana menghidupkan kembali sistem Bretton Wood bukan baru kali pertama muncul. Hampir setiap kali krisis besar terjadi, wacana ini muncul dan kemudian tenggalam dan terlupakan lagi. Pada tahun 1982, gagasan ini dilontarkan oleh Menkeu AS Donald Regan. Pada tahun 1985 oleh Presiden Perancis Francois Mitterand, ketika Perancis dilanda tiga devaluasi *Frnac*. Dan di ambang krisis finansial Asia 1997-1998, nostalgia Bretton Woods berusaha kembali dibangkitkan oleh rezim pemerintahan Inggris pasca Thatcher. lihat, "Menghidupkan Kembali Sistem Bretton Woods", *Kompas*, 31 Oktober 2008

<sup>10</sup> Daniri, "Ekonomi Syariah, Bretton Wods, KTT ASEM, dan AS:", *Republika*, 3 Nopember 2008

akan mengatasi dampak berakhirnya Perang Dunia II. Berdasarkan pengalaman Perang Dunia I, sesudah perang adalah masa yang sangat berat bagi perekonomian dunia. Kebangkitan perekonomian negara-negara yang terlibat perang, seperti peningkatan produksi bahan makanan dan industri, akan membuta produksi global meningkat cepat, jauh melebihi kebutuhan.<sup>11</sup> Sistem moneter ini berdasarkan sistem nilai tukar tetap terhadap dolar AS. Sedangkan dollar AS dikaitkan dengan emas, dimana setiap 1 ons emas (sekitar 30 gram) ditetapkan harganya kira-kira sebesar USD 28.35.

Berbicara tentang emas, dalam Islam, kata *dzahab* yang berarti emas disebut dalam al-Qur'an sebanyak 8 kali. Tetapi hanya satu yang memberikan ancaman kepada orang yang mengumpulkan dan menyimpannya, karena tidak memanfaatkannya di jalan yang benar. Surat at-Taubah ayat 34 merupakan ayat umum yang memerintahkan bahwa kekayaan yang disimbolkan dalam bentuk emas dan perak harus diinfakkan di jalan yang benar. Namun dalam ranah aplikasinya, apakah emas langsung sebagai mata uang yang beredar di masyarakat atau hanya sebatas standar uang saja, masih menjadi persoalan sendiri.<sup>12</sup> Kendati demikian,

---

<sup>11</sup> Kebanyakan Negara yang terlibat perang adalah negara sebagai sumber produksi, dalam hal ini pertanian dan industri. Pada saat perang berlangsung, ekspor mereka mengalami penurunan drastis, karena produksi dalam negeri menurun sehingga mendorong terjadinya impor dari negara lain. Keadaan inilah yang menciptakan pergeseran sumber produksi dalam skala global. Sehingga ketika perang telah usai, sektor produksi negara yang terlibat pun mulia berangsur membaik, sehingga terjadi kelebihan produksi (*over production*)

<sup>12</sup> Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, boleh hukumnya mengeluarkan mata uang non-emas dan non-perak sebagai pengganti emas dan perak, dengan syarat dalam kas Negara (*Baitul Maal*) tersimpan emas dan perak yang nilainya sama dengan nilai nominal pada mata uang yang dicetak. Untuk lebih mendalam, baca : Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (terjemahan), (Surabaya : Risalah Gusti, 1996)

Sistem Bretton dinilai cukup berhasil dan mempunyai pengaruh positif dalam menunjang tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan stabilitas keuangan internasional pascaperang dunia II.

Pembicaraan mengenai persoalan stabilitas dalam perspektif ekonomi, tak berlebihan kalau dikatakan hal itu juga berarti pembicaraan menyangkut kesejahteraan manusia. Sejarah mencatat bahwa pemikiran ekonom muslim bertumpu pada sebuah konsep yang disebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”. Tema yang menjadi pangkal tolaknya adalah konsep *maslahat* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membangun hubungan yang erat antara individu dan masyarakat.<sup>13</sup>

Konsep *maslahat* merupakan tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam. *Maslahat* di sini berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan).<sup>14</sup> Menurut Thohir Ibnu Asur, semua ajaran *syari'ah* khususnya Islam datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.<sup>15</sup> Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Quran maupun al-Sunnah menjadi dalil adanya *maslahat*. Meskipun sumber *syara'* tersebut tidak semuanya berbicara

<sup>13</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 8

<sup>14</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 171-182.

<sup>15</sup> Muhammad Thohir Ibnu Asur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Tunisia: al-Syirkah Tunisia, 1978), hlm. 13

mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi masalah dalam *syari'at* Islam.

Pada titik inilah pentingnya kajian sistem Bretton Wood dalam perspektif *Maqashid syariah*. Terlebih lagi, bila menggunakan teori kesejahteraan sosial yang secara prinsip menjadi landasan tersendiri dalam merumuskan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Melalui pembacaan yang demikian, diharapkan akan ditemukan satu konsep moneter internasional yang ideal untuk diterapkan sebagai sistem moneter internasional yang tidak bertentangan dengan sumber fundamental, al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun dalam lembaran sejarah, dia justru hadir sebagai sistem yang sarat akan makna dan tujuan dari esensi kemaslahatan terhadap umat manusia di muka bumi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sistem Bretton Woods lebih mendalam, terutama kalau dikaitkan dengan konsep *masalah* di dalam *Maqashid syariah*. Maka dalam kesempatan kali ini penulis bermaksud mengangkat judul tesis dengan judul "*Sistem Bretton Woods Dalam Perspektif Maqashid syariah*".

## B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana Sistem Bretton Wood dalam perspektif *Maqashid syariah*, ditinjau dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya

2. Bagaimana Sistem Bretton Wood dalam perspektif *Maqashid syariah* ditinjau dari dampaknya terhadap kondisi perekonomian dunia.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dengan memperhatikan rumusan masalah di atas adalah untuk menganalisa sistem moneter internasional, khususnya tentang sistem Bretton Woods dalam Perspektif *Maqashid syariah*, ditinjau dari dua sudut pandang : Faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan dampaknya terhadap kondisi perekonomian dunia.



### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini akan memberikan kontribusi positif kepada para akademisi yang berkecukupan di bidang ekonomi Islam, khususnya penulis dalam memahami lebih jauh tentang polemik seputar penerapan standar moneter internasional. Penelitian ini juga menawarkan model sistem yang berusaha menjadi jalan tengah bagi aliran formalis dan substantialis dari ekonomi Islam yang berkembang di dunia muslim pada khususnya.

Di samping itu, meskipun tidak signifikan, namun setidaknya dengan penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan, khususnya tentang ekonomi Islam, karena penelitian ini akan semakin menambah referensi literatur ekonomi Islam dan dapat dijadikan bahan

pertimbangan sekaligus rujukan dalam merumuskan sistem moneter internasional Islami.

## 2. Manfaat Praktis (Bagi Masyarakat)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat luas, khususnya kaum muslim, terkait dengan sistem moneter internasional yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan umat manusia di belahan dunia. Sehingga masyarakat dapat memiliki *frame* pemikiran baru dalam menyingkapi permasalahan yang ada, khususnya tentang dunia moneter. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang mendambakan penerapan sistem moneter internasional sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga akan bermanfaat dalam proses pengambilan kebijakan dan dapat pula menjadi rujukan dalam penulisan selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Berbicara mengenai sistem Bretton Woods dalam sistem moneter internasional, tentu akan membuka kembali catatan sejarah antara tahun 1950-1971 yang pernah menerapkan sistem ini sebagai sistem moneter internasional. Berdasarkan catatan sejarah, Bretton Wood lahir karena kebutuhan adanya sistem moneter yang handal akan mengatasi dampak berakhirnya Perang Dunia II. Berdasarkan pengalaman Perang Dunia I, sesudah perang adalah masa yang sangat berat bagi perekonomian dunia. Kebangkitan perekonomian negara-negara yang

terlibat perang, seperti peningkatan produksi bahan makanan dan industri, akan membuat produksi global meningkat cepat, jauh melebihi kebutuhan.<sup>16</sup>

Berbicara tentang sistem moneter internasional tentu tidak bisa dilepas dari kajian terhadap tulisan “Sistem Moneter Islami” yang dikarang oleh Umar Capra. Tulisan ini merupakan kajian komprehensif dan integratif mengenai sistem moneter Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan. Selain itu, tulisan ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai sistem moneter islami oleh analisis yang teliti dari sebagian konsekuensi pokok, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru dan dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan.<sup>17</sup>

Pembahasan yang menyinggung sistem moneter internasional juga pernah dibahas oleh Untung Kasairin dalam tulisannya yang berjudul “Sistem Nilai Tukar Uang dalam Islam”. Dari tulisan tersebut dapat digali beberapa argument, yaitu kembali menggunakan mata uang fisik dinar dan dirham (*full bodied money*), mata uang sekarang di-*backup* dengan emas sebagaimana Bretton Wood, dan yang terakhir sebagaimana adanya sekarang, hanya bagaimana mengatur supaya tidak ada lagi unsur maghrib (*masyir*, *gharar*, dan *riba*) dalam sistem moneter yang berlaku. Dari ketiga argumen itu, ia dengan tegas memilih agar mata uang di-*backup* dengan

---

<sup>16</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, edisi ke-4, (Yogyakarta : BPFE, 1996), hlm 37-38

<sup>17</sup> Umer Capra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. xii

emas sebagaimana Bretton Wood, tentu dengan beberapa penyempurnaan dari sistem sebelumnya (Bretton Wood I).<sup>18</sup>

Sistem Bretton Wood juga pernah dibahas oleh Hidayatul Akbar dalam tulisannya yang berjudul “Sistem Moneter Islam Solusi atas Kerusakan Sistem Moneter Dunia”. Tulisan ini tidak secara tegas menawarkan satu sistem moneter tertentu yang bisa ditawarkan sebagai sistem alternatif moneter dunia, namun hanya menekankan bagaimana sistem itu berdasarkan metode yang ditunjukkan Islam. Kontennya lebih banyak menyoroti dampak sistem moneter *ala* kapitalisme yang telah menciptakan krisis ekonomi global akhir-akhir ini dan membuat perekonomian dunia terpuruk.

Terkait dengan persoalan di atas juga, Akhmad Syakir Kurnia dalam tulisannya “Mempertanyakan Standar Emas sebagai Proposisi Ekonomi Islam”, menyoroti secara tidak langsung sistem Bretton Wood dalam pandangan Islam. Di dalam tulisan ini penulis lebih banyak menyoroti standar emas sebagai proposisi ekonomi Islam. Ia berkesimpulan bahwa dalam menerapkan standar moneter yang berlaku, apapun bentuknya, harus dalam kerangka terwujud dan terjaminnya *maqoshid syariah*. Standar emas, atau standar yang berlaku saat ini, yaitu standar

---

<sup>18</sup> Untung Kasairin, “Sistem Nilai Tukar Uang dalam Islam”, dikutip dari <http://www.kampusislam.com/index.php?news&mod=yes&aksi=lihat&id=645>, diakses pada tanggal 7 April 2010

kepercayaan (*fiat monetry*), atau standar alternatif lain, harus menjamin terwujudnya transaksi yang adil sekaligus mencegah unsur ribawi.<sup>19</sup>

Penelitian yang penulis lakukan tentu memiliki perbedaan dari karya-karya di atas. Secara materi, tulisan ini hanya fokus pada sistem Bretton Wood yang banyak dikumandangkan oleh berbagai tokoh dunia untuk diterapkan kembali sebagai sistem keuangan internasional. Sementara dari segi teori, studi ini dimaksudkan untuk menganalisis sistem Bretton Wood dalam perspektif *maqashid syariah*.

## F. Kerangka Teori

### 1. Sejarah Sistem Moneter Internasional

Runtutan sejarah perkembangan sistem moneter modern mengenal beberapa macam standar keuangan yang silih berganti ditetapkan dalam perekonomian global. Sistem yang pertama dikenal adalah standar barang (*commodity standard*), yaitu sistem keuangan di mana mata uang suatu Negara harus dijamin oleh logam mulia (emas dan perak) dengan berat tertentu.<sup>20</sup> Sedangkan sistem kedua disebut dengan standar kepercayaan (*Fiat Money*), yaitu sistem keuangan yang tidak menyandarkan nilai uang pada jaminan logam mulia. Hal ini terjadi dalam sistem keuangan yang menggunakan uang kertas sebagai bahan baku, sistem ini nilai uang hanya didasarkan atas kepercayaan masyarakat

<sup>19</sup> Akhmad Syakir Kurnia, "Mempertanyakan Standar Emas sebagai Proposisi Ekonomi Islam", dikutip dalam <http://bs.ba.FB.com/topic.php?uid>, diakses pada tanggal 7 April 2010

<sup>20</sup> Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank*, cet 1, (Yogyakarta : BPFE, 1995), hlm 8

pengguna uang tersebut. Ketentuan yang berlaku dalam sistem ini adalah bahwa nilai tukar dan nominal sebuah mata uang seringkali melebihi instrinsiknya.<sup>21</sup>

Sistem moneter *commodity standard* secara garis besarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu standar emas dan standar perak. Standar moneter yang menggunakan satu jenis logam mulia, baik emas atau pun perak disebut dengan sistem *monometallism*, sedangkan jika digunakan dua-duanya disebut *bimetallism*.<sup>22</sup>

Mekanisme sistem *monometallism* dapat digambarkan sebagai berikut : Dalam suatu Negara berlaku dua macam uang yang terbuat dari bahan dasar berbeda (misalnya emas dan perak). Akan tetapi kedua jenis uang tersebut tidak ditentukan perbandingan nilainya oleh pemerintah. Kekuatan tarik-menarik *supply* dan *demand* menjadi faktor dominan bahkan penentu bagi perbandingan kurs kedua mata uang tersebut. Karena itu barang-barang dan jasa memiliki dua macam harga pembayarannya.<sup>23</sup> Karena tidak ada patokan resmi yang dapat dijadikan pegangan dalam menentukan perbandingan nilai tersebut, timbul kesulitan ketika transaksi dilakukan oleh dua pihak yang menggunakan jenis mata uang yang berbeda, apalagi nilainya selalu mengalami fluktuasi.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>22</sup> Dalam catatan sejarah yang pertama kali dikenal oleh masyarakat adalah sistem standar parallel atau sistem sejajar. Sistem ini sudah dimulai dan diterapkan di Negara-negara maju sejak abad pertengahan, tetapi berlakunya secara resmi dalam tata keuangan sebagai standar baru dimulai pada abad kesembilan belas.

<sup>23</sup> Karena itulah ada yang mengatakan bahwa sistem moneter yang demikian tidak diakui sebagai standar keuangan. Sebab dalam masyarakat berlaku dua jenis mata uang berbeda tanpa adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Lebih lanjut lihat Kaslan A. Tohir, *Pengantar Ekonomi Tentang Uang Kredit, Bank*, (Jakarta : Gunung Agung, 1969), hlm. 38

Disebabkan dengan kesulitan-kesulitan tersebut, orang kemudian beralih kepada sistem standar uang ganda (*bimetallic standard sistem*) dimana dalam suatu Negara berlaku sekaligus dua macam mata uang resmi, lazimnya uang emas dan uang perak.<sup>24</sup> Sistem ini merupakan perbaikan dari standar parallel yang memiliki tingkat kesulitan tinggi karena tidak ada keputusan resmi dari pemerintah dalam menentukan perbandingan kurs mata uang. Dalam standar kembar meskipun dalam masyarakat masih berlaku dua jenis mata uang yang berbeda, tetapi pemerintah mengambil inisiatif untuk mematok perbandingan nilai masing-masing. Di dunia Islam, sistem ini dikenal sejak era permulaan Islam itu sendiri. Sebagaimana dikenal mata uang yang berlaku pada masa Nabi terdiri dari dua macam, yaitu dinar dan dirham yang sama-sama berlaku sebagai alat pembayaran yang syah.<sup>25</sup>

Pada tahun 1872, sistem ini juga diterapkan di Amerika Serikat, akan tetapi sebagai akibat fluktuasi rasio perbandingan harga kedua jenis uang tersebut, pada tahun 1873 Amerika Serikat mengambil kebijakan mendemonetisasi perak dan hanya mengakui emas sebagai mata uang.<sup>26</sup> Sebenarnya pada waktu itu kebijakan tersebut menuai kritik secara luas. Sebab dengan dihapusnya perak

<sup>24</sup> Mulya E. Seregar, *Manajemen Moneter Alternatif*, dalam Ismail Yusanto, *Dinar Emas; Solusi Krisis Moneter*, Cet. 1 (Jakarta : PIRAC SEM Institut INFID, 2001), hlm. 84-85

<sup>25</sup> Bahkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika Negara-negara Eropa kebingungan menentukan nilai mata uangnya dan bolak balik antara *gold standar dan fractional reserve*, umat islam tetap tegar menggunakan mata uang Dinar dan Dirham dan tidak terpengaruh oleh kebingungan tersebut. Baca lebih lanjut, Muhaimin Iqbal, *Dinar the Real Money : Dinar Emas, Uang dan Investasiku*, (Jakarta : Gema Insani, 2009), hlm. 37

<sup>26</sup> Peristiwa demonetisasi perak tersebut di Barat dikenal dengan sebutan "*Crime of 73*", karena dianggap sebagai sumber instabilitas keuangan.

sebagai pedamping emas sebagai standar keuangan menyebabkan kondisi instabilitas dalam keuangan. Hal ini karena tidak ada lagi *control and balance* nilai uang. Sehingga dianggap memperlebar kemungkinan fluktuasi nilai uang.<sup>27</sup> Dan pada gilirannya menimbulkan resesi ekonomi dunia pada tahun 1930-an yang cukup besar, sehingga membuat orang meninggalkan sistem keuangan yang dikaitkan dengan emas dan perak. Inggris mengakhiri sistem tersebut pada tahun 1931, Skandinavia, Jepang, Amerika Serikat, Perancis, Swiss, dan Belanda juga meninggalkannya sejak tahun 1936.<sup>28</sup> Dengan kebijakan yang diterapkan tersebut berarti masa *bimetallic standard sistem* telah berakhir

Berakhirnya sistem standar ganda tersebut sekaligus menandai dimulai sistem *monometallism* dengan emas sebagai satu-satunya standar atau yang disebut dengan *gold currency standard*. Berdasarkan sistem ini nilai uang suatu Negara dikonversi dengan nilai emas dalam rasio perbandingan resmi yang ditetapkan oleh badan otoritas moneter. Sistem ini dikenal dengan Sistem Bretton Wood yang telah diterapkan secara luas di berbagai Negara,<sup>29</sup> terutama oleh

---

<sup>27</sup> Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank*, hlm 26

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 42

<sup>29</sup> Konferensi Bretton wood diadakan bermaksud membicarakan secara cermat seperangkat peraturan internasioanal baru yang dirancang untuk mencegah terulangnya kesalahan yang mengakibatkan runtuhnya sistem internasional liberal pada tahun 1929, sebuah rencana disampaikan oleh J.M. Keynes, Pemimpin delegasi Inggris. Baca lebih lanjut Ulrich Duchrow, *Mengubah Kapitalime Dunai : sebuah tinjauan sejarah-al kitabiah Bagi Aksi Politis*, (Jakarta : PT BPK Gunung Mulia 1999), hlm 101-110

Amerika Serikat yang menguasai dua per tiga dari cadangan emas, bahkan dalam catatan Duchrow, AS telah memegang kendali 80% cadangan emas dunia.<sup>30</sup>

Akan tetapi penerapan sistem inipun tidak luput dari banyak persoalan, sehingga lagi-lagi Pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan demonitisasi emas pada tahun 1971.<sup>31</sup> Setidaknya hal-hal yang mempengaruhi keluarnya kebijakan tersebut antara lain :

- a. Menipisnya cadangan emas dunia sehingga sampai dengan tahun 1950-an tidak dapat mengimbangi pertumbuhan output dan perdagangan dunia sehingga menimbulkan kesulitan likuiditas.
- b. Kebutuhan likuiditas ini akhirnya ditutupi oleh *supply* dollar Amerika Serikat melalui *defisit* perdagangannya.
- c. Defisit perdagangan Amerika Serikat yang berkelanjutan mengakibatkan menurunnya cadangan emas yang dimiliki sehingga menyulitkan untuk mempertahankan stabilitas nilai dollar terhadap emas.

Dengan didemonitisasi emas tersebut berakhir pula masa *Bretton Woods Sistem* dan selanjutnya sistem keuangan dunia menerapkan sistem baru, yaitu

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Usulan J.M Keynes sebenarnya dilengkapi dengan adanya upaya untuk mendirikan Uni Kliring Internasional dengan mata uangnya sendiri, bersama dengan fasilitas untuk mendukung Negara yang lebih lemah. Namun, di bawah tekanan AS, rencana ini tidak saja dimentahkan, tetapi aspek-aspek penitngnya juga diubah. AS mendesak rencana putihnya melalui Inggris, yang waktu itu diperlemah melalui PD II, dan peserta lain pada umumnya, ada dalam posisi hampir tidak mampu melawan kepentingan pemodal AS, yang saat itu dalam posisi kuat (setelah perang).

<sup>31</sup> Pemerintah Nixon memutuskan kaitan ini secara sepihak, karena dianggap tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Meningkatnya ketidakmantapan moneter yang menyusul disertai dengan prospek pertumbuhan yang lebih jelek, inflasi dan tidak seimbangnya neraca pembayaran. Baca lebih lanjut J.P. Pronk, *Sedunia Perbedaan : Sebuah Acuan Baru dalam Kerjasama Pembangunan*, diterjemah oleh S. Maemoen, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 5

*fully-fledged managed money standard* dimana nilai uang sama sekali tidak dikaitkan dengan nilai emas.<sup>32</sup> Penerapan sistem baru ini tidak menentukkan penerapan disiplin ketat keluar masuknya emas ke luar dan dalam negeri, masyarakat bebas untuk mencetak emas menjadi perhiasan serta yang lebih penting lagi pemerintah tidak perlu menjaga keseimbangan nilai uang dengan standar emas tertentu. Tetapi sistem yang baru ini memungkinkan setiap Negara yang menerapkannya mempunyai defisit anggaran. Selain itu berlakunya sistem tersebut ditandai oleh dua fenomena yang kerap kali terjadi, yaitu nilai mata uang yang cenderung mengalami inflasi dari waktu ke waktu dan instabilitas nilai tukar uang. Kondisi yang demikian semakin diperparah oleh penerapan bunga dalam sistem ekonomi dunia.

## 2. Pengertian Stabilitas Keuangan Internasional

Stabilitas secara luas dapat diartikan sebagai menghindari terjadinya kegagalan lembaga keuangan dalam skala besar, dan menghindari gangguan serius terhadap fungsi intermediasi dari sistem keuangan. Dalam sistem keuangan yang stabil terdapat kepercayaan yang tinggi di mana lembaga-lembaga keuangan dalam sistem dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa gangguan atau pun bantuan dari luar.<sup>33</sup> Di samping itu pelaku pasar dapat melakukan transaksi pada tingkat harga yang relatif stabil dan transaksi yang dilakukan mencerminkan

<sup>32</sup> George B. Grey, *Federal Reserve Sistem : Background, Analysis, and Bibliography*, (New York : Nova Science Publisher, 2002), hlm 90

<sup>33</sup> Sjamsul Arifin Wibisono, Charles P.R. Joseph, Shinta Sudrajat, *IMF dan Stabilitas Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Kritis*, hlm 11-13

kondisi fundamental. Dengan demikian stabilitas keuangan internasional menekankan stabilnya dua komponen penting, yaitu *key institutions* dan *key market* yang membentuk sistem keuangan.<sup>34</sup>

Selain itu, Sjamsul mengutip pendapatnya Sutton dan Tosovsky (2005) mengatakan bahwa stabilitas keuangan adalah situasi sistem keuangan dapat : (1) mengalokasikan sumber daya secara efisien ke dalam kegiatan produktif pada waktu yang berbeda-beda, (2) memprediksi dan mengukur resiko finansial; dan (3) menyerap *shock*. Maksud dari ketiga poin tersebut adalah stabilitas sistem keuangan meliputi efisiensi dan ketahanan sistem keuangan yang notabene merupakan suatu konsep yang kompleks. Stabil tidaknya sistem keuangan tidak hanya bergantung pada institusi keuangan secara individu, melainkan juga bergantung pada interaksi yang kompleks antara lembaga keuangan, sektor riil dan pasar keuangan.<sup>35</sup>

Secara lebih lengkap, dalam membahas stabilitas keuangan Crocker membedakan *financial stability* dan *monetary stability* yang mengacu pada harga-harga secara umum. Menurut Crocket, ketidakstabilan keuangan (*financial instability*) akan memberi dampak negatif pada efektivitas kebijakan moneter (*monetary stability*) apabila perbankan tidak dapat mentransmisikan kebijakan moneternya dengan baik. Secara teoritis, pada ekonomi tertutup, kebijakan

---

<sup>34</sup> Bank Umum dipandang sebagai *key institution*, mengingat ketidakstabilan dalam sistem perbankan berpotensi mengakibatkan efek tular sistemik (*systemic contagion*). Sedangkan *key market* mencakup pasar uang dan pasar valas, pasar obligasi Negara korporasi, serta pasar modal dan pasar derivatif.

<sup>35</sup> *Ibid.*

moneter memiliki kaitan erat dengan stabilitas keuangan, terutama karena kebijakan moneter yang baik dapat merendahkan gangguan terhadap ekonomi dan sistem keuangan.<sup>36</sup>

Namun dalam perekonomian terbuka, keterkaitan antara stabilitas keuangan dengan kebijakan moneter menjadi sangat longgar, terutama karena perekonomian yang terbuka cenderung lebih rentan terhadap berbagai gangguan eksternal. Gangguan tersebut dapat berupa perubahan *term of trade* yang menghantam *aggregat supply* jangka panjang ataupun berupa pembalikan arah arus modal (*capital flow reversal*) secara besar-besaran menghantam sektor finansial. Walaupun demikian, kebijakan moneter yang mampu menunjang stabilitas ekonomi makro dalam suatu perekonomian terbuka kerap kali juga mampu menunjang stabilitas keuangan secara terbatas. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan oleh setiap Negara untuk mencapai kestabilan makro pada hakikatnya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan antara kestabilan moneter dan kestabilan finansial.

### 3. Seputar Sistem Bretton Woods

Sistem Bretton Wood yang memiliki masa penggunaan dari tahun 1944 sampai 1971.<sup>37</sup> Konferensi Bretton Wood dihadiri oleh wakil-wakil 44 negara dan diselenggarakan pada tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire,

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Budi Winarno, *Pertarungan Negara dan Pasar*, (Yogyakarta : MedPress, 2009), hlm 116-

Amerika Serikat. Pada awalnya mempunyai 30 negara anggota pada tahun 1945 dan sekarang lebih dari 180 negara anggota.

Sistem moneter ini berdasarkan sistem nilai tukar tetap terhadap dolar AS. Sedangkan dollar AS dikaitkan dengan emas, dimana setiap 1 ons emas (sekitar 30 gram) ditetapkan harganya kira-kira sebesar USD 28.35. Ketersediaan Negara-negara anggota untuk mengaitkan mata uangnya dengan dollar AS disebabkan oleh kepercayaan mereka pada besarnya cadangan emas AS (pada saat itu senilai lebih dari USD 20 miliar) yang digunakan untuk mem-back up dollar AS. Pada saat itu emas dinilai sebesar USD 35 per ons, sehingga Negara-negara anggota dapat menukar mata uangnya dengan emas setara dengan nilai tersebut.<sup>38</sup>

dalam Sistem Bretton Wood diterapkan sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*).<sup>39</sup> Dalam *fixed exchange rate sistem* ini, Negara-negara didorong untuk menentukan nilai mata uangnya terhadap USD secara tetap dengan suatu mekanisme penyesuaian.<sup>40</sup> Penetapan USD sebagai acuan ini sering disebut *intervention currency* karena fungsinya sebagai jangkar yang diacu mata uang negara lain. Teknik acuan yang digunakan adalah mematok nilai tukar USD terhadap harga emas secara tetap pada nilai tertentu.

---

<sup>38</sup> Sjamsul Arifin Wibisono, dkk, *IMF dan Stabilitas Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Kritis*, hlm. 1-2

<sup>39</sup> Rimsky. K. Judesseno, *Sistem moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002). hlm 69

<sup>40</sup> Suherdi Judokusumo, *Pengantar Derivatif dalam Moneter Internasional*, (Jakarta : Cikal Sakti, 2002), hlm. 7

Sistem ini berakhir di bawah dekrit Presiden Nixon pada 15 Agustus 1971 dengan dicanangkan bahwa nilai USD tidak dikaitkan dan tidak *convertible* terhadap seberat tertentu emas. Dengan adanya dekrit tersebut maka berakhirilah sistem kurs tetap dan mulailah sistem kurs mengambang (*floating rate sistem*).

#### 4. Maqasid syariah sebagai Metode Istinbath Hukum

Penggunaan maqasid asy-syari'ah sebagai landasan dalam berijtihad, pada hakikatnya telah dipraktekkan oleh para ulama sejak periode awal Islam. Akan tetapi mereka belum menyebutkan terma maqasid asy-syari'ah secara jelas, apalagi model aplikasinya terhadap proses penetapan hukum suatu kasus. Konsep maqasid asy-syari'ah adalah teori perumusan (istinbat) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah *maslahat*. Asy-Syatibi telah memprakarsai sistematisasi konsep maqasid asy-syari'ah mencakup teori tentang tiga prioritas kebutuhan (kemaslahatan); *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Konsep maqasid asy-syari'ah yang dikembangkan Syatibi, secara simpel menggambarkan sebuah hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi (maqasid) sebuah teks (asy-syari'ah), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita.<sup>41</sup>

Pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting, mengerti dan memahami tentang *maqasid al-syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam

<sup>41</sup> Muhammad Hanif Hakim, Konsep Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi (Studi Aplikatif Terhadap Hukum Kartu Kredit), " *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009

memahami redaksi al-Qur'an dan as-sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-adillah*) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan as-sunnah jika menggunakan kajian *semantik* (kebahasaan).<sup>42</sup>

Metode *istinbath al-hukum* dengan menggunakan *qiyas* (analogi), *istihsan*, dan *maslahah al-mursalah* adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan *maqasid al-syari'ah* sebagai dasarnya. Misalnya metode *Qiyas* baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditentukan *maqasid al-syari'ah*nya yaitu dengan menemukan *ratio legis* (*illat al-hukm*) dari sebuah permasalahan hukum, sebagai contoh hukum tentang *khamar* menurut penelitian para ulama' bahwa *maqasid al-syari'ah* dari diharamkannya *khamar* adalah karena sifatnya yang dapat memabukkan sehingga dapat merusak akal manusia, dengan demikian yang menjadi *illat al-hukm* dari *khamar* adalah sifat yang memabukkan dan merusak akal, sedangkan *khamar* hanya salah satu contoh dari sekian banyak hal yang memiliki kesamaan sifat dengannya, apalagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini maka sangat banyak sekali sifat-sifat dari zat-zat kimiawi yang memiliki kesamaan sifat dan

---

<sup>42</sup> Isa Anshori, *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Landasan Etika Global*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 01 No 01 Maret 2009 hlm 16

fungsi dengan contoh *khamar* diatas, dari sini pengembangan hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang ada.<sup>43</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat ilmiah secara holistik. Masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel yang lain.<sup>44</sup> Artinya dengan penggunaan jenis penelitian ini, penulis memungkinkan untuk melakukan hubungan antarvariabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.<sup>45</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data literer atau *library research* (studi pustaka). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 17

<sup>44</sup> Ali, M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama ; pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 47

<sup>45</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktekny*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), hlm 157.

- a) Bahan hukum Primer, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis
- b) Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan-bahan pustaka lainnya, seperti buku, artikel, jurnal, ensiklopedi, *software* kitab-kitab Islam, dan data internet yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi dan hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis penulis.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Critical Discourse Analysis* atau disingkat dengan CDA (analisis wacana). CDA merupakan bantuan dalam analisis berbasis bahasa-data. Selain itu, pendekatan ini menawarkan metode berulang yang mampu menangani data terlepas dari siapa, dimana dan kapan terlibat. Dengan demikian, posisi CDA adalah sebagai sarana mengatasi dua masalah potensial untuk menganalisis pembicaraan dalam studi budaya. Terutama masalah positionality tersebut. Artinya, 'pengetahuan' tidak pernah menjadi fenomena netral atau objektif, tetapi sangat tergantung dengan masalah tempat dari mana orang berbicara, kepada siapa, dan untuk apa tujuannya apa.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Chris Barker and Dariusz GalasinÅski, *Cultural Studies and Discourse Analysis : A Dialogue on Language and Identity*, (London : SAGE Publications Ltd, 2001), hlm 22

Dengan analisis wacana ini diharapkan penulis bukan hanya dapat mengetahui bagaimana sistem Bretton Woods didirikan, dengan segala tujuan yang dicanangkan secara tersurat, tetapi juga mencoba mengelaborasi bagaimana sebenarnya tujuan tersirat dibalik dirumuskannya sistem Bretton Wood sebagai sistem keuangan internasional.<sup>47</sup> Sehingga dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam menyingkapi pola pikir mengenai sistem Bretton Wood, serta untuk selanjutnya dapat menarik satu benang merah yang bisa dipertimbangkan bersama.

#### 4. Pendekatan Studi

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, pendekatan kritis ekonomi-politik, dan pendekatan historis.

- a) Pendekatan normatif, sebagaimana yang dirumuskan oleh Muchtar Ahmad, yaitu dalam arti upaya menjelaskan dasar-dasar filosofis atau normatif suatu kajian ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Islam, menurut ajaran baku al-Qur'an dan al-Hadist.
- b) Pendekatan kritis ekonomi-politik merupakan pendekatan yang bertujuan bukan hanya berkaitan dengan fokus perhatian terhadap proses dan dialektika sejarah Sistem Bretton Wood saja, melainkan terutama sekali adalah ekonomi politik kritis adalah berusaha menjelaskan secara memadai bagaimana nuansa politis menggerakkan roda perubahan-perubahan dan

---

<sup>47</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta : LkiS, 2001), hlm xi-xvi

dialektika yang terjadi berkaitan dengan posisi dan peranan sistem bretton wood dalam sistem keuangan international.<sup>48</sup>

- c) Pendekatan historis merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan data dan penafsiran gejala, peristiwa atau gagasan yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna memahami kegiatan-kegiatan sejarah.<sup>49</sup> Pendekatan ini digunakan penulis untuk menyoroti faktor dan dampak Sistem Bretton Woods terhadap stabilitas perekonomian dunia pada tahun 1944-1973.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan tesis ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I; Berisikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka terkait dengan sistem moneter internasional yang pernah dibahas sebelumnya, pembahasan metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II; merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan studi yang memaparkan tinjauan umum tentang sistem moneter, menjelaskan sistem bretton wood, mekanisme sistem bretton wood, serta tinjauan umum tentang *Maqasid al-Syari'ah*.

<sup>48</sup> Agus Sudibyo, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, (LkiS : Yogyakarta, 2004), hlm 7

<sup>49</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 132.

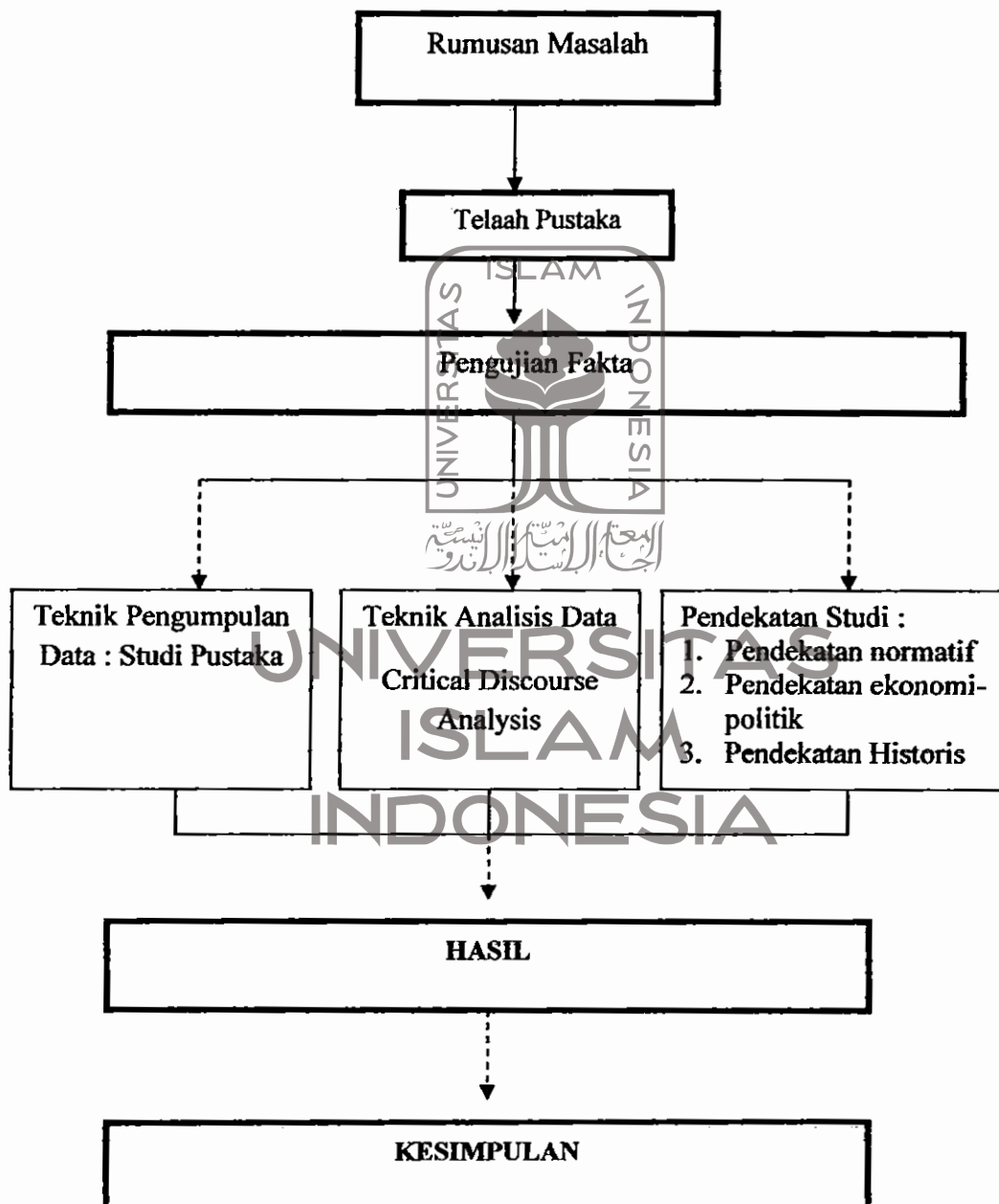
BAB III; Merupakan bab yang berisi paparan untuk menjawab rumusan masalah. Di dalamnya terdapat paparan tentang latarbelakang munculnya Sistem Bretton Wood, dan dampak yang terjadi di balik penetapan sistem Bretton Wood sebagai sistem moneter Internasional. Juga ada analisis terhadap mekanisme dan dampak sistem Bretton Wood terhadap stabilitas keuangan dunia, berdasarkan konsep Maqasid Syariah.

BAB IV; memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Gambar 1.1 : Alur Kerangka berpikir



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM BRETTON WOODS

#### A. Pengertian dan Sejarah Sistem Bretton Woods

Di dalam buku *Managing the World Economy Fifty years after Bretton Woods*, Kenen mencoba mendefinisikan secara umum sistem Bretton Woods. Menurutnya, Sistem Bretton Woods merupakan kerangka kelembagaan yang diciptakan untuk membimbing seluruh ekonomi dunia pada akhir perang dunia kedua.<sup>50</sup> Lebih rinci Kotz mendefinisikan sistem Bretton Woods dengan satu perangkat moneter internasional, perdagangan, dan hubungan investasi dengan menggunakan standar emas dan di *-back up* dengan mata uang US Dollar, bebas dipertukarkan pada kurs tetap, dan ekonomi dunia yang terbuka.<sup>51</sup>

Dalam kamus ekonomi internasional, mencoba untuk melengkapi definisi di atas, menyebutkan bahwa sistem Bretton Woods adalah sistem tukar tetap dengan grid fluktuasi, di mana setiap anggota dana Moneter Internasional (IMF) menetapkan paritas khusus untuk mata uangnya relatif terhadap emas atau dolar, serta perubahan harga mata uang Negara anggota terhadap USD tidak boleh melebihi 1% dari harga *parity* yang ditetapkan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Peter B. Kenen, *Managing the World Economy Fifty years after Bretton Woods*. (Washington, Institute for International Economic, 1994), hlm 343

<sup>51</sup> David M. Kotz, Terrence McDonough, and Michael Reich. *Social Structures of Accumulation : The Political Economy of Growth and Crisis*. (Cambridge : Cambridge University Press, 1994), hlm 62

<sup>52</sup> Edward G. Hinkelman. *Dictionary of International Trade*. 6<sup>th</sup> Edition. (California, World Trade Press, 2005), hlm 27

Sejarah Sistem Bretton Woods bermula sekitar tahun 1930-an, dimana dunia sedang mengalami kekacuan moneter akibat perang Dunia I. Tatanan ekonomi internasional telah mengalami desintegrasi sehingga menciptakan kekacuan nilai tukar yang bebas mengambang (*clean and dirty*), devaluasi yang berkompetensi, pengendalian pertukaran mata uang, kendala perdagangan, perang ekonomi dan moneter internasional yang terjadi antarmata uang-mata uang dan blok-blok mata uang. Perdagangan dan investasi internasional dapat dikatakan telah macet total, perdagangan yang dilakukan melalui kesepakatan barter antarpemerintah saling berkompetensi dan berkonflik satu sama lain.<sup>53</sup>

Pengalaman pahit di atas, yang menimpa perekonomian dunia setelah berakhirnya Perang Dunia II membawa dampak yang cukup berarti bagi sikap masyarakat dunia terhadap perekonomian global. Ini tercermin antara lain dari terbentuknya sistem moneter dunia, yaitu Sistem Bretton Wood yang memiliki masa penggunaan dari tahun 1944 sampai 1971.<sup>54</sup> Konferensi Bretton Wood dihadiri oleh wakil-wakil 44 negara dan diselenggarakan pada tahun 1944 di Bretton Woods, New

---

<sup>53</sup> Murray N. Rothbard, *Apa yang Dilakukan Pemerintah terhadap Uang kita : Sebuah Pengantar Komprehensif Ekonomi Uang dari Mazhab Austria*; terjemahan dan pengantar : Sukasah Syahdan; Edisi I, (Jakarta : Granit, 2007), hlm 89

<sup>54</sup> Pasca perang dingin perdebatan-perdebatan di tingkatan internasional tidak lagi menyangkut bagaimana meredakan ketegangan antara kaum liberal dengan kaum sosialis/Marxis. Akan tetapi Perdebatan saat ini menyangkut cara yang efektif untuk mengelola ekonomi Negara bangsa dan sejauh mana peran Negara dalam aktivitas ekonomi. Perdebatan ini melahirkan paham Keynesianisme pada satu sisi, dan liberalisme di sisi lain. Bagi kamu Keynesian, Negara diperlukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari pemikiran Keynesian ini lahirlah *the Bretton Wood Sistem* yang memperoleh kejayaannya selama dua decade. Sementara bagi kalangan liberal, atau yang kemudian seiring disebut dengan kaum neoliberal, campur tangan Negara hanya akan menimbulkan distorsi dan membuat ekonomi dunai tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Baca lebih lanjut, Budi Winarno, *Pertarungan Negara dan Pasar*, hlm 116-117

Hampshire, Amerika Serikat. Pada awalnya mempunyai 30 negara anggota pada tahun 1945 dan sekarang lebih dari 180 negara anggota.

Kesediaan Negara-negara anggota untuk mengaitkan mata uangnya dengan dollar AS disebabkan oleh kepercayaan mereka pada besarnya cadangan emas AS (pada saat itu senilai lebih dari USD 20 miliar) yang digunakan untuk mem-*back up* dollar AS. Pada saat itu emas dinilai sebesar USD 35 per ons, sehingga Negara-negara anggota dapat menukar mata uangnya dengan emas setara dengan nilai tersebut.<sup>55</sup> Posisi AS sebagai kekuatan hegemoni dunia dimanfaatkan untuk berperan sebagai "*lender of the last resort*" (penyanggah dana dalam keadaan darurat). Karena kredibilitas Dollar AS sebagai mata uang internasional sangat tinggi, maka AS - cadangan devisa yang sangat besar- berperan besar dalam menjamin stabilitas nilai tukar mata uang dunia pada waktu itu.<sup>56</sup>

Dari perjanjian Bretton Wood tersebut, kemudian diperkenalkan sebuah konsep mengenai sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) yang diyakini oleh para ahli pada waktu itu dapat memberikan kepastian dan stabilitas bagi kegiatan perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional.<sup>57</sup> Dalam *fixed exchange rate sistem* ini, Negara-negara didorong untuk menentukan nilai mata uangnya terhadap

---

<sup>55</sup> Sjamsul Arifin Wibisono, dkk, *IMF dan Stabilitas Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Kritis*, hlm. 1-2

<sup>56</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta : Kanisius, 2002), hlm. 175

<sup>57</sup> Rimsky. K. Judesseno, *Sistem moneter dan Perbankan di Indonesia*, hlm 69

USD secara tetap dengan suatu mekanisme penyesuaian.<sup>58</sup> Penetapan USD sebagai acuan ini sering disebut *intervention currency* karena fungsinya sebagai jangkar yang diacu mata uang negara lain. Teknik acuan yang digunakan adalah mematok nilai tukar USD terhadap harga emas secara tetap pada nilai tertentu.

Sistem tetap (*fixed exchange rate sistem*) di dalam *Bretton Wood conference* ini mempunyai persamaan dengan *gold exchange standard* di mana memuat ketentuan sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Amerika Serikat akan menetapkan nilai USD terhadap emas dan bukan mata uang lain;
2. Amerika Serikat akan menjual emas dengan harga tetap kepada pemilik atau pemegang resmi dari mata uang USD;
3. Tiap Negara anggota menetapkan harga atau nilai tukarnya terhadap emas atau USD. USD menjadi *reserves currency* – mata uang dunia;
4. Perubahan harga mata uang Negara anggota terhadap USD tidak boleh melebihi 1% dari harga *parity* yang ditetapkan. Namun, sepanjang masih di bawah 10% masih dapat dibenarkan. Bila perubahan di atas 10% harus seizin IMF.

Kesepakatan Bretton Wood merupakan perjanjian internasional permanen pertama bagi kerjasama antar negara-negara. Berbagai peraturan dan lembaga

---

<sup>58</sup> Suherdi Judokusumo, *Pengantar Derivatif dalam Moneter Internasional*, (Jakarta : Cikal Sakti, 2002), hlm. 7

<sup>59</sup> *Ibid.*

diajukan untuk menjamin ekonomi dunia yang stabil dan meluas dan sistem pertukaran nilai uang yang tetap dan teratur.<sup>60</sup>

Di samping itu, sistem nilai tukar tetap *ala Bretton Wood* ini dimaksudkan untuk meminimalkan ketidakpastian hubungan perdagangan antarnegara sebagai akibat timbulnya fluktuasi nilai tukar yang terlalu besar. Sedangkan mekanisme penyesuaian nilai tukar ditujukan untuk mengatasi gejala temporer yang berakibat pada ketidakseimbangan neraca pembayaran suatu negara. Oleh karena itu, apabila suatu perekonomian dunia memburuk, dan banyak negara yang mengalami ketidakseimbangan neraca pembayaran, maka kemungkinan untuk terjadi perang devaluasi sebagaimana terjadi saat depresi ekonomi dunia tahun 1930-an, dapat dihindarkan. Perang devaluasi untuk saling menyelamatkan neraca pembayaran (*competitive devaluations*) yang dilakukan banyak negara pada tahun 1930-an ini dikenal sebagai "*beggar the neighbors policy*".<sup>61</sup> Oleh karena itulah, dalam rangka mencegah timbulnya persaingan devaluasi di berbagai Negara saat itu, IMF memprakarsai penerapan sistem nilai tukar tetap, dikenal sebagai sistem Bretton wood, yang mana seluruh nilai mata uang Negara dikaitkan dengan dolar AS.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Samuel P. Huntington, dkk. *Amerika dan Dunia*, (Jakarta : Yayasan Obor, 1989), hlm. 159

<sup>61</sup> Istilah "*beggar the neighbors policy*" digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi dimana banyak negara berebut melemahkan nilai mata uangnya untuk mendorong eksportnya. Apabila tindakan devaluasi ini kemudian diikuti secara berantai oleh negara-negara lain dengan melakukan hal yang sama, maka tidak akan ada satu pun negara yang diuntungkan. Sebaliknya negara-negara tersebut akan mengalami kerugian sebagai akibat menciutnya perdagangan internasional. Baca lebih lanjut : Sjamsul Arifin (ed), *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur Satu Dekade setelah Krisis*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 273

<sup>62</sup> Sjamsul Arifin Wibisono, dkk, *IMF dan Stabilitas Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Kritis*. Hlm 3

Senada dengan itu, Huntington menyebutkan bahwa Bretton Wood berfungsi untuk menjamin sistem perdagangan dan pembayaran yang kurang lebih terbuka sekaligus menyediakan perlindungan bagi stabilitas ekonomi dalam negeri melalui dana moneter internasional.<sup>63</sup>

Pernyataan di atas didukung dengan pernyataan Kindleberger yang menyebutkan bahwa sistem Bretton Wood sangat efektif dalam mengontrol konflik dan dalam rangka meraih tujuan-tujuan bersama yang telah dibuat oleh negara-negara bangsa. Menurut Kindleberger, dasar politik sistem Bretton Wood ini ditemukan dalam koinsidensi tiga kondisi, yaitu konsentrasi kekuasaan dalam sejumlah kecil negara, adanya sekelompok kepentingan bersama dari negara-negara tersebut dan kehadiran kekuatan dominan yang rela menjalankan peran kepemimpinan.<sup>64</sup>

Sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, kemudian dibentuk tiga lembaga moneter internasional, yaitu *Internasional Monetary Fund (IMF)*,<sup>65</sup> *Internasional Bank for Reconstruction and Development*, yang biasa disebut dengan IBRD dan sering pula disebut *World Bank*,<sup>66</sup> dan *Internasional Trade Organization* yang biasa

---

<sup>63</sup> Samuel P. Huntington, dkk. *Amerika dan Dunia*, hlm 158

<sup>64</sup> Charles. P. Kindleberger, *The World in Depression 1929-1939*, (Berkeley : Calif, University of California Press, 1973), hlm 23

<sup>65</sup> IMF diberi tugas untuk mempromosikan perdagangan dunia dengan menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kurs tetap dan dengan memberikan pinjaman bagi Negara-negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. Sebagai bagian dari memonitor kepatuhan Negara anggota terhadap aturan-aturannya, IMF juga melakukan tugasnya untuk mengumpulkan dan menstandarisasi data ekonomi internasional.

<sup>66</sup> Bank dunia memberikan pinjaman jangka panjang untuk membantu Negara-negara berkembang membangun waduk, jalan, dan modal fisik lainnya yang akan berkontribusi bagi pengembangan ekonomi mereka. Dana untuk pinjaman-pinjaman ini diperoleh khususnya dengan menerbitkan obligasi bank dunia, yang dijual di pasar modal Negara-negara maju.

disebut dengan ITO,<sup>67</sup> telah berkembang menjadi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO).<sup>68</sup> Di dalam perjanjian IMF, para anggota diwajibkan untuk mematuhi beberapa peraturan sebagai berikut :<sup>69</sup>

1. Mata uang dalam katagori *hard currency* harus mengaitkan dan dikonversikan dengan seberat tertentu emas (*gold exchange standard*)
2. Mata uang dalam katagori *soft currency* harus dikaitkan dengan *hard currency*, sehingga secara tidak langsung semua mata uang terkait dan *convertible* dengan emas. Sistem ini selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan *pegged exchange rate sistem* yang banyak diminati oleh Negara-negara berkembang.
3. Jika terjadi defisit neraca pembayaran (*balance of payment/ BOP*) di antara anggota IMF, maka Negara tersebut dapat meminta bantuan dalam bentuk *special drawing right* (SDR), yaitu semacam uang giral internasional yang lebih dikenal dengan sebutan *gold paper money* yang dikeluarkan oleh IMF. Maksud dan tujuan bantuan tersebut :
  - a. Agar setiap dari anggota IMF terhindar dari perbuatan mendevaluasi mata uangnya;
  - b. Diharapkan nilai tukar antara Negara-negara anggota IMF tetap stabil;

---

<sup>67</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, hlm. 37

<sup>68</sup> WTO ditetapkan untuk memonitor aturan-aturan untuk melaksanakan perdagangan antarnegara (tarif dan kuota).

<sup>69</sup> Rimsky. K. Judesseno, *Sistem moneter dan Perbankan di Indonesia* .hlm. 70

- c. Kalaupun terjadi fluktuasi nilai tukar, diharapkan hanya berkisar antara 1% sampai dengan 2,5% di atas atau dibawah kurs yang berlaku resmi.

## B. Mekanisme Sistem Bretton Woods

Tata pembayaran internasional yang berdasarkan persetujuan Bretton Wood pada pokoknya berarti bahwa kurs valuta ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, dan semua negara mempertahankan kurs yang stabil. Akan tetapi jika impor suatu negara terus-menerus lebih besar dari pada eksportnya, Neraca pembayarannya<sup>70</sup> terus menerus mengalami defisit. karena harus dibayar dengan devisa, maka permintaan valuta asing (untuk impor) terus menerus lebih besar dari pada penawaran devisa (untuk ekspor). Oleh karena itu, harga valuta asing (kurs) cenderung naik sehingga ada bahaya akan muncul perbedaan antar kurs “resmi” dan kurs “bebas” bahkan kurs “gelap”. Kalau suatu negara – meskipun dengan usaha stabilisasi, bahkan dengan bantuan IMF – belum juga berhasil mengembalikan keseimbangan neraca pembayarannya, maka kurs resmi yang telah ditetapkan (dan disetujui IMF) itu tidak akan dapat dipertahankan lagi dan perlu disesuaikan.<sup>71</sup>

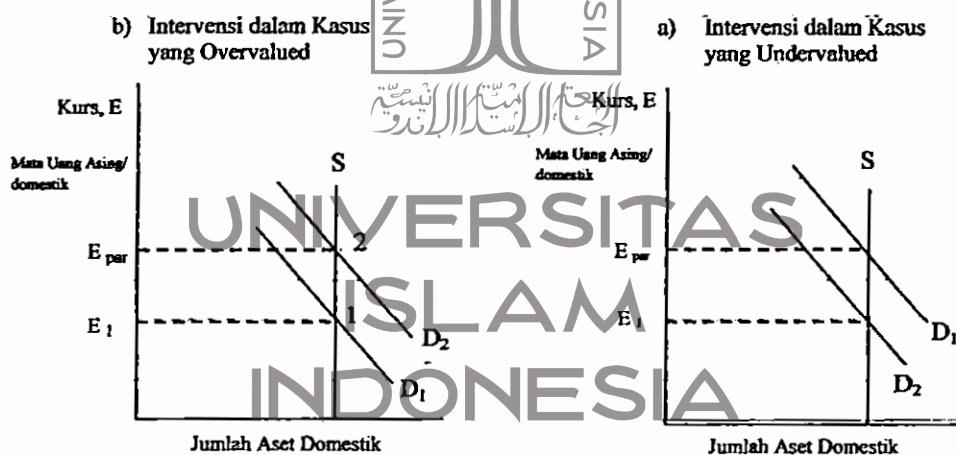
Kurs tetap dijaga dengan intervensi dalam pasar valuta asing oleh bank sentral di Negara-negara selain AS yang membeli dan menjual asset dolar, yang mereka pegang sebagai cadangan internasional. Dolar AS, yang digunakan oleh

<sup>70</sup> Nercaya Pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran (keluar dan masuk) untuk suatu Negara.

<sup>71</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Eknomi Makro*, (Yogyakarta : Kanisius, 2004), hlm 304.

Negara-negara lain untuk mendenominasi asset yang mereka pegang sebagai cadangan internasional, disebut mata uang cadangan (*reserve currency*). Dengan demikian, sifat penting sistem Bretton Wood adalah Pendirian AS sebagai negara mata uang cadangan.<sup>72</sup> Di bawah adalah figur yang akan menunjukkan bagaimana sistem kurs tetap bekerja dalam praktek dengan menggunakan analisis permintaan dan penawaran pasar valuta asing.

**Gambar 2.1 : Figur Sistem Kurs Tetap Bekerja ( Analisis Permintaan dan Penawaran)**



Dari figur di atas dapat diterangkan bahwa Panel (a) menjelaskan situasi dimana mata uang domestik ditetapkan relatif terhadap mata uang jangkar, sedangkan kurva permintaan bergeser ke kiri ke  $\bar{D}_1$  mungkin karena suku bunga luar negeri telah meningkat, sehingga menurunkan perkiraan tingkat pengembalian relatif atas asset

<sup>72</sup> Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, edisi 2 (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hlm 150-153

domestik. Kurs sekarang *overvalued* : kurva permintaan  $D_1$  berpotongan dengan kurva penawaran pada kurs  $E_1$ , yang lebih rendah daripada nilai tetap (par) kurs  $E_{par}$ . Untuk mempertahankan kurs pada  $E_{par}$  bank sentral harus campur tangan di pasar valuta asing untuk membeli mata uang domestik dengan menjual asset luar negeri. Tindakan ini seperti penjualan pasar terbuka, berarti bahwa uang primer ataupun uang beredar menurun, mendorong suku bunga atas asset domestic meningkat  $i^D$ .<sup>73</sup> Kenaikan suku domestik ini meningkatkan perkiraan tingkat pengembalian relatif atas asset domestik, menggeser kurva ke kanan. Bank sentral akan terus membeli mata uang domestik hingga kurva permintaan mencapai  $D_2$  dan kurs keseimbangan ada pada  $E_{par}$  di titik 2 pada panel (a).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika mata uang domestik mengalami *overvalued*, bank sentral harus membeli mata uang domestik agar kurs tetap sama, tetapi akibatnya bank sentral kehilangan cadangan internasional.

Panel (b) pada figur 2 menjelaskan situasi dimana kurva permintaan telah bergeser ke kanan ke  $D_1$  karena perkiraan tingkat pengembalian relatif atas asset domestik telah meningkat sehingga kurs *undervalued*. Kurva permintaan  $D_1$  berpotongan dengan kurva penawaran pada kurs  $E_1$ , yang ada di atas  $E_{par}$ . Pada situasi ini bank sentral harus menjual mata uang domestik dan membeli asset luar negeri. Tindakan ini seperti pembelian pasar terbuka untuk meningkatkan uang beredar dan menurunkan suku bunga atas asset domestik  $D_1$ . Bank sentral terus

<sup>73</sup> Oleh karena kurs akan terus tetap pada  $E_{par}$  perkiraan kurs masa depan tidak akan berubah dan sehingga tidak perlu disampaikan dalam analisis.

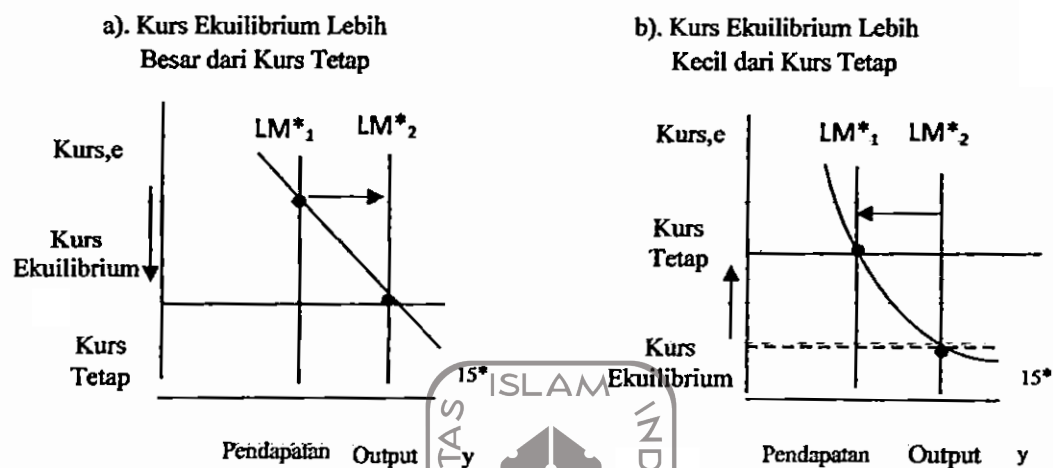
menjual mata uang domestik dan menurunkan  $D_1$  hingga kurva permintaan bergeser ke  $D_2$ , dimana suku bunga keseimbangan pada beredar pada  $E_{par}$  – titik 2 pada panel (b). Dengan demikian, analisis kita memberikan kesimpulan berikut : ketika mata uang domestik undervalued, bank sentral harus menjual mata uang domestik agar kurs tetap sama, tetapi akibatnya bank sentral memperoleh cadangan internasional.

Di samping itu, bank sentral siap membeli dan menjual mata uang domestik untuk mata uang asing pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter suatu negara untuk satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Dengan kata lain, esensi dari sistem kurs tetap adalah komitmen bank sentral untuk membiarkan jumlah uang yang beredar menyesuaikan pada level berapapun akan menjamin kurs ekuilibrium sama dengan nilai kurs yang diumumkan. Selain itu, selama bank sentral siap membeli atau menjual mata uang asing pada kurs tetap, jumlah uang beredar secara otomatis pada tingkat yang diperlukan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> N. Gregory Mankiw, Makro Ekonomi, (Jakarta : PT Gelora Akasara Pratama, 2007), hlm. 337-338

**Gambar 2.2 : Figur Sistem Kurs Tetap Bekerja ( Analisis Keuangan)**



Bagaimana kurs tetap mengendalikan uang beredar, pada bagian (a) kurs ekuilibrium awalnya melebihi tingkat tetapnya. Pialang akan membeli mata uang asing di pasar valuta asing dan menjualnya ke Fed/ BI untuk mendapatkan laba. Proses ini secara otomatis meningkatkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva  $LM^*$  ke kanan dan menurunkan kurs. Pada bagian (b) kurs ekuilibrium adalah dibawah tingkat tetapnya. Pialang akan membeli dollar/ rupiah di pasar valuta asing dan menggunakannya untuk membeli mata uang asing dari Fed/ BI. Proses ini secara otomatis menurunkan jumlah uang beredar, menggeser kurva  $LM^*$  ke kiri dan meningkatkan kurs.<sup>75</sup>

<sup>75</sup> *Ibid.*

### C. Kejatuhan Sistem Bretton Woods

Sistem nilai tukar tetap yang disponsori oleh IMF ini berjalan mulus hingga akhir tahun 1960-an. Sistem ini mengalami distorsi ketika pada tahun 1970 AS tidak konsekuen melaksanakan Sistem Bretton Woods. Keharusan AS untuk membeli semua USD yang beredar di luar AS yang dipegang Bank sentral negara-negara lain, dan membayarnya dengan cadangan emas AS dengan nilai tetap sebesar USD 35 per *ounce* sesuai kesepakatan Bretton Wood, telah dilanggar AS dengan menghentikan mekanisme pembelian tersebut. Dalam kondisi demikian, akan sulit bagi IMF untuk mempertahankan apa yang dikenal sebagai *par value system* atau kurs tetap ala Bretton wood yang berlaku secara universal. Kondisi ini diperburuk dengan tindakan AS yang mendevaluasi USD-nya terhadap emas pada tahun 1972 dan kemudian diikuti dengan pelebaran *band par value* dari plus-minus satu persen menjadi plus-minus dua seperempat persen pada tahun 1973, atau dikenal sebagai *Smthonion Agreement*. Sejak saat itu, sistem Bretton Wood dapat dikatakan bubar dan beramai-ramai ditinggal anggota IMF.<sup>76</sup>

Sistem tersebut berlaku di Amerika Serikat dan berakhir di bawah dekrit Presiden Nixon pada 15 Agustus 1971 dengan dicanangkan bahwa nilai USD tidak dikaitkan dan tidak *convertible* terhadap seberat tertentu emas. Dengan adanya dekrit tersebut maka berakhirilah sistem kurs tetap dan mulailah sistem kurs mengambang (*floating rate system*).

---

<sup>76</sup> Sjamsul Arifin (ed), *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur Satu Dekade setelah Krisis, ...* hlm. 273-275

Sebagaimana diketahui bahwa Amerika mempunyai kekuatan ekonomi terbesar di dunia, menjadikan mata uangnya sebagai standar moneter internasional yang konvertibel terhadap seberat tertentu emas. Pada waktu itu, konversi dollar terhadap emas adalah \$35 sama dengan satu *troy once* emas atau 28.35 emas. Kedigdayaan Amerika membuat mata uangnya konvertibel dan digunakan di seluruh dunia sebagai mata uang perdagangan internasional. Terlebih setelah perang dunia II, dimana perdagangan internasional mulai bergairah dan tumbuh pesat, Dollar Amerika dibutuhkan dan dicari-cari sebagai likuiditas perdagangan internasional. Hal ini kemudian menimbulkan krisis likuiditas yang diakibatkan oleh langkanya dollar dalam perdagangan internasional, yang lebih dikenal dengan istilah *dollar shortage*.<sup>77</sup>

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai polisi dunia, dan keterlibatannya pada perang Korea dan Vietnam pasca tahun 60-an, serta Mashall Plan Program dalam rangka memberikan bantuan modal pembangunan akibat kehancuran Perang Dunia II ke Negara-negara Eropa, mengakibatkan larinya dollar Amerika ke luar negeri yang diikuti dengan defisit neraca pembayaran. Keadaan tersebut menimbulkan secara tidak langsung *dollar gult* atau kelebihan dollar yang beredar di luar Amerika. Dengan jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka inflasi yang tinggi tidak dapat dihindari lagi. Akibatnya selanjutnya adalah menurunnya kepercayaan internasional terhadap dollar. Orang enggan memegang

---

<sup>77</sup> Rimsky. K. Judesseno, Sistem moneter dan Perbankan di Indonesia, hlm 70-79

dollar karena sudah tidak lagi memiliki daya tarik sebagai standar internasional yang dapat menyangga transaksi perdagangan internasional.<sup>78</sup>

Dengan kata lain, Latar belakang munculnya dekrit Presiden Amerika pada waktu itu adalah karena krisis kepercayaan internasional terhadap dollar Amerika sebagai standar moneter internasional yang sudah tidak dapat lagi menyangga kebutuhan likuiditas transaksi antar Negara-negara di dunia, sehingga mengakibatkan defisit neraca pembayaran dan larinya cadangan emas dari Bank Sentral Amerika (*Federal Reserve Bank/FRB*) ke luar negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Presiden Nixon menerbitkan dekrit presiden yang menyatakan meninggalkan sistem kurs tetap. Namun keputusan tersebut melahirkan kekacauan baru dalam perekonomian internasional, karena saat itu dunia belum menetapkan pengganti dolar sebagai standar moneter.

Beberapa tahun tidak ada sistem baku yang harus diacu, akhirnya pada tahun 1976, dalam sidang tahunan yang dilakukan di Jamaica (dikenal sebagai *Jamaica Agreement*). Ditetapkanlah sistem nilai tukar mengambang sebagai nilai tukar yang didukung IMF. Suatu pilihan sistem nilai tukar yang selanjutnya diadopsi oleh banyak negara pascabubaranya sistem Bretton Wood.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Usulan-usulan untuk menggantikan dolar sebagai standar moneter internasional mulai berdatangan dari berbagai ahli ekonomi dan moneter seperti yang dikemukakan oleh ekonom Perancis Jacques Rueff dan ekonom Inggris Sir. R. Harrod, untuk kembali ke standar diuraikan dimuka, selama diberlakukannya *fixed exchange rate* di Indonesia maka selama periode resmi kurs tetap, Bank sentral Indonesia telah melakukan paling tidak 3 kali tindakan devaluasi mata uangnya terhadap dolar Amerika. Sehingga pada tahun 1978, Indonesia mulai menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali (*Managed floating*). Dengan sistem tersebut, nilai tukar rupiah diibandingkan terhadap berbagai mata uang (*basket of currencies*) mitra dagang utama Indonesia.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG MAQASID SYARIAH

### A. Pengertian Maqasid Syariah

Jika ditelusuri dari tata bahasa Inggris, Maqasid secara etimologis artinya *purpose, goal* (tujuan), *principle*, dan *end* (akhir). Secara etimologis (Arab) *maqâshid al-syari'ah* terdiri dari dua unsur kata, yaitu *maqâshid* (مقاصد) dan *al-syari'ah*. Kata "مقاصد" adalah jamak dari kata "مقصد" yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan syariah (الشريعة) secara etimologi berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai. Secara terminologi, syariah adalah seperangkat norma Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya.<sup>50</sup> Dengan demikian *maqâshid al-syari'ah* (مقاصد الشريعة) dapat diartikan dengan tujuan atau maksud penetapan hukum syara'.

Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh ulama' ushul fiqh as-Syatibi memberikan definisinya dengan ungkapan, "sesungguhnya syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 3

di dunia dan di akhirat.”<sup>81</sup> Jasser Auda juga mencoba mendefinisikan, menurutnya, Maqasid Syariah (*Maqasid Of The Islamic Law*) adalah tujuan yang dilatarbelakangi oleh aturan Islam (*Islamic ruling*).<sup>82</sup>

Satria Effendi dalam bukunya *Ushul Fiqh*, menyimpulkan Maqasid Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>83</sup>

Istilah Maqashid syari’ah juga diartikan Wahbah al-Zuhaili, yaitu nilai-nilai dan sasaran-sasaran syarak yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari’at, yang ditetapkan oleh *syari’* dalam setiap ketentuan hukum.<sup>84</sup>

Menurut Yudian Wahyudi, Maqashid syari’ah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan manusia, khususnya umat Islam.<sup>85</sup> senada dengan itu, menurut ‘Alal al-Fasi sebagaimana dikutip oleh Asmuni mengatakan Maqashid syari’ah berarti syariah dan rahasia-rahasia di balik penetapan hukum oleh Allah. Tujuan disini memiliki arti membangun dunia (*imarah al-ardh*), menjaga

<sup>81</sup> As-Syatibi. *al-Muwafaqat fi UShul al- Ahkam*, V ; II edisi Muhammad al-Khadar Husein al-Tulisi, (Beirut.: Dar al-Fikr, 1341 H). hal. 2

<sup>82</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law : a Sistem Approach*, (Washington : The Internasional Institute of Islamic Thought, 2008), hlm 2

<sup>83</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm 233

<sup>84</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), hal. 1017

<sup>85</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik : Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2007), hal. 95-96

sistem kehidupan dan keutuhannya sesuai dengan kebutuhan mukalaf serta melaksanakan apa yang ditugaskan kepada mereka seperti berbuat adil, istiqomah, keselamatan akal (*salamtu al-'aql*), pekerjaan, mengelola tanah, dan mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan umat.<sup>86</sup>

Adapun inti dari konsep Maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Menurut Yusdani, istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid syari'ah tersebut adalah kepentingan umum, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kepentingan umum.<sup>87</sup>

Dalam *ushul fiqh*, bahasan maqashid syari'ah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan ijtihad. Ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan manusia.<sup>88</sup>

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, baik yang terkait dengan pengertian, macam dan tingkatannya maupun cara memahaminya, maka *maqâshid al-*

<sup>86</sup> Asmuni, *Aktualisasi Teori Maqashid As-Syatibi* (Upaya Menemukan Landasan Nilai-nilai Etis Religius dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah), dalam *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah* (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2008), hal. 141

<sup>87</sup> Yusdani, *Peranan kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, (Yogyakarta : UH Press, 2000), hal. 67-68

<sup>88</sup> Dahlan, Abdul Azis [ed. et al.]. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve) .hal. 1108

*syari'ah* intinya tidak lain adalah menyangkut kemaslahatan yang menjadi tujuan dari ditetapkannya hukum syara'.

Ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw. sudah ada petunjuk yang mengacu kepada peranan penting *maqashid syari'ah* dalam pembentukan hukum Islam.<sup>89</sup> Kemudian selanjutnya, Imam Syatibi dianggap sebagai bapak *maqashid syari'ah* karena peranannya dalam membahas topik tersebut secara sistematis dalam kitabnya *al-Muwafaqot*.<sup>90</sup> Padahal al-Syatibi bukanlah orang yang pertama menggulirkan topik tersebut.

Al-Juwaini (w. 478 H) menurut urutan periode merupakan orang yang pertama telah menggagas permasalahan ini dengan melontarkan ide untuk menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai nilai universal dan mengangkatnya dari level *dzanny* ke level *qoth'iy*.<sup>91</sup> Hal tersebut dilakukan atas keprihatinannya terhadap kemerosotan peradaban sosial, terutama para cendekia dan politisi Islam pada saat itu. Kebanyakan ulama Syafi'iyah dan beberapa orang Mutakallimun saat itu memang mengatakan bahwa maslahat hanya

<sup>89</sup> Yang sering dijadikan contoh dan menjustifikasi ajaran maslahat dari Nabi adalah hadis nabi yang melarang orang-orang Islam di Madinah menyimpan daging kurban, kecuali sekedar bekal selama tiga hari. Beberapa tahun kemudian, ada beberapa orang sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah Saw. dengan menyimpan daging kurban lebih dari sekedar perbekalan untuk tiga hari. Peristiwa itu disampaikan orang kepada Rasulullah Saw., namun Rasulullah membenarkannya serta menjelaskan bahwa dahulu hal tersebut dilarang karena kepentingan *ad-daffah* (para pendatang dari perkampungan badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging kurban). Ini menunjukkan bahwa ketetapan dari Rasulullah tetap mempertimbangkan kemaslahatan sebagai *maqashid syari'ah*. Lihat Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), XIII: 110.

<sup>90</sup> Wael B. Hallaq, *a history of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Ushul Fiqh* (Cambridge: Cambridge University, 1997), hal. 206.

<sup>91</sup> Meskipun bisa dikatakan paparan konsep al-Juwaini tidak begitu mendalam dibanding konsep al-Syatibi, namun setidaknya keberaniannya dalam menggulirkan tema yang kurang disentuh oleh ulama semasanya. Ia telah memberikan andil pada perkembangan *maqashid syari'ah* selanjutnya. Lihat Robitul Firdaus. "Menggagas Konsep Maslahat Ala Indonesia (Studi Terhadap Fatwa Mui Nomor 6/Munas Vii/Mui/10/2005 Tentang Kriteria Maslahat Dan Pandangan Jaringan Islam Liberal Terhadap Konsep Maslahat)." *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2008, hlm 64

dapat diterima jika ada dasar *nash*-nya. Seandainya masalah sampai bertentangan dengan *nash*, maka ia tidak boleh digunakan.<sup>92</sup>

Namun, jika ditelusuri berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh al-Raysuni, *term maqashid syari'ah* dipakai dan dibahas sebagai sebuah keilmuan jauh sebelum Imam Haramain. Tokoh-tokoh yang memberikan perhatian terhadap konsep ini antara lain menurutnya, al-Turmudzi al-Hakim (abad III), Abu Mansur al-Maturidi (w. 375 H), Abu Bakar al-Qaffal (w. 365 H), Abu Bakar al-Abhary (w. 375), al-Baqilani (w. 403), Ibnu Hajib (w. 646), al-Razi (w. 606), al-Amidy (w. 631), Izzuddin Abdus Salam (660), Baidawi (w. 685), al-Asnawi (w. 772), Ibnu Subki (w.771), dan tokoh-tokoh lainnya.<sup>93</sup>

Sedangkan menurut Hammadi al-Ubaydi, tokoh yang menggagas pertama kali tentang *Maqashid* adalah Ibrahim an-Nakhai (wafat 96 H). Beliau adalah tabi'in, yang juga kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imam Abu Hanifah. Setelah al-Ubaydi, *Maqashid* kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin ath-Thufi dan yang terakhir adalah Syathibi.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H) I: 295; II: 923-964.

<sup>93</sup> Muh. Nur Jihad dkk., "Pergeseran Paradigma Dari Ushul Fiqh Ke *Maqashid Syari'ah*", *Makalah*, kumpulan makalah *ushul fiqh*, Yogyakarta: Perpustakaan Magister Studi Islam UII, hal. 7-8.

<sup>94</sup> Hammadi al-'Ubaydi, 1992. *al-Syāthibi wa Maqāshid al-Syarī'ah*, Tharablus: al-Jamahiriyyah al-'Uzhma.

## B. Dimensi Maqashid Syariah

Maqashid syari'ah, menurut Imam al-Juwaini<sup>95</sup> (yang kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali dan al-Syathibi), umumnya mempunyai tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi.<sup>96</sup>

Pertama, tujuan primer (*daruri*) yang didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan manusia secara total. Di sini, ada lima kepentingan yang harus dilindungi : agama, jiwa, harat, harga diri (kehormatan) dan keturunan. Kedua, tujuan sekunder (*hajiat*), yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan primer. Jika hal-hal sekunder tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai ketidaksempurnaan bahkan kesulitan. Ketiga, tujuan trisier (*tahsiniat*), yaitu sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya atau dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan primer dan sekunder.

Menurut al-Syatibi, kajian tentang Maqashid syariah ini bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan

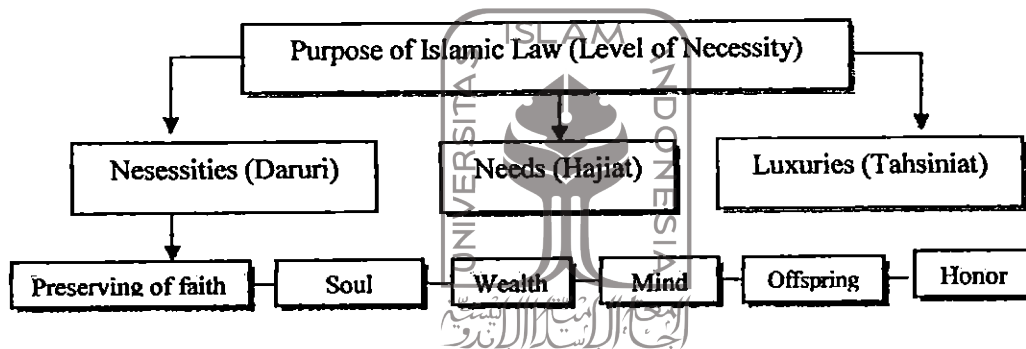
<sup>95</sup> Al-Juwaini (w. 478 H) yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Haramain telah menggagas permasalahan ini dengan melontarkan ide untuk menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai nilai universal dan mengangkatnya dari level *dzanny* ke level *qoth'iy*. Hal tersebut dilakukan atas keprihatinannya terhadap kemerosotan peradaban sosial, terutama para cendekia dan politisi Islam pada saat itu. Baca lebih lanjut Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H) I: 295; II: 923-964.

<sup>96</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik : Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, hal. 96

bagi hamba-hamba-Nya untuk masa sekarang (dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (akhirat).<sup>97</sup>

Sebagaimana di atas, Jasser Auda juga di dalam bukunya *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law*, mengklasifikasi Maqashid syari'ah menjadi tiga bagian, untuk lebih jelas dapat dilihat di gambar di bawah ini :<sup>98</sup>

**Gambar 3.1 : Hirarki Maqasid As-Syariah**



### 1. Kebutuhan Primer (Daruri)

Kebutuhan Primer ialah tingkat kebutuhan yang harus ada. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan pokok yang disepakati dalam syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, antara lain : menjaga agama (*hifzu ad-*

<sup>97</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Abdullah Darraz (ed), (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), hal 80-91

<sup>98</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law : a Sistem Approach*, hal. 3

*din*), menjaga jiwa (*hifzu an-Nafs*), menjaga akal (*hifzu aql*), menjaga harta (*hifzu al-Mal*), menjaga keturunan (*hifzu an-Nasl*).<sup>99</sup>

Kelima *daruriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karena Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *daruriyat* itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan lima unsur pokok adalah baik, dan karena harus dikerjakan. Dan segala perbuatan yang merusak nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijauhi.<sup>100</sup>

## 2. Kebutuhan Sekunder (Hajiat)

Kebutuhan sekunder ialah kebutuhan yang ketiadaannya tidak sampai mengancam keselamatan, hanya saja akan mendatangkan kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.<sup>101</sup>

Tujuan *hajiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok :<sup>102</sup>

<sup>99</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offaset, 2009), hal. xv

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 209.

<sup>101</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hal. 235

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 213-214

- a. Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik, hal ini disebut *muqoddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *hajiyyat*.
- b. Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur *dharuri*. Perbuatan zina berada pada tingkat *dharuri*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup bagi terlaksanakannya larangan zina yang *dharuri* itu. Melakukan *khalawat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak merusak keturanan. Juga tidak mesti *khalawat* berakhir dengan zina. Namun demikian, *khalawat* tetap dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *dharuri*.
- c. Segala kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharuri* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan. *Rukhsah* berlaku dalam hukum "ibadat" seperti sholat bagi yang berada dalam perjalanan; dalam "muamalat" seperti bolehnya

jual beli salam; juga dalam “jinayat” seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan *qishas* bagi pembunuh, bagi diganti *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.

### 3. Kebutuhan Trisier (Tahsiniat)

Kebutuhan tahsiniat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak di pandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>103</sup>

Tujuan *tahsiniat* ini menurut hukum asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*dharuri* dan *hajiyyat*). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *tahsiniat* ini menimbulkan hukum “sunat”, dan perbuatan yang mengabaikan *tahsiniat* menimbulkan hukum “makruh”.

### C. Maqasid syariah sebagai Metode Istinbath Hukum

Penggunaan maqasid asy-syari'ah sebagai metode perumusan hukum (istinbath), pada hakikatnya telah diterapkan oleh para ulama sejak periode awal

---

<sup>103</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hal 236

Islam. Hanya saja belum disebutkan terma *maqasid asyari'ah* secara eksplisit dan jelas. Dengan demikian, sebenarnya fakta historis tersebut hendak menggambarkan bahwa hubungan antara teori hukum dan perubahan masyarakat selalu harmonis, sehingga menipiskan kesan bahwa hukum Islam itu kaku, tidak dinamis dan tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan beradaptasi dengannya.<sup>104</sup>

Dalam *fiqh* Islam, sebenarnya telah dilakukan pengembangan metode untuk melengkapi teori-teori sumber hukum dan mengisi kekosongan yang belum terpenuhi sebagai akibat cara pandang yang kaku dan tektualis yang selalu bermuara pada kaidah-kaidah qiyas. Pengembangan metode ini antara lain dengan nalar *al-istihsan*, *al-istislah* dan *siyasah syar'iyah*.<sup>105</sup> Metode *istinbath al-hukum* dengan menggunakan *qiyas* (analogi), *istihsan*, dan *maslahah al-mursalah* adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan *maqasid al-syari'ah* sebagai dasarnya.

Berbicara mengenai masalah dalam konteks *maqashid syari'ah*, Syatibi mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syari'*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban

<sup>104</sup> Hukum Islam sebagaimana dipahami oleh para orientalis memiliki karakter ruang lingkup yang terbatas (*tahdid*), tetap (*sabat*), pasti (*qath'i*), dan abadi (*dawam*), oleh karenanya hukum Islam tidak dinamis dan tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan beradaptasi dengannya. Sebagian orientalis di antaranya Snouck Hurgonje berpendapat bahwa *fiqh* Islam hanya mencerminkan "teori kewajiban". Artinya lebih mencerminkan teori etika ketimbang teori hukum dalam pengertian terminologinya. Jadi hukum Islam sesuai dengan karakteristiknya merupakan hukum agama yang kaku (*jamid*) yang tidak menerima perubahan dan adaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat. Baca Robitul Firdaus. "Menggagas Konsep Masalah Ala Indonesia", hlm 65-66

<sup>105</sup> Asmuni M.Th, " Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqasid Menuju Ijtihad yang Dinamis " dikutip dari [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com), diakses pada 8 Juli 2011

*syari'at* dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid al-syar'iyah*.<sup>106</sup> Dalam studinya, al-Raisuni mengemukakan bahwa *al-maqasid* Syatibi berdiri atas dua asas: Pertama, kausasai atau enumerasi *syari'ah (ta'lil)* dengan menarik masalah dan menolak mafsadah. Kedua, *al-maqasid* sebagai produk induksi menjadi dasar ijtihad terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh *nash* dan *qiyas*.<sup>107</sup>

Terkait dengan posisi teori *Maqashid* sebagai pokok pangkal dari proses berijtihad, Syathibi mengintrodusir dua langkah dalam proses ijtihad, yaitu *ijtihad istinbathi* dan *ijtihad tathbiqi*. Pembagian yang dilakukan oleh Syathibi ini dapat mempermudah untuk memahami mekanisme ijtihad. Dalam *ijtihad istinbathi*, seorang ekonom muslim memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide yang dikandung dalam teks (al-Qur'an dan Sunnah) yang masih abstrak. Setelah memperoleh ide-ide tersebut maka kemudian menerapkan ide-ide abstrak tadi pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan; inilah yang disebut dengan *ijtihad tathbiqi* atau "ijtihad penerapan." Jadi obyek *ijtihad istinbathi* adalah teks, sedangkan obyek kajian *tathbiqi* adalah manusia dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya. Sehingga masuk akal jika kemudian Syathibi

<sup>106</sup> Mas'ud, Muhammad Khalid.. *Shatibi's of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute. 1995, hlm 151

<sup>107</sup> Ahmad al-Raisuny, *Nazariyat al- Maqôsid 'inda Al-Imam Syatibi*, (Riyad: al-Dâr al-'Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992), hal. 143

menyebut *ijtihad tathbiqi* sebagai ijtihad yang tidak akan berhenti sampai akhir zaman.<sup>108</sup>

Dalam menggali *maqashid syari'ah* lebih mendalam, paling tidak menurut Ibn 'Asyur ada tiga metode yang dapat digunakan, yaitu :<sup>109</sup>

1. *Istiqra*, mengkaji *syari'at* dari semua aspek. Cara ini bisa dilakukan dengan dua jalan. Pertama, mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui 'illat-nya, sehingga *maqashid* dapat diketahui dengan mudah. Kedua, meneliti dalil-dalil hukum yang sama 'illat-nya, sampai dirasa yakin bahwa 'illat tersebut adalah *maqsad*-nya.
2. Dalil-dalil Al-Quran yang jelas dan tegas dalalahnya yang kemungkinan kecil mengartikannya bukan makna *dohirnya*.
3. Dalil-dalil sunnah yang *mutawatir*, baik secara *ma'nawi* maupun 'amali

#### D. Maslahat Sebagai Tujuan Maqasid Syariah

Maslahat<sup>110</sup> secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab *al-mashlahah* dari kata kerja *shalaha-yashluhu* yang berarti kebaikan. Kata *al-mashlahah* adalah

<sup>108</sup> Hilman Fauzi Nugraha, "*Al-Maqasid As-Syariah fii Muamalah Maliyah : Sebuah Tinjauan Implikasi Maqashid Terhadap Prilaku Ekonomi (Analisa Ekonomi Mikro dan Makro)*", dikutip dari <http://selaluberharapuntukmu.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Juli 2011

<sup>109</sup> Ibnu 'Asyur juga menyatakan bahwa meskipun *al-kuliyah al-khamsah* memang sangat penting, namun secara substansial sudah tidak memadai untuk mengawal perkembangan dinamika ijtihad kontemporer. Untuk itu, 'Asyur menawarkan paradigma baru bahwa poros syariat sejatinya terletak pada nilai-nilai universal seperti fitrah, kebebasan (*huriyyah*), toleran (*samahah*), egalitarianisme, dan hak asasi manusia. Baca lebih lanjut Moh Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid Syari'at al-Islamiyah*, (Yordan: Dar Nafais, 2001), hlm. 190-195.

<sup>110</sup> Kata "maslahat" yang digunakan dalam tulisan ini setara atau memiliki maksud yang sama dengan kata "masalahah" ( *مصلحة* ) dalam bahasa arab. Artinya konteks kata "maslahat" yang dimaksud dalam tulisan ini adalah maslahat yang berada dalam kajian *ushul fiqh*.

bentuk tunggal (*mufrad*), sedangkan jamaknya adalah *al-mashaalih* mengikuti *wazan* (timbangan kata) *al-mafaa'il* yang menunjukkan arti sesuatu yang banyak. Oleh karena itu kata *maslahat* berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Islam, pengertian *maslahat* dinegasikan dengan *mafsadat* (*al-mafsadah*) sesuatu yang membawa *madarah* (bahaya, bencana, atau kerusakan) atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>111</sup>

Sedangkan definisi *maslahat* secara terminologi atau istilah *syara'* telah banyak dikemukakan oleh para ulama *ushul*. Imam Ghazali, memberikan definisi *maslahat* yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya (usaha) mengambil manfaat dan menolak mudarat.<sup>112</sup>

Berkaitan dengan tradisi, Najm al-Din al-Thufi (W. 716) menjelaskan bahwa *maslahat* diartikan sebagai sesuatu yang menjadi sebab mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan menurut *syara'* *maslahat* adalah sesuatu yang menjadi sebab mendatangkan kepada tujuan pembuat hukum (*al-Syari'*) baik secara ibadah maupun adat kebiasaan<sup>113</sup>

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti mendefinisikan *maslahat* secara lebih spesifik. Menurutnya, *maslahat* adalah manfaat yang dikehendaki oleh Pembuat Hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya, berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta mereka, berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara

<sup>111</sup> *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van hove, 2003), hal. 1038

<sup>112</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hal 176

<sup>113</sup> Najm al-Din al-Thufi, *Syarh al-Mukhtashar al-Raudlah*, 1989, jilid III, Beirut, Muassasah al-Risalah, hal 239

manfaat-manfaat tersebut.<sup>114</sup> Dilain pihak, Al-Khawarismi sebagaimana dikutip oleh Wahbah al Zuhaily menyatakan bahwa al-Mashlahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.<sup>115</sup>

Pengertian-pengertian sebagaimana telah disebutkan diatas merupakan batasan yang diberikan oleh para pakar hukum Islam klasik, Sedangkan pakar-pakar hukum Islam belakangan (kontemporer), sepertiya mencukupkan definisi-definisi tersebut di atas. Artinya mereka menganggap cukup untuk merujuk pada pendapat Al-Ghazali, Al-Khawaritsmi, Al-Thufi, al-Buti dan lain-lainnya. Beberapa definisi tentang maslahat dengan rumusan yang berbeda di atas dapat dipahami adanya persamaan persepsi antara pakar hukum Islam yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa teori maslahat dalam pengertian syari'at adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal sehat, karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan syari'at dalam menetapkan hukum

---

<sup>114</sup> Muhammad Said Ramadan al-Buthi,.. *Dlawabit Al-Mashlahah Fi Syariat Al- Islamiyah*. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1986). hal 23

<sup>115</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hal. 757.

**BAB IV**  
**SISTEM BRETTON WOOD DALAM TINJAUAN**  
**MAQASID SYARIAH**

**A. Faktor Lahirnya Sistem Bretton Woods**

Berdasarkan pengalaman Perang Dunia I, sesudah perang adalah masa yang sangat berat bagi perekonomian dunia. Kebangkitan perekonomian negara-negara yang terlibat perang, seperti peningkatan produksi bahan makanan dan industri, akan membuat produksi global meningkat cepat, jauh melebihi kebutuhan. Sebagai upaya untuk mengatasi semua persoalan itu, maka belajar dari pengalaman demikian, disepakatilah Sistem Bretton Woods yang dianggap sebagai sistem moneter yang handal untuk mengatasi dampak berakhirnya Perang Dunia II.

Ketiadaan sistem yang mengatur perekonomian global pada saat berakhir Perang Dunia I, telah menggencarkan berbagai proteksi dan devaluasi yang bergantian terus-menerus (*competitive devaluation*) di masing-masing Negara. Kebijakan suatu negara pada akhirnya hanyalah ingin melindungi negaranya sendiri dan tidak memedulikan dampaknya bagi perekonomian negara lain. Istilah yang tepat untuk menggambarkan keadaan itu adalah *Beggars they neighbor policy*. Untuk lebih jelas, dibawah ini akan dijabarkan secara mendalam faktor-faktor yang muncul dari dampak Perang Dunia II, dan pengaruhnya terhadap stabilitas perekonomian global

yang disertai dengan analisis berdasarkan teori ekonomi moneter dalam tatanan perekonomian global.

#### a. Tingginya Fluktuasi Nilai Tukar

Perang Dunia II<sup>116</sup> pada tahun 1939 berdampak bukan saja pada tataran sosio-politik, tetapi juga mengakibatkan guncangan yang hebat pada tataran sosio-ekonomi, terutama terhadap stabilitas perekonomian dunia. Keadaan ini juga merambat pada kekacauan sistem moneter keuangan internasional. Sistem nilai tukar adalah salah satu aspek yang terkena dampaknya. Tak ayal, fluktuasi nilai tukar pun terjadi, keadaan ini memicu gelombang fluktuasi yang besar dan semakin tak terkendali, sehingga pada gilirannya mengganggu aktivitas perekonomian dan transaksi perdagangan antarnegara.

Nilai tukar memainkan peran vital dalam aktivitas perekonomian suatu negara. Hal ini akan sangat terlihat dalam perekonomian terbuka, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sarwano dan Warjiyo, bahwa gerakan nilai tukar dapat merubah harga relatif sehingga mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor,

---

<sup>116</sup> Perang Dunia II, atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat PDII) adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan: Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personil. Dalam keadaan "perang total," pihak yang terlibat mengerahkan seluruh bidang ekonomi, industri, dan kemampuan ilmiah untuk melayani usaha perang, menghapus perbedaan antara sipil dan sumber-sumber militer. Dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Dunia\\_II](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II), diakses tanggal 21 Maret 2011

permintaan *aggregate*, laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.<sup>117</sup> Sehingga dengan demikian, sekali nilai tukar terganggu oleh faktor tertentu, maka akan berimbas pada aspek perekonomian suatu Negara.

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar, menurut Jeff Madura, antara lain : perbedaan tingkat inflasi (tingkat harga umum) antara kedua Negara.<sup>118</sup> Kenaikan tingkat inflasi secara mendadak dan besar di suatu Negara akan menyebabkan meningkatnya nilai impor oleh negara tersebut terhadap berbagai barang dan jasa dari luar Negeri, sehingga semakin diperlukan banyak valuta asing untuk membayar transaksi impor tersebut. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap valuta asing di pasar valuta asing. Inflasi yang meningkat secara mendadak tersebut, juga memungkinkan tereduksinya kemampuan ekspor nasional Negara yang bersangkutan, sehingga akan mengurangi *supply* terhadap valuta asing dalam Negerinya.<sup>119</sup>

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

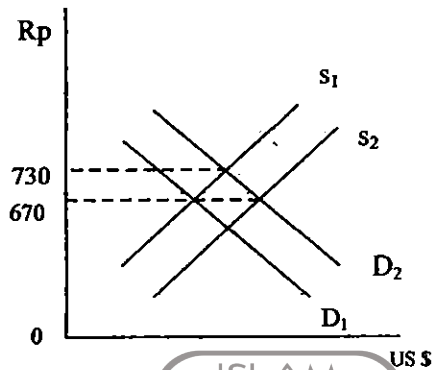
---

<sup>117</sup> Sarwono, Hartadi A., dan Perry Warjiyo, .Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk Penerapannya di Indonesia., *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Juli 1998*.hlm. 10

<sup>118</sup> Sebaliknya, nilai tukar juga merupakan salah satu jalur yang dapat menjelaskan perubahan tingkat harga pada suatu periode selain pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan agregat, yang selanjutnya berdampak pada output dan harga. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Mundell, bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap output dan inflasi. Untuk lebih mendalam baca lebih lanjut Mundell, RA. 1963. *Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rate, Canadian Journal of Economics and Political Science*, Vol. 29

<sup>119</sup> Jeff Madura. *Manajemen Keuangan Internasional*, Edisi Keempat (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm 100-103

**Gambar 4.1 : Kurva Pengaruh Kenaikan Inflasi terhadap Impor**



Pada gambar di atas menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan atau inflasi di dalam negeri mengakibatkan kenaikan impor. Kenaikan impor mengakibatkan permintaan valuta asing naik (ditunjukkan dengan pergeseran kurva permintaan ke atas : dari  $D_1$  ke  $D_2$ ). Kalau penawarannya tetap, kurs akan naik menjadi US \$ 1 = Rp. 730,00. Untuk menurunkan kembali pada tingkat semula, pemerintah menjual Dollar di pasar. Penjualan ini akan terus dilakukan sampai kurva penawaran bergeser ke kanan dari  $S_1$  ke  $S_2$ .

Berkaitan dengan hal di atas, Perang Dunia II yang berkecamuk di tiga benua tua; yaitu Afrika, Asia dan Eropa itu, menuntut semua pihak yang terlibat mengerahkan seluruh bidang ekonomi, industri, dan kemampuan ilmiah untuk melayani usaha perang. Keadaan ini mendorong terciptanya *hyper* inflasi dalam suatu Negara, terutama bagi Negara-negara yang diterlibat dalam perang.

Berdasarkan fakta di atas, dijelaskan bahwa persoalan inflasi bukan saja diakibatkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga terikat dengan lilitan sosio-politik, terutama persoalan politik internasional yang sedang mengalami

guncangan hebat antar berbagai negara. Namun demikian, dalam konteks ini penulis mencoba mengidentifikasi sebab-sebab inflasi secara objektif sebagai dampak dari perang yang melanda berbagai negara di antara tiga Benua.. Secara teoritis, didasarkan kepada sumber penyebabnya, Soediyono mengklasifikasi inflasi menjadi tiga bagian antar lain : inflasi permintaan; inflasi penawaran; dan inflasi campuran.<sup>120</sup>

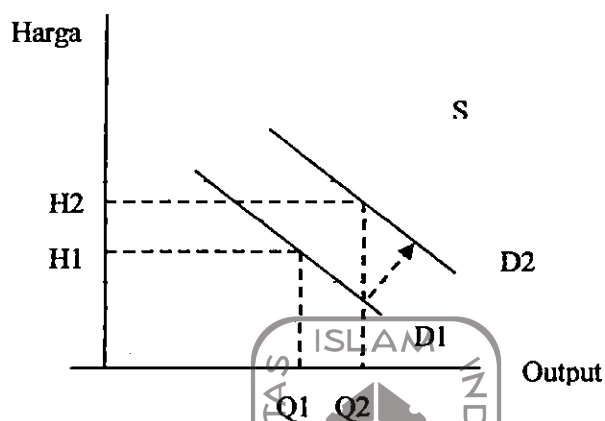
Dalam konteks ini, suasana perang membuat keadaan menjadi serba terkendala. Permintaan masyarakat secara agregat terhadap barang-barang di dalam negara yang bersangkutan mengalami kenaikan yang drastis sebagai dampak dari tekanan batin dan mental akibat perang. Di samping itu, bertambahnya pengeluaran pemerintah untuk operasi perang, sehingga pemerintah mencetak uang terlalu banyak, dan pada gilirannya mengakibatkan banyaknya uang beredar di masyarakat.<sup>121</sup> Paling tidak, menurut penulis dua hal fundamental itulah yang mengakibatkan inflasi yang tak terkendali dalam negara, bahkan menciptakan *hyper* inflasi.

---

<sup>120</sup> Inflasi permintaan timbul sebagai akibat daripada kenaikan permintaan agregatif, inflasi penawaran timbul sebagai akibat meningkatnya penawaran agregatif, dan inflasi campuran, unsur penyebabnya berupa campuran antara *demand pull* dan *cost-push*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai tarikan permintaan dan dorongan biaya. Untuk lebih mendalam baca Soediyono, *Ekonomi Makro : Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*, (Yogyakarta : Liberty, 1995), hlm. 188-199

<sup>121</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta : PT Bina Aksaram 1987), hlm. 52

**Gambar 4. 2 : Kurva Demand Inflation**



Gambar di atas menggambarkan suatu *demand inflation*. Karena permintaan masyarakat akan barang-barang bertambah, dan bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan terlalu banyak pencetakan uang, maka kurva agregat demand bergeser dari  $D_1$  ke  $D_2$ . Akibatnya, tingkat harga umum naik dari  $H_1$  ke  $H_2$ .

Berkaitan dengan hal diatas, tingginya fluktuasi nilai tukar suatu Negara sebagai akibat dari melonjaknya inflasi membuahakan kenaikan nilai impor dan mereduksi kemampuan ekspor nasional Negara yang bersangkutan. Melihat realitas ini, mau tidak mau kebijakan yang diambil oleh Negara adalah kebijakan devaluasi nilai tukar sebagai dimaksudkan untuk mendorong ekspor dan membatasi impor.<sup>122</sup>

<sup>122</sup> Jusuf, Kasrori. *Ekonomi Internasional*. Buku ajar. (Surabaya: Unipress IKIP Surabaya, 1991)

## b. Ketidakpastian Hubungan Perdagangan Antarneegara

Sebagai konsekuensi dari perkembangan ekonomi internasional yang semakin pesat, hubungan ekonomi antar Negara akan saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang, uang, serta modal antar Negara.<sup>123</sup> Terjadinya perubahan indikator makro di suatu Negara, maka secara tidak langsung akan berdampak pada Negara lain. Indikator makro yang semakin terguncang di berbagai Negara lantaran Perang Dunia II membuahkan dilema yang mendalam bagi aktivitas perdagangan global.

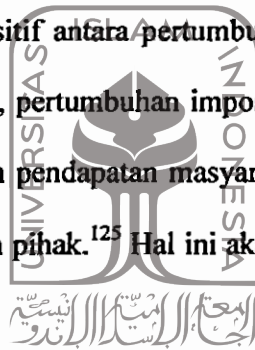
Akibat perang, terjadilah realokasi berbagai sumber daya yang terjadi di negara peserta perang maupun negara-negara di luarnya. Apalagi perang dengan skala masif seperti perang Dunia I, Jermania, Inggris, dan Perancis, merupakan negara-negara besar yang terlibat langsung dalam perang tersebut, selain negara-negara Eropa lainnya, sehingga bisa dipahami jika terjadi perubahan besar dalam struktur perekonomian negara-negara tersebut. Di samping itu, berlangsungnya blokade ekonomi dan penggunaan kapal selam untuk mengacaukan lintas angkatan laut amat menghambat (*trade barriers*) lalu lintas perdagangan global.

---

<sup>123</sup> Motif untuk melakukan perdagangan internasional adalah karena adanya manfaat dari perdagangan (*gain from trade*) yang diperoleh kedua Negara. Menurut para ekonom, penyebab utama dari perdagangan interantional terletak pada sisi produksi, yaitu karena suatu Negara bisa menghasilkan barang tertentu secara lebih efisien dari pada Negara lain. Untuk lebih mendalam baca Imamul Arifin dan Giana Hadi Wigiana. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. (Jakarta : PT Setia Purna, 2009), hlm 68

Sehingga pada gilirannya, ekspor dan impor mengalami penurunan drastis, karena berbagai sumber daya yang seharusnya diekspor dipergunaka untuk perang.<sup>124</sup>

Padahal secara teoritis, perdagangan internasional seringkali dikatakan sebagai mesin pertumbuhan "*engine of growth*" yang telah memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meluasnya pasar-pasar ekspor secara cepat merupakan perangsang bagi tumbuhnya industri manufaktur berskala besar. Keadaan ini dikarenakan ada korelasi positif antara pertumbuhan ekspor, di satu pihak, dan peningkatan cadangan devisa, pertumbuhan impor, pertumbuhan output di dalam negeri, peningkatan kerja dan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), di lain pihak.<sup>125</sup> Hal ini akan ditunjukkan dengan kurva di bawah ini :



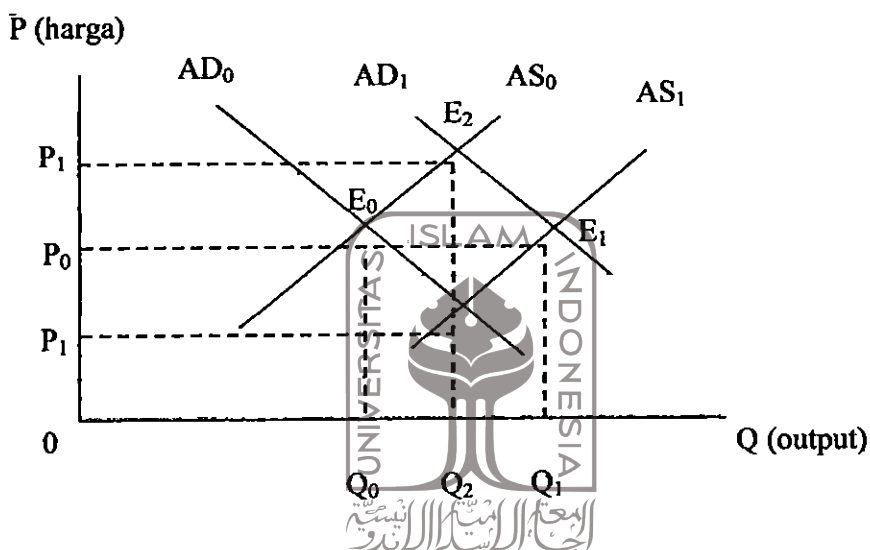
UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>124</sup> Cyrillus Harinowo, *IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 76

<sup>125</sup> Tulus Tambunan. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran : Teori dan Temuan Empiris*. (Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2001), hlm 2

**Gambar 4.3 : Analisis Pengaruh Positif Ekspor terhadap Pertumbuhan Output Dalam Negeri**



Relasi positif antara ekspor dan produksi dalam negeri dapat dijelaskan dengan pendekatan analisis kurva permintaan agregat (AD) dan kurva penawaran agregat (AS). Jika tidak ada sektor luar negeri (perdagangan internasional) maka barang dan jasa yang ditawarkan di pasar domestik sepenuhnya adalah produksi dalam negeri. Dalam kondisi ekonomi ekuilibrium, permintaan agregat sama dengan penawaran agregat (kurva AD berpotongan dengan kurva AS pada titik ekuilibrium  $E_0$ ). Pada titik ini, harga dan output ekuilibrium adalah, masing-masing,  $P_0$  dan  $Q_0$ . Bila pada tingkat harga tersebut, volume produksi dalam negeri dinaikkan, yang dicerminkan oleh pergeseran kurva suplai dari  $AS_0$  ke  $AS_1$  (output bertambah dari  $Q_0$  ke  $Q_1$ ), sementara permintaan dalam negeri tidak berubah (kurva AD tidak bergeser), maka terjadi *over-supply* di pasar domestik.

Sesuai hukum ekonomi, kelebihan output ( $Q_0 - Q_1$ ) mendorong tingkat harga turun, misalnya dari  $P_0$  ke  $P_1$ .<sup>126</sup> tetapi, bila ada permintaan luar negeri, maka kelebihan produksi di pasar dalam negeri dapat diserap sepenuhnya oleh pasar eksternal (ekspor). Karena ekspor merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat, maka dengan meningkatnya ekspor, kurva AD bergeser ke  $AD_1$ , dan titik ekuilibrium yang baru adalah  $E_1$ . Pada titik ini, harga tetap  $P_0$  (tidak berubah) dan output baru  $Q_1$ . Bila ekspor meningkat (kurva AD bergeser ke kanan), namun produksi dalam negeri tidak berubah (kurva AS tidak bergeser), maka harga dan jumlah output di pasar dalam negeri akan naik, masing-masing, sebesar  $P_0 - P_2$  dan  $Q_0 - Q_2$ .

Ekuilibrium yang terjadi diatas tentu saja didukung dengan struktur politik yang stabil dan kelembagaan sosial yang fleksibel.<sup>127</sup> Sebaliknya, sebagaimana dikutip oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, para meneliti mendapati bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata lebih dipengaruhi oleh stabilitas dari suatu renzim politik ketimbang jenis renzim itu sendiri.<sup>128</sup> Dengan kata lain, iklim politik yang dibangun oleh pemegang otoritas sangat menentukan stabilitas perekonomian. Perdagangan internasional sebagai salah satu aktivitas

---

<sup>126</sup> Efeknya sama bila ada impor. Dalam hal ini, kurva AS tidak hanya mewakili produksi dalam negeri : suplai agregat = produksi dalam negeri + produksi luar negeri (impor). Bila impor naik, berarti jumlah output yang ditawarkan di pasar domestik bertambah, maka kurva AS bergeser ke kanan ( $AS_0$  ke  $AS_1$ ). Bila permintaan pasar tetap, maka akibat pergeseran kurva AS tersebut, harga dan output, masing-masing, akan turun dari  $P_0$  ke  $P_1$  dan naik dari  $Q_0$  ke  $Q_1$ .

<sup>127</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm. 94

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm 97

perekonomian, jelas mengalami kemerosotan yang tajam lantaran guncangan instabilitas perekonomian yang disebabkan oleh Perang Dunia II, sehingga pada gilirannya menghantam iklim perpolitikan dalam Negara, khususnya Negara yang terlibat perang. Dengan demikian, menciptakan kendala dan hambatan maupun ketidakpastian dalam sirkulasi perdagangan global antar Negara.

Secara umum, ada beberapa hambatan yang dapat mengganggu perdagangan internasional, baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun hambatan tersebut antara lain, tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing.<sup>129</sup>

Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya beralih ke negara lain yang lebih aman. Semakin aman keadaan, semakin mendorong para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Begitu juga dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara adalah sangat erat hubungannya dengan hambatan maupun kelancaran perdagangan internasional. Misalnya, pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor/ekspor yang tinggi, perijinan yang berbelit-belit. Selain itu, Kurs mata uang asing yang tidak stabil juga membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran

---

<sup>129</sup> Perdagangan Internasional, dikutip dari <http://www.google.co.id/search?q=Faktor-Faktor+Penghambat+Perdagangan+Internasional&hl=id&tbo=1&tbn=bks&ei=d9CSTbO7HYHZcabksIkH&start=20&sa=N>, diakses tanggal 30 Maret 2011

maupun permintaan dalam perdagangan. Hal ini membuat para pedagang internasional enggan melakukan kegiatan ekspor dan impor.<sup>130</sup>

Tingginya fluktuasi nilai tukar dalam Negara yang diakibatkan perang dan kekacauan iklim politik berdampak pada ketidakpastian dalam pembayaran perdagangan internasional karena nilai transaksi dapat berubah sejalan dengan dengan fluktuasi nilai tukar tersebut.

Berkenaan dengan hal di atas, di dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Handoyo Prasetyo, dengan panjang lebar Levi mengupas resiko perdagangan internasional, menurutnya resiko perdagangan internasional adalah :

Resiko tambahan yang paling nyata dari perdagangan internasional dibanding dengan perdagangan domestik ditimbulkan oleh adanya ketidakpastian kurs (nilai tukar). Perubahan kurs yang tidak terduga memiliki dampak penting pada penjualan, harga, dan laba eksportir dan importir.”<sup>131</sup>

Lebih lanjut, Jeff Madura menambahkan bahwa resiko dari fluktuasi nilai tukar akan mengakibatkan jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti.<sup>132</sup>

Dengan demikian, Negara yang melakukan perdagangan internasional melalui transaksi impor dan ekspor akan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Terutama terhadap valuta asing yang digunakan sebagai alat pembayaran. Tingginya fluktuasi nilai tukar yang terjadi di suatu Negara akan menyebabkan

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Levi. D. Maurice, diterjemah oleh Handoyo Prasetyo. *Keuangan Internasional*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : ANDI, 2001) , hlm 6

<sup>132</sup> Jeff Madura. *Manajemen Keuangan Internasional*, hlm 23

meningkatnya nilai impor oleh negara tersebut terhadap berbagai barang dan jasa dari luar Negeri, sehingga semakin diperlukan banyak valuta asing untuk membayar transaksi impor tersebut. Sehingga pada gilirannya berdampak pada melemahnya uang domestik atau terdepresiasi terhadap mata uang asing.

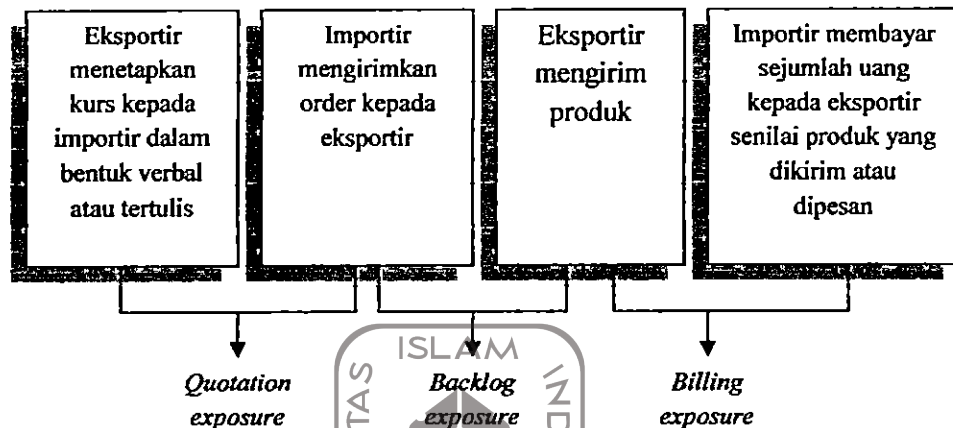
Berkaitan dengan hal di atas, Eiteman mencoba mengulas risiko-risiko yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar dan dampaknya terhadap arus perdagangan global secara lebih rinci kaitannya dengan operasional perusahaan dalam suatu negara yang terlibat dalam aktivitas transaksi ekspor dan impor, antara lain : <sup>133</sup>

- a. *Transaction exposure* mengukur perubahan nilai dari kewajiban keuangan perusahaan yang telah dilakukan sebelum terjadinya perubahan nilai tukar, dimana kewajiban tersebut baru akan jatuh tempo setelah terjadinya perubahan dari nilai tukar tersebut. Dengan begitu *transaction exposure* berhadapan dengan perubahan aliran kas yang diakibatkan oleh kewajiban kontrak yang ada.

---

<sup>133</sup> Eiteman, David K., Stonchill, Arthur I., Moffett, Michael H., *Multinational Business Finance*, ninth edition, Addison (USA : Wesley Publishing Company, Inc, 2001), hlm 198

**Gambar 4.4 : Transaction Exposure Menurut Eiteman dkk :**



- 1) *Quotation exposure* terjadi pada saat eksportir menawarkan barang dalam bentuk tertulis sampai dengan importir mengirimkan P/O (*purchase order*).
- 2) *Backlog exposure* terjadi pada saat importir mengirimkan P/O sampai dengan dikirim oleh eksportir ke importir
- 3) *Billing exposure* terjadi pada saat barang dikirim oleh eksportir ke importir sampai dengan importir membayar sejumlah nilai barang yang dikirimkan.

b. *Economic exposure* memperhitungkan perubahan nilai sekarang. Suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan jumlah arus kas dari kegiatan operasi di masa depan, yang merupakan akibat dari perubahan nilai tukar yang tidak diharapkan. Perubahan dalam nilai tergantung pada akibat perubahan nilai tukar di atas volume penjualan, harga, dan biaya masa depan.

c. *Transtation Exposure* ini timbul ketika suatu perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan di luar negeri akan menerbitkan laporan keuangan konsolidasi. Pada saat itu perusahaan induk tersebut itu harus mengkonversikan posisi keuangan anak perusahaannya dalam mata uang dimana perusahaan induk berada.

Dari hal penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Ekspor memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kegiatan ekspor akan menghasilkan devisa, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai impor dan pembangunan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri. Hal ini berimplikasi secara teoritis bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekspor, di satu pihak, dengan peningkatan cadangan devisa, pertumbuhan impor, pertumbuhan output di dalam negeri, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), di pihak lain.

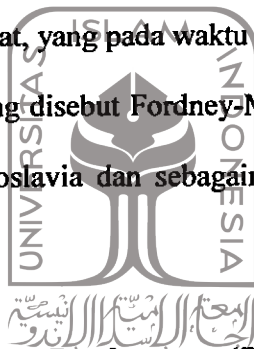
Di samping itu, dalam skala global, situasi perang mengakibatkan pergeseran produksi, terutama pada sektor pertanian dan industri. Produksi pertanian dalam negara yang terlibat perang jelas mengalami penurunan drastis sehingga mendorong terjadinya impor dari negara lain. Amerika Serikat, yang negaranya bebas dari perang tersebut, memiliki kesempatan emas untuk memperbesar produk pertanian maupun industrinya. Demikian juga dengan Jepang, Kanada, India serta negara-negara Amerika Latin lainnya.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Cyrillus Harinowo, *IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*, hlm 77

Setelah perang berakhir, produksi dan industri pada negara yang terlibat perang kembali meningkat. Sehingga keadaan ini menyebabkan kelebihan produksi dalam skala global.<sup>135</sup> Dan dampak ini jelas akan merambat pada meningkatnya harga produksi baik di sektor pertanian maupun industri.

Perkembangan tersebut menyebabkan munculnya kebijakan proteksionis di berbagai negara. Inggris menerapkan apa yang disebut McJeena Tariff . Sementara itu Amerika Serikat, yang pada waktu itu sudah muncul sebagai negara raksasa, menerapkan apa yang disebut Fordney-McCumber Tariff Act. Demikian juga Jerman, Perancis, Yugoslavia dan sebagainya berlomba-lomba menaikkan bea masuk mereka.<sup>136</sup>



### c. Ketidakseimbangan Neraca Pembayaran (*Balance of payment*) Negara

Inflasi berkepanjangan yang disebabkan oleh perang tentu saja akan berdampak pada naiknya harga-harga barang ekspor suatu negara, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kompetisi di pasaran internasional. Kalau

<sup>135</sup> Karena sebelumnya berbagai negara diluarnya sudah berhasil meningkatkan produksi untuk mensupply negara-negara peserta perang. Hal ini mengakibatkan ambuknya harga-harga produk dan industri.

<sup>136</sup> Kindleberger, C.P. "Commercial Policy Between the Wars", dalam Cyrilus Harinowo, *IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*, hlm 77

ekspor turun disebabkan hal ini, ceteris paribus, maka posisi neraca pembayaran<sup>137</sup> luar negeri menjadi terganggu yaitu condong mengarah ke posisi defisit.<sup>138</sup>

Hal di atas sangat wajar dan sangat mudah dipahami, karena tujuan perdagangan luar negeri adalah, pertama, untuk melindungi ekonomi suatu negara dari pengaruh buruk/ negatif dari luar negeri, seperti dampak inflasi di luar negeri terhadap inflasi di dalam negeri yang terjadi melalui impor, atau efek resesi ekonomi dunia terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri melalui pengaruh negatifnya terhadap pertumbuhan negara tertentu. Kedua, untuk melindungi industri suatu negara dari persaingan barang-barang impor, biasanya disebut *infant industry argument*. Ketiga, melindungi atau meningkatkan lapangan kerja (*employment creation*) Keempat, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kelima, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran (*balance of payment*), yang sekaligus menjamin persediaan cadangan valuta asing (valas) yang cukup, terutama untuk kebutuhan pembayaran impor.<sup>139</sup>

Berdasarkan hal di atas, ketika aktivitas perdagangan luar negeri mengalami kemacetan dan kemandekan yang disebabkan kekacauan sosio-politik internasional, dalam hal ini perang Dunia II, maka ketika itu pula terjadi

---

<sup>137</sup> Neraca Pembayaran (BOP) adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam negeri suatu negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu, lazimnya satu tahun.

<sup>138</sup> Sritua Arief. *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 247

<sup>139</sup> Tulus Tambunan. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran : Teori dan Temuan Empiris*. hlm. 156-157

ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran (BOP) dalam suatu negara. Selanjutnya, perubahan BOP mempengaruhi langsung jumlah devisa valuta asing (valas).<sup>140</sup>

Negara-negara yang terlibat perang, dimana iklim berwirausaha dan bisnis di dalam negeri tidak kondusif, sehingga banyak para investor asing enggan berinvestasi. Akibatnya banyak negara-negara tersebut mengalami defisit neraca pembayaran (*balance of payment*) atau kekurangan devisa yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan ekonomi dalam negeri.

Besarnya cadangan devisa sangat tergantung pada perkembangan neraca pembayaran (BOP). Eksistensi cadangan devisa merupakan faktor kritis bagi kelangsungan proses ekonomi suatu negara. Selain itu, banyak perusahaan khususnya eksportir atau yang banyak melakukan impor terpaksa mengurangi atau menghentikan sama sekali kegiatan mereka akibat keterbatasan valas, sebab pendanaan untuk *export financing* atau *letter of credit* (L/C) untuk pembiayaan impor berasal dari cadangan devisa.<sup>141</sup>

Masalah serius lainnya yang muncul akibat keterbatasan devisa adalah yang berkaitan dengan ketergantungan impor dan *net transfer* yang tinggi.<sup>142</sup> Hal ini membuat ekonomi suatu negara mengalami dua situasi yang sangat

---

<sup>140</sup> Cadangan devisa didefinisikan sebagai sejumlah valas yang dicadangkan bank sentral dalam suatu negara. Di Indonesia, misalnya ada Bank Indonesia (BI), untuk keperluan pembiayaan dan kewajiban luar negeri negara bersangkutan, antara lain meliputi pembiayaan impor dan pembayaran lainnya kepada pihak asing.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 203

<sup>142</sup> *Ibid*

membahayakan *balance of payment* (BOP), yakni defisit transaksi berjalan dan neraca modal. Akibatnya cadangan devisa menjadi semu, artinya banyak mengandung dan bahkan mau tidak mau cenderung didominasi komponen utang luar negeri.<sup>143</sup>

Dengan demikian, kebijaksanaan perdagangan dan keuangan luar negeri merupakan upaya untuk mengamankan dan mendukung pelaksanaan penghematan dan peningkatan efisiensi penggunaan devisa, pemanfaatan modal dan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif, pemeliharaan nilai tukar rill yang stabil guna menjaga daya saing ekspor serta penciptaan iklim yang semakin menarik bagi investasi. Sehingga dengan keadaan ini, ketidakseimbangan neraca pembayaran dalam suatu Negara berangsur pulih dan stabil. Sistem Bretton Woods adalah konsesi yang disepakati para pemimpin dunia dalam menyingkapi masalah ini.

#### **d. Perang Devaluasi**

Seiring dengan kondisi perekonomian dunia yang memburuk, dan banyak negara yang mengalami ketidakseimbangan neraca pembayaran, maka kemungkinan untuk terjadi perang devaluasi antaranegara pun agaknya sulit untuk dihindarkan.

Dalam rangka memulihkan neraca pembayaran dari ketidakseimbangan yang disebabkan oleh kekacauan arus perdagangan (ekspor dan impor) suatu

---

<sup>143</sup> *ibid*

negara yang diakibatkan oleh perang Dunia II, maka banyak Negara bersangkutan untuk melakukan devaluasi terhadap mata uang domestiknya. Dari sini, nampak banyak Negara dipengaruhi paham Keynesian yang tidak terlalu percaya dengan mekanisme pasar/ harga. Keynes berpendapat bahwa neraca pembayaran tidak secara otomatis akan mencapai titik keseimbangan tanpa ada intervensi dari Pemerintah.

Ada beberapa teori yang landasannya didasarkan pada pemikiran Keynes di antaranya : pendekatan elastisitas, absorpsi, serta kebijakan bauran moneter dan fiskal (*policy mix*). Pendekatan elastisitas menekankan efek dari devaluasi terhadap neraca perdagangan. Devaluasi akan memperbaiki neraca perdagangan apabila jumlah elastisitas permintaan akan ekspor dan impor lebih besar dari satu (*Marshall lerner condition*).<sup>144</sup>

Secara teoritis dapat dilihat, misalnya kenaikan jumlah impor sebesar 15%, sehingga posisi neraca pembayaran menjadi defisit ( $\text{impor} > \text{ekspor}$ ). Untuk memperbaiki keadaan ini maka dilakukan kebijakan devaluasi dengan cara menurunkan nilai Rupiah terhadap mata uang dollar sebesar 10%, sehingga menyebabkan harga barang-barang impor di dalam negeri naik sebesar 10%. Kebijakan ini akan efektif (cepat memperbaiki posisi neraca perdagangan), jika impornya bersifat elastis terhadap perubahan harganya.<sup>145</sup>

<sup>144</sup> Nopirin, "Pertumbuhan Ekonomi dan Neraca Pembayaran Indonesia 1980-1996 : Suatu pendekatan Keynes dan Monetarist", dalam Jurnal KELOLA No. 18/ VIII/ 1998

<sup>145</sup> Endang Rostiana, *Penyesuaian neraca Pembayaran Secara Otomatis*, dikutip dari [www.feunpas.org/dir\\_dok/EMI6.pdf](http://www.feunpas.org/dir_dok/EMI6.pdf) di akses tanggal 8 April 2011

Dilihat dari sisi mata uang dollar A.S. maka nilai \$ menjadi naik atau tenaga beli dollar A.S. naik setelah devaluasi rupiah. Perlu dicatat di sini bahwa tindakan devaluasi merupakan kebijaksanaan suatu negara dalam bidang moneter, artinya kebijaksanaan tersebut membawa pengaruh terhadap luar negeri sebagai partner dagangnya.<sup>146</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: semakin elastis ekspor dan impor, akan menyebabkan semakin elastis kurva *demand* dan *supply* valas, sehingga perbaikan neraca pembayaran semakin efektif. Semakin inelastis ekspor dan impor, akan menyebabkan semakin inelastis kurva *demand* dan *supply* valas, sehingga perbaikan neraca pembayaran semakin kurang efektif.<sup>147</sup> Penjelasan tersebut dapat digambarkan dengan gambar berikut ini :

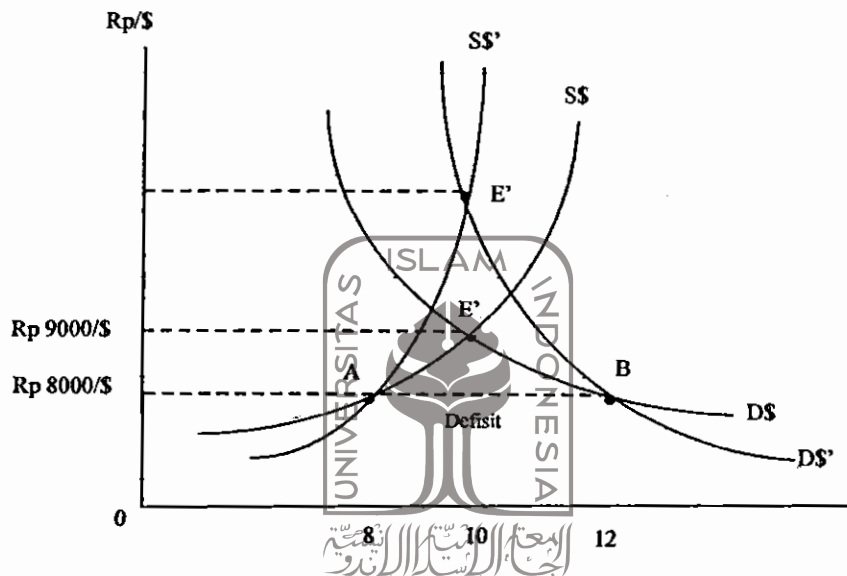
UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>146</sup> Jusuf Kasrori, Analisis Tentang Pengaruh Perubahan Kurs Pada Bisnis Internasional, Dalam Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 4 Nomor 3, Desember 2006

<sup>147</sup> Endang Rostiana, *Penyesuaian neraca Pembayaran Secara Otomatis*.

**Gambar 4.5 : Penyesuaian Neraca Pembayaran  
dengan Perubahan Nilai Tukar**



Pada gambar di atas, terlihat ada dua kondisi permintaan dan penawaran valas. Permintaan dan penawaran valas yang bersifat lebih elastis diperlihatkan oleh kurva permintaan valas  $D\$$  dan kurva penawaran valas  $S\$$ . Sedangkan kondisi lainnya adalah permintaan dan penawaran valas yang bersifat kurang elastis, yang diperlihatkan oleh kurva permintaan valas  $D\$\prime$  dan kurva penawaran valas  $S\$\prime$ .

Jika diasumsikan keseimbangan pasar valas berada pada titik E, dengan nilai tukar keseimbangan pada tingkat Rp9000/\$. Misalnya jika terjadi penurunan nilai tukar menjadi Rp8000/\$, sehingga di pasar valas kelebihan permintaan valas dibandingkan penawarannya, sehingga neraca pembayaran menjadi defisit. Untuk memperbaiki defisit neraca pembayaran ini atau untuk mengembalikan nilai tukar

pada posisi keseimbangannya, pada kondisi permintaan dan penawaran valas yang lebih elastis (D\$ dan S\$) hanya dibutuhkan devaluasi Rp terhadap \$ sebesar Rp1000/\$ atau sebesar 12,5%.

Sedangkan pada kondisi permintaan dan penawaran yang kurang elastis (D\$' dan S\$'), untuk mengembalikan pada posisi keseimbangannya (D\$' = S\$') pada titik E', diperlukan devaluasi sebesar Rp sebesar Rp 4000/\$ atau sebesar 50%.

Dengan demikian, dengan menurunkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing (valas), maka harga valuta asing naik. Oleh karena itu impor menjadi mahal dan terhambat, sedang ekspor menjadi murah untuk pembeli luar negeri, sehingga diharapkan akan naik. Akan tetapi, pendekatan ini juga tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang neraca perdagangan pada waktu pasca perang Dunia II, yang ditandai dengan kesempatan kerja penuh. Dalam kondisi yang demikian ekspor tidak bisa/ sukar untuk dinaikkan dengan tindakan devaluasi.<sup>148</sup>

Faktanya, sebagaimana dikemukakan di atas, setelah perang Dunia, produksi berbagai barang menjadi begitu melimpah sehingga pada akhirnya berbagai negara saling bersaing untuk meningkatkan ekspornya serta menjaga agar jangan banyak

---

<sup>148</sup> Menyadari hal ini, S. Alexander memperkenalkan pendekatan baru, yakni pendekatan absorpsi. Menurut pendekatan ini efek devaluasi terhadap neraca perdagangan tergantung dari dampak devaluasi terhadap pendapatan dan absorpsi. Dia mendefinisikan pendapatan adalah penjumlahan dari absorpsi (yang terdiri dari konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah) dan ekspor dikurangi impor. Devaluasi akan memperbaiki neraca perdagangan apabila kenaikan output lebih besar daripada absorpsi.

barang yang masuk ke negara mereka. Langkah ini dilakukan melalui upaya proteksi maupun “perang” untuk melakukan devaluasi (*competitive devaluations*). Di bawah tekanan dari kerugian cadangan besar, pada akhir September 1949, tiga puluh negara diikuti Inggris dan mendevaluasi mata uang mereka. Devaluasi franc utama terjadi pada tahun 1957 dan 1969. Pound terdevaluasi pada tahun 1967, dan tanda deutsche itu direvaluasi pada tahun 1961 dan 1969.

### B. Sistem Bretton Wood dalam Tataan Perekonomian Global

Sistem ekonomi Internasional terbagi dalam beberapa kelompok yang mengatur arus perdagangan internasional, investasi, dan aliran moneter. Dalam seperempat abad sejak berakhirnya Perang Dunia II, sejarah sistem ekonomi internasional dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok rezim, diantaranya : Sistem Bretton Woods, terhitung sejak Perang Dunia II hingga akhir tahun 1971, sistem interdependensi (*System of Interdependence*) dari tahun 1971 hingga 1989, dan sistem kontemporer globalisasi (*Contemporary system of globalization*) dari tahun 1989 hingga sekarang.<sup>149</sup>

Dari sini peneliti hendak menjelaskan terlebih dahulu bahwa secara historis memang atura-aturan, institusi-institusi, dan prosedur Sistem Bretton Woods ditopang dengan tiga organisasi dalam konteks implementasinya, yaitu *Internasional Monetary*

---

<sup>149</sup> Joan Edelman Spero, Jeffrey A. Hart. *The Politics of International Economin Relation* (Boston: Wadsworth CENGAGE Learning Publisher, 2010), hlm 1.

*Fund* (IMF), *Internasional Bank for Recontruction and Development*, yang biasa disebut dengan IBRD dan sering pula disebut *World Bank*, dan *Internasional Trade Organization* yang biasa disebut dengan ITO, telah berkembang menjadi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO).

Namun dalam perkembangan, tiga lembaga internasional sebagaimana tersebut di atas tidak melekat mutlak kepada sistem Bretton Woods saja, akan tetapi tetap *survive*, bahkan melampaui tiga sejarah renzim sistem moneter internasional hingga sekarang. Dengan kata lain, bahwa penelitian ini hanya berfokus pada fungsi dan tujuan *Internasional Monetary Fund* (IMF), *Internasional Bank for Recontruction and Development* (IBRD) dan *World Bank* ketika masih dibawah sistem Bretton Woods.

Menurut peneliti, klarifikasi ini penting adanya mengingat tiga lembaga keuangan internasional di atas sudah mengalami disorientasi dan sarat dengan kepentingan politik yang mengitarinya. Bahkan tak jarang, tiga lembaga internasioanl tersebut, terutama IMF menjadi momok yang menakutkan dan sasaran kritikan dari berbagai berkaitan dengan konsep implementasinya. J. Stiglitz misalnya, pemimpin ekonom Bank Dunia, mengkritik bahwa prakondisi IMF yang teramat ketat terhadap negara-negara Asia di tengah krisis yang berkepanjangan berpotensi menyebabkan resesi yang berkepanjangan. Penasehat khusus IMF untuk Indonesia (P.R. Narvekar)

sendiri juga dikutip sebagai mengatakan bahwa “IMF kerap menerapkan standar ganda dalam pengambilan keputusan.”<sup>150</sup>

Dari kacamata politik, sistem Bretton Woods jika ditinjau dari beberapa koinsidensi yang melatarbelaknginya, menurut Kindlebeiger, dasar politik sistem Bretton Wood ini ditemukan dalam koinsidensi tiga kondisi, yaitu konsentrasi kekuasaan dalam sejumlah kecil negara, adanya sekelompok kepentingan bersama dari negara-negara tersebut dan kehadiran kekuatan dominan yang rela menjalankan peran kepemimpinan.<sup>151</sup>

Konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi nampak terlihat terutama pada negara-negara berkembang di Amerika Utara dan Eropa Barat. Negara-negara tersebut menghadapi tekanan dari Negara-negara komunis (*Communist State*) baik dari Eropa Timur dan Asia (termasuk Uni Soviet), sehingga terisolasi dari tatanan ekonomi internasional. Kendatipun tergabung dalam jaringan negara berkembang (LDCs) yang mengintegrasikan sistem ekonomi dunia, tetap saja mereka tidak

<sup>150</sup> Banyak kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak ke alamat IMF dalam hal menangani krisis moneter di Asia, yang paling umum adalah bahwa: (1) program IMF terlalu seragam, padahal masalah yang dihadapi tiap negara tidak seluruhnya sama; dan (2) program IMF terlalu banyak mencampuri kedaulatan negara yang dibantu (Fischer, 1998b). Radelet dan Sachs secara gamblang mentakan bahwa bantuan IMF kepada tiga negara Asia (Thailand, Korea dan Indonesia) telah gagal. Setelah melihat program penyelamatan IMF di ketiga negara tersebut, timbul kesan yang kuat bahwa IMF sesungguhnya tidak menguasai permasalahan dari timbulnya krisis, sehingga tidak bisa keluar dengan program penyelamatan yang tepat. Salah satu pemecahan standar IMF adalah menuntut adanya surplus dalam anggaran belanja negara, padahal dalam hal Indonesia anggaran belanja negara sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 hampir selalu surplus, meskipun surplus ini ditutup oleh bantuan luar negeri resmi pemerintah. Untuk lebih mendalam, baca *Lepi T. Tarmidi, Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran Imf Dan Saran, Tulisan Ini Merupakan Revisi Dan Updating Dari Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Pada Feui Dengan Judul “Krisis Moneter Tahun 1997/1998 Dan Peran Imf”*, Jakarta, 10 Juni 1998.

<sup>151</sup> Charles. P. Kandleberger, *The World in Depression 1929-1939*, hlm 39.

memiliki hak suara lantaran lemahnya kekuatan politik dan ekonomi. Pada periode ini, beberapa negara berkembang di Afrika dan Asia sedang diduduki oleh negara-negara kolonial.<sup>152</sup>

Namun secara prinsip, konsentrasi adanya kesepakatan selama ini adalah memfasilitasi manajemen sistem dengan membatasi peran negara anggota (proteksi) dalam rangka menata rezim ekonomi internasional dan melaksanakan hasil kesepakatan yang termuat dalam sistem Bretton Wood.<sup>153</sup>

Dalam rangka meminimumkan hambatan-hambatan arus perdagangan internasional dan menata keseimbangan neraca pembayaran global, maka negara-negara berkembang mengusung sistem ekonomi internasional liberal, dan juga mendukung pasar bebas (*free market*) dengan skala wajar.<sup>154</sup> Berangkat dari pengalaman *The Great Depression* yang terjadi sebelumnya, dimana akibat dari proteksi yang berlebihan terhadap pertukaran dan perdagangan, sehingga berdampak pada buruknya perekonomian global. Meskipun negara-negara ini tidak sepakat pada

<sup>152</sup> Joan Edelman Spero, Jeffrey A. Hart. *The Politics of International Economic Relation*, hlm. 2

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Parah sejarawan Ekonomi sering mengutip kebijakan liberalisasi perdagangan sebagai penyebab utama ledakan perdagangan pasca-perang. Pada dekade setelah Perang Dunia Kedua, hambatan perdagangan yang dibangun selama pasca perang dirobohkan secara bertahap melalui serangkaian perjanjian politik. Tahun 1947 Perjanjian Umum tentang Perdagangan dan Tarif (GATT) adalah yang paling terkenal dari perjanjian ini. Pada konferensi Jenewa, 23 negara yang telah disepakati 123 perundingan yang meliputi 50.000 diperdagangkan items. Walaupun Efek dari pengurangan tarif perdagangan pasca-perang cenderung kontroversial. Krugman (1995) menuding bahwa akhir abad kesembilan belas justru Jerman dan Amerika Serikat, ekonomi terbesar dua periode, yang sangat proteksionis. Dengan demikian, pertumbuhan besar dalam perdagangan dunia sebelum 1914 terjadi di lingkungan tarif yang relatif tinggi.

spesifik implementasi dari sistem liberal ini, namun demikian semua setuju bahwa sistem yang terbuka akan sangat mungkin untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Pada saat yang sama, pemerintah mengakui bahwa pasar internasional dapat melabihkan perekonomian domestik.

Bahkan beberapa negara meyakini bahwa sistem ekonomi internasional liberal dapat membawa bukan hanya pada kemakmuran dan harmonisasi ekonomi tetapi juga kedamaian internasional. Sekretaris US antara tahun 1933-1944, sebagaimana dikutip oleh Spero, Cordell Hull mengatakan :

“...unhampered trade dovetailed with peace; high tariffs, trade barriers, and unfair economic competition, with war....if we could get freer flow of trade—freer in the sense of fewer discrimination and obstruction—so that one country would not be deadly jealous of another and the living standards of all countries might rise, thereby eliminating the economic dissatisfaction that breeds war, we might have a reasonable chance of lasting peace.

Namun Pasca perang Dunia II, pemerintah nasional juga mengasumsikan bahwa tanggungjawab kesejahteraan ekonomi rakyatnya, sangat tergantung pada pekerjaan, stabilitas, dan pertumbuhan, sehingga semua itu menjadi unsur yang penting dalam kebijakan publik. Negara Sejahtera (*Welfare State*) merupakan sebuah respon terhadap *The Great Depression* tempo silam, yang menuntut adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Ringkasnya, pengusungan sistem ekonomi internasional liberalisme bertujuan untuk menghapus hambatan-hambatan

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm 3

perdagangan intrnasional (*trade barriers*) yang selama pasca perang umumnya terjadi proteksi yang berlebihan dari berbagai negara. Namun pada saat yang sama, belajar dari kasus *The Great Depression*, intervensi pemerintah juga tidak boleh dipandang sebelah mata, terutama dalam bidang moneter keuangan suatu negara.

### C. Pengaruh Sistem Bretton Wood terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia

Tidak jauh sebelum sistem Bretton Woods diterapkan, resesi perekonomian global yang disebut *Great Depression* pada tahun 1929-1930-an telah mewarnai persoalan ekonomi global. Resesi ini berdampak pada tingginya persentase perlindungan perdagangan berupa bea masuk dan kuota serta munculnya hambatan lainnya. Amerika Serikat ditandai sebagai pihak yang menerapkan hambatan perdagangan secara masif melalui apa yang disebut *the Smoot-hawley Tariff Act* pada tahun 1930. Langkah ini diikuti oleh Kanada, Perancis, Italia, Spanyol, dan Swiss. Pada tahun 1932, Inggris juga menerapkan hambatan perdagangan yang sama, yang kemudia diikuti oleh Irlandia. Pada tahun 1937, di Perancis, hambatan impor mencapai 58 persen dari seluruh impor, Swiss sebesar 52 persen, Belanda sebesar 26 persen, dan Belgia sebesar 24 persen.<sup>156</sup>

Dalam rangka menanggapi persoalan di atas, sebenarnya sudah ada upaya yang diformulasikan, namun masih lamban untuk direalisasikan, sehingga pada

---

<sup>156</sup> Irwin, D.A, "Multilateral and Bilateral Trade Policies in the World Trading System : An Historical Perspective", in J. de Melo and A. Panagariya (eds), *new Dimensions in Regional Integration*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1993), dalam Cyrilus Harinowo, *IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*, hlm 77

akhirnya terbentur dengan meletusnya Perang Dunia II pada tahun 1939. Sehingga upaya yang baik tersebut dengan sendirinya terputus. Oleh karena itu, jika hal-hal yang sudah berhasil dirumuskan sebelum Perang Dunia II tersebut tidak diformulasikan dalam bentuk yang permanen, pada akhirnya dikhawatirkan akan muncul kejadian serupa sesudah Perang Dunia I, yaitu munculnya kembali *beggar the neighbour policies*.<sup>157</sup>

Kekhawatiran yang mendasar inilah yang menjadi fondasi para pakar dan pengambil kebijakan dari berbagai negara secara serius untuk memutuskan konsesi sistem keuangan internasional yang dianggap relevan untuk menjawab persoalan perekonomian global. Ternyata, benar saja, meletusnya Perang Dunia II telah memberi dampak pada fluktuasi nilai tukar yang terlalu besar. Keadaan yang fluktuatif ini menciptakan tingginya gelombang ketidakpastian hubungan perdagangan antarnegara sehingga pada gilirannya berimbas pada ketidakseimbangan neraca pembayaran suatu negara.

Sistem Bretton Woods melalui penerapan nilai tukar tetapnya, hanya memperbolehkan nilai tukar mata uang berfluktuasi dalam kisaran yang sempit. Apabila pada suatu saat nilai tukar mulai berfluktuasi terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaga agar fluktuasi tetap berada dalam kisaran yang diinginkan. Sistem ini dimaksudkan untuk meminimalkan ketidakpastian hubungan perdagangan antarnegara sebagai akibat timbulnya fluktuasi nilai tukar

---

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm 79

yang terlalu besar. Sedangkan mekanisme penyesuaian nilai tukar ditujukan untuk mengatasi gejolak temporer yang berakibat pada ketidakseimbangan neraca pembayaran suatu negara.

Secara lebih rinci, R. Hendra Halwani, dalam bukunya *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*,<sup>158</sup> menyebut tujuan disepakatinya Sistem Bretton Woods dan ide yang mendasarinya, dengan ketiga instansi yang ada dibawahnya, antara lain :

- a. Untuk meningkatkan jumlah cadangan negara yang memungkinkan negara tersebut mengatasi depresi tanpa melakukan kebijakan deflasi, devaluasi, dan pembatasan impor. Baik devaluasi dan pembatasan impor akan menimbulkan lingkaran setan yang akan membantu suatu negara yang bersifat sementara dan akan memperburuk keadaan dalam jangka panjang.
- b. Untuk memperbaiki posisi ketidakseimbangan neraca pembayaran, ide Keynes adalah untuk menciptakan mekanisme internasional dengan memberikan cara yang baik untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam posisi neraca pembayaran.
- c. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa upaya suatu negara dalam mengulangi ketidakseimbangan neraca pembayaran adalah melakukan devaluasi.

---

<sup>158</sup> Halwani, Hendra. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Edisi Pertama. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), hlm 261

d. Keynes melemparkan ide untuk mendirikan bank sentral yang dapat memberikan kredit dengan skala dunia, seperti yang dilakukan bank-bank sentral di tiap negara.<sup>159</sup>

Dengan demikian, sampai titik ini, konferensi Bretton Woods merupakan cerminan dari kepedulian para pengambil kebijakan di bidang ekonomi yang merasakan betapa perkembangan hubungan ekonomi antar negara selama periode di tengah terjadinya Perang Dunia menuju ke arah yang tidak dikehendaki.<sup>160</sup>

Sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, kemudian dibentuk tiga lembaga penting sebagai perwujudan nyata dari sistem Bretton Woods. Ketiga lembaga moneter internasional, yaitu *Internasional Monetary Fund (IMF)*, *Internasional Bank for Recontruction and Development*, yang biasa disebut dengan IBRD dan sering pula disebut *World Bank*, dan *Internasional Trade Organization* yang biasa disebut dengan ITO/ GATT (*General Agreement on Tarif and Trade*),<sup>161</sup> telah berkembang menjadi Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization-WTO*).

---

<sup>159</sup> Di sini Keynes berpendapat, negara tidak hanya diharapkan menjaga ketertiban umum berdasarkan perangkat hukum, menyediakan prasarana ekonomi dan sosial yang memadai melaksanakan program pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan sosial, tetapi juga secara aktif terlibat langsung dalam investasi dibidang industri seperti semen, pupuk, bahkan juga dibidang perhotelan dan barang-barang konsumsi seperti tekstil, tepung, terigu, dan minyak goreng. Kata Keynes : "Dalam perekonomian yang sedang menurun, pemerintah sebaliknya memberlakukan *deficit spending* dalam waktu singkat untuk menciptakan lapangan kerja guna menghambat pelarian modal-uang ke luar negeri dan memperketat kontrol terhadap pertukaran mata uang". Baca lebih lanjut dalam Doug Lorimer, *Welfare capitalism and neoliberal globalisation*, dikutip dalam Coen Husein Pontoh, *Akhir Globalisasi : Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa*, (Jakarta : C-Books, 2003), hlm 40

<sup>160</sup> Cyrillus Harinowo, *IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*, hlm

<sup>161</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, hlm. 37

IMF diberi tugas untuk mempromosikan perdagangan dunia dengan menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kurs tetap dan dengan memberikan pinjaman bagi Negara-negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. Sebagai bagian dari memonitor kepatuhan Negara anggota terhadap aturan-aturannya, IMF juga melakukan tugasnya untuk mengumpulkan dan menstandarisasi data ekonomi internasional. Bank dunia (*World Bank*) memberikan pinjaman jangka panjang untuk membantu Negara-negara berkembang membangun waduk, jalan, dan modal fisik lainnya yang akan berkontribusi bagi pengembangan ekonomi mereka. Dana untuk pinjaman-pinjaman ini diperoleh khususnya dengan menerbitkan obligasi bank dunia, yang dijual di pasar modal Negara-negara maju.<sup>162</sup> Di samping itu, GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) didirikan untuk melicinkan jalan bagi perdagangan dunia melalui pengurangan pembatasan lalu lintas devisa dan penggunaan dana-dana cadangan untuk dipinjamkan kepada negara-negara yang mengalami masalah keseimbangan neraca pembayaran sementara sehingga perdagangan terus berlanjut tanpa diinterupsi.

Selama era Bretton Wood, interaksi ekonomi internasional, walaupun dibatasi namun tumbuh dengan signifikan. Di awal-awal tahun Bretton Woods diterapkan, beberapa negara sedang memulihkan stabilitas perekonomian nasional setelah dilanda

---

<sup>162</sup> Dana Bank Dunia pada mulanya memang terfokus untuk membangun kembali benua Eropa. Awal tahun 1948, AS berlandaskan Marshall Plan menjalankan program yang bernama *European Recovery Program*. Sejak tahun 1950 Bank Dunia menyalurkan sebagian besar dananya sebagai bantuan ekonomi ke Negara yang sedang berkembang. Untuk lebih mendalam baca, Indra Ismawan, *Di bawah Cengkraman IMF : Peran IMF dalam krisis Ekonomi Indonesia*, (Solo : Pondok Edukasi, 2002), hlm 29

kehancuran (*divastation*) sebagai dampak dari meletusnya perang. Pasca-Perang Dunia II, pertumbuhan ekonomi sangat luar biasa. Periode pascaperang hingga pertengahan tahun 1970-an disebut sebagai “Zaman Keemasan Kapitalisme” (*capitalist Golden Age*), yang ditandai dengan berkembangnya negara-negara kesejahteraan. Pelayanan sosial dan kolektif meluas, subsidi terhadap pendidikan, kebudayaan, perumahan, dan kesehatan mendapat perhatian tinggi. Tingkat pengangguran menurun drastis. Pokoknya, tahun-tahun tersebut, adalah masa pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan pemerintah aktif dalam manajemen ekonomi.

Tabel 4.1 :

**Rata-rata pertumbuhan Ekonomi Tahunan**  
**Dalam Periode yang Berbeda, antara tahun 1820-1973**  
*(weight average of 16 Countries) (%)*

Periode	Pertumbuhan GNP	Pertumbuhan GNP Per-Kapita
1820-1870	2,2	1,0
1870-1913	2,5	1,4
1913-1950	1,9	1,2
1950-1973	4,9	3,8

Sumber : Robert Went dalam Pontoh, hlm 42

Kalau dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan antara sistem Bretton Woods dengan sistem sesudah Bretton Woods (*managed floating*), maka dapat dilihat di bahwa ini :

**Tabel 4.2 :**  
**Pertumbuhan di Negara G-7 (% per tahun)**

Negara	Periode		
	1964-1973	1983-1993	1993-1998
Kanada	5,6	2,8	2,5
Perancis	5,3	2,3	1,7
Jerman	4,5	2,9	1,5
Italia	5,0	2,4	1,3
Jepang	9,6	4,0	0,8
Inggris	3,3	2,3	2,7
Amerika Serikat	4,0	2,9	3,0

*Sumber* : Eatwell dan Taylor, dalam Pontoh hlm 15

Dari tabel ini, terlihat tingkat pertumbuhan di negara-negara G-7 pada setiap periode tertentu terus mengalami penurunan. Hal inilah yang memicu meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di negara-negara tersebut. Namun pada periode 1964-1973, dimana periode masih diberlakukannya sistem Bretton Woods menunjukkan prestasi yang sungguh menakjubkan, dimana inflasi diatur sedemikian rupa, arus perdagangan antarnegara berjalan secara rapi dan tertib, membuahkan hasil yang pantas untuk diapresiasi.

Dalam persolan inflasi, tingkat inflasi selama periode Sistem Bretton Woods berada pada garis rata-rata untuk disetiap Negara kecuali Jepang yang lebih rendah, kalau dibanding dengan sistem mengambang (*rate floating system*).

Inflasi yang rendah ini berlangsung secara konsisten, sebab keadaan ini didasarkan pada jangkar nominal standar. Bordo (1993) menyebutkan bahwa, setidaknya terdapat dua keunggulan sistem Bretton Woods dibanding dengan sistem

mengambang (*floating system*), yaitu pertama, uang berkembang secara menyeluruh dan stabil di setiap negara, kedua, tingkat bunga nominal jangka panjang lebih rendah dibanding dengan tingkat bunga dengan sistem mengambang (*floating system*).<sup>163</sup> Di bawah ini adalah sajian rinci berupa data yang tingkat inflasi (*inflation rate*) dari tahun 1881-1989, sebagai berikut :

Tabel 4.3 :

**Diskripsi Statistik Inflasi Dan Data Riil Pertumbuhan Per Kapita G-7  
Periode 1948- 1989**

Inflasi PGNP	Bretton Woods System		Floating System	
	Mean	SD	Mean	SD
United State	2,4	2,6	5,6	2,4
United Kingdom	3,7	2,2	9,4	6,1
France	2,7	4,0	3,3	1,2
Japan	5,6	4,1	8,8	3,2
Canada	4,5	4,6	2,6	2,4
Germany	2,7	3,0	7,3	2,6
Italy	3,8	11,5	12,9	4,6
Grand Mean	3,6	4,6	7,1	3,2
<b>Pertumbuhan Riil Per Kapita</b>				
United State	2,0	2,8	2,1	2,7
United Kingdom	2,1	1,8	1,5	4,2
France	5,0	3,3	2,1	1,9
Japan	3,9	2,1	1,7	1,5
Canada	8,1	2,7	3,5	1,1
Germany	2,5	2,6	1,3	2,4
Italy	5,6	3,3	2,5	2,2
Grand Mean	4,2	2,7	2,1	2,3

Sumber : Appendix Bordo 1993 dalam Geoffrey 1998, hlm 44

<sup>163</sup> Geoffrey Wood (editor), *Money, Prices and the Real Economy*, (Cheltenham : The Institute of Economic Affairs, 1998), hlm 44

Tabel di atas berisi tentang data tahunan berdasarkan dua ukuran kinerja ekonomi : (GNP *deflator*) tingkat inflasi dan GNP riil per kapita dari Negara-negara industri yang tergabung dalam negara G-7. Kinerja ekonomi yang diukur adalah kinerja dari sistem Bretton Woods dan Sistem Mengambang (*Floating System*), sebagai perbandingan kinerja antara keduanya. Data statistik dari tiap negara diringkas dan ditampilkan dalam bentuk rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Negara-negara yang dijadikan sampel hanya terdiri dari tujuh Negara.

Dari data yang ditampilkan dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di masa diberlakukannya sistem Bretton Woods dengan rata-rata 3,6 lebih rendah dibanding sistem mengambang (*floating system*) dengan rata-rata yang hanya sebesar 7,1. Fakta ini membuktikan bahwa inflasi di bawah sistem Bretton Wood lebih terkendali dibanding inflasi yang terjadi pada masa sistem mengambang. Di samping itu, kalau dilihat dari aspek pertumbuhan riil per kapita, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada masa sistem Bretton Woods juga mencapai rata-rata sebesar 4,2, dan rata-rata ini mengungguli rata-rata pertumbuhan sistem *floating* yang hanya mampu mencapai rata-rata 2,1.

Satu hal yang harus digarisbawahi adalah sejauh mana kinerja renzim moneter alternatif yang tertera pada tabel di atas dapat menggambarkan operasional sistem moneter yang menghambat kebijakan atau justru taat terhadap suasana lingkungan (sosio-politik). Salah satu cara untuk menjelaskannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasarinya, terutama yang berkaitan dengan permintaan

agregat dan penawaran agregat. Dibawah ini perbandingan tingkat penawaran agregat dan permintaan agregat antara sistem Bretton Wood dan Sistem Floating.<sup>164</sup>

**Tabel : 4.4**  
**Supply (Parmanent) Dan Demand (Temporary) Shock Tahun 1948-1989**  
**Data Tahunan**

Negara	Sistem Bretton Wood (1948-1970)		Sistem Floating (1970-1989)	
	Demand	Supply	Demand	Supply
USA	2,33 %	1,54 %	1,72 %	1,94 %
UK	2,62 %	1,95 %	3,57 %	4,31 %
Germany	2,88 %	2,65 %	1,66 %	1,39 %
France	3,50 %	1,75 %	1,93 %	1,52 %
Japan	3,18 %	2,56 %	2,39 %	2,50 %
Canada	2,42 %	2,60 %	2,66 %	2,10 %
Italy	2,76 %	1,75 %	3,50 %	1,91 %
G-7 Agregat	1,24 %	0,86 %	1,50 %	0,96 %

Sumber : Bordo (1993)

Tabel 4.2 di atas menampilkan standar deviasi dari *supply* dan *demand* Negara-negara yang tergabung dalam G-7 pada sistem yang diterapkan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa fluktuasi *supply* dan *demand* pada sistem Bretton Wood cenderung lebih tenang dibandingkan dengan sistem *floating exchange*, meskipun presentase tidak terlampau jauh. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa *supply* dan *demand* pada sistem Bretton Wood relatif lebih rendah faktor insidennya dibanding dengan sistem *floating*. Tingginya tingkat stabilitas yang mampu dicapai

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm 45

pada periode sistem Bretton Wood sangat dipengaruhi dengan ketaatan (*edherence*) terhadap konvertabilitas aturan Bretton Wood. Menurut Eichengreen (1993) bahwa kredibilitas komitmen pada nilai patokan (*anchor*) menjadi faktor dasar dalam rangka menstabilkan tingkat inflasi. Kondisi ini melahirkan stabilitas yang efektif, terutama dalam mengimbangi guncangan *supply* yang terjadi.<sup>165</sup>

Selain itu, selama dua dekade setelah Perang Dunia Kedua, perdagangan internasional berkembang dengan pesat. Antara 1948 dan 1968, total volume ekspor barang dari negara-negara non-komunis tumbuh fantastis mencapai 290 persen. Dan pertumbuhan perdagangan dunia selama periode ini jauh melebihi ekspansi output dunia.<sup>166</sup> Pertumbuhan fantastis ini berlangsung hingga tahun 1970-an. Perdagangan dunia juga tumbuh pesat di antara negara-negara industri. Sekitar tahun 70-an, "intra-trade" antara negara maju menyumbang lebih dari 54 persen perdagangan dunia.<sup>167</sup> Pertumbuhan intra-perdagangan mensejajarkan pergeseran komposisi arah barang-barang manufaktur. Industri ekonomi semakin terlibat dalam perdagangan barang akhir yang sama dan komponen yang diperdagangkan dari berbagai tahap produksi

Berkaitan dengan itu, sejarawan ekonomi sering mengutip liberalisasi kebijakan perdagangan berdasarkan kesepakatan Bretton Woods sebagai penyebab utama ledakan perdagangan pasca-perang tersebut. Pada dekade setelah Perang Dunia

---

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm 49

<sup>166</sup> Andrew G. Terborgh, "The Post-War Rise of World Trade: Does the Bretton Woods System Deserve Credit?", hlm 1

<sup>167</sup> Kenwood, George and Alan Lougheed (1992). *The Growth of the International Economy, 1820-2000*. 4th Ed. London: Rutledge, hlm 286 dan 288

Kedua, hambatan perdagangan yang didirikan selama beberapa periode antar-negara dirobohkan secara bertahap melalui serangkaian perjanjian politik. Perjanjian Umum tentang Perdagangan 1947 dan Tarif (GATT) adalah yang palingutamakan dari perjanjian. Pada konferensi Jenewa, 23 negara disepakati negosiasi meliputi 123 50.000 diperdagangkan items.<sup>168</sup> Efektivitas GATT adalah paling jelas untuk Amerika Serikat, yang telah mengurangi tugas dengan lebih dari 50 persen pada pertengahan 1950-an.

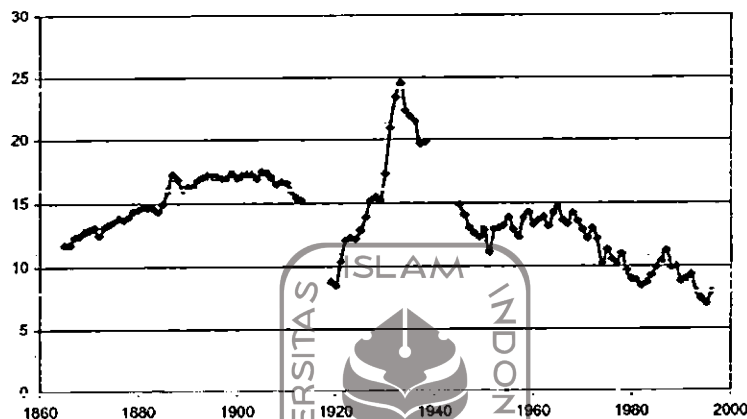
Walaupun Dalam analisis pemulihan perdagangan pasca-perang, Irwin menyimpulkan bahwa *“The formation of GATT does not appear to have stimulated a rapid liberalization of world trade in the decade after 1947. . .”* Pada akhir 1950-an, ketidakmampuan GATT untuk memecahkan masalah yang kompleks perdagangan di Eropa menyebabkan pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), yang menciptakan tarif eksternal umum di antara enam negara. Hanya pada akhir tahun 1960, setelah perundingan Putaran Kennedy (1964-1967), apakah negara-negara mulai mengurangi tarif secara substansial.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Irwin, Douglas (1995). *“The GATT’s Contribution to Economic Recovery in Post-War Western Europe,”* in Barry Eichengreen (ed.), *Europe’s Postwar Recovery*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm 5

**Gambar 4. 6 : Rata-rata Perdagangan Dunia di 35 Negara**



Sumber: Clemens and Williamson (2001)<sup>170</sup>

Gambar di atas menggambarkan kegagalan negara untuk secara signifikan mengurangi tarif pada tahun 1930 dan 1960 untuk sampai 35 negara. Dengan demikian, lingkungan pasca-perang perdagangan bebas itu dicapai tidak seketika, namun secara berlahan, melalui negosiasi terus-menerus

Di satu sisi, untuk menjawab argumen di atas, argumen lainnya berfokus pada penurunan biaya transportasi sebagai pendorong utama kenaikan perdagangan dunia pasca-perang. Menggunakan pendekatan *cross-sectional studies*, beberapa penulis telah mengidentifikasi biaya transportasi menjadi unsur terpenting sebagai hambatan

<sup>170</sup> Clemens, Michael and Jeffrey Williamson (2001). "A Tariff-Growth Paradox? Protection's Impact the World Around 1875-1997," NBER Working Paper 8459.

tarif untuk impor AS di pertengahan 1960-an.<sup>171</sup> Baru-baru ini, Obstfeld dan Rogoff (2001) juga menyebutkan bahwa biaya transportasi dan teknologi dengan model yang beragam memiliki peran penting untuk mendorong perilaku pedagang pasca-perang.

Lebih lanjut, Hummels (1999) memberikan kontribusi yang signifikan untuk mempelajari pengaruh biaya transportasi perdagangan dengan menghadirkan sebuah database baru untuk mengukur tren biaya transportasi menggunakan data pada angkutan laut, udara dan transportasi darat. Dengan demikian, biaya pengiriman untuk produk manufaktur, yang menyumbang 70 persen dari OECD perdagangan, telah benar-benar bangkit. Memang, Rose (1991) menemukan tidak ada hubungan statistik yang signifikan antara biaya transportasi dan rasio perdagangan untuk periode pasca-perang. Tapi Hummels memperingatkan bahwa data mentah dari studinya telah mengabaikan komponen penting dari peningkatan kualitas transportasi, yang mungkin memiliki manfaat perdagangan melalui peningkatan kecepatan. Pengiriman cepat ini mungkin juga menjelaskan pasca perang organisasi produksi yang semakin menekankan *just in time* produksi vertikal di seluruh negara. Perbaikan teknologi transportasi terkait erat dengan pergeseran komposisi perdagangan internasional setelah Perang Dunia Kedua.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Waters, W. G. (1970). "Transport Costs, Tariffs and the Patterns of Industrial Protection," *American Economic Review* 60: 1013-20.

<sup>172</sup> Baca Andrew G. Terborgh, "The Post-War Rise of World Trade: Does the Bretton Woods System Deserve Credit?", hlm 6

Oleh karena itu, perbaikan dalam komunikasi melalui penggunaan komputer dan teknologi telekomunikasi telah membuat multi-nasional proses produksi lebih mudah untuk dikoordinasi, sehingga kendala geografis dapat mudah teratasi. Perwujudan kongkrit dari perbaikan teknologi dalam transportasi dan komunikasi adalah pertukaran mudah barang melintasi jarak dan batas-batas nasional.

Di samping itu, konvergensi pendapatan per kapita sebagaimana diilustrasikan di atas juga mungkin menawarkan beberapa penjelasan untuk perilaku perdagangan pada periode pasca-perang. Setelah Perang Dunia Kedua, pendapatan per kapita berkembang pesat dan cenderung untuk berkumpul di seluruh ekonomi industri. Beberapa ekonom berpendapat bahwa konvergensi pendapatan meningkatkan perdagangan. Karena pola permintaan sebagian ditentukan oleh pendapatan, negara-negara dengan tingkat pendapatan yang sama cenderung untuk berdagang lebih banyak dengan satu sama lain. "Permintaan Teori Perwakilan" (*Representative demand theory*) menunjukkan bahwa volume perdagangan internasional meningkat, pola permintaan menjadi bahkan lebih mirip.<sup>173</sup> Dengan demikian, dunia perdagangan harus berkorelasi positif dengan kesamaan dalam pendapatan per kapita. Walaupun bukti empiris dari periode pasca-perang dengan menggunakan data *cross-sectional* tidak mendukung salah satu dari teori ini.<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> Linder, Staffan (1961). *An Essay on Trade and Transformation*. New York: Wiley.

<sup>174</sup> Rose, Andrew K. (1991). "Why Has Trade Grown Faster Than Income?" *The Canadian Journal of Economics* 24: 417-427.

Dari perpektif teori moneter, tingginya fluktuasi nilai tukar (*Exchange rate volatility*) suatu Negara sebagai akibat dari melonjaknya inflasi membuahakan kenaikan nilai impor dan mereduksi kemampuan ekspor nasional Negara yang bersangkutan. Volatilitas nilai tukar mempengaruhi perdagangan melalui ketidakpastian, yang akan menghalangi agen untuk terlibat dalam transaksi internasional. Ketidakpastian ini membuat lebih berisiko perdagangan internasional dan dengan demikian dapat menyebabkan kenaikan harga dan penurunan dalam jumlah produksi.<sup>175</sup>

Berkaitan dengan itu, studi terbaru yang memanfaatkan metode *cross-sectional* telah menghasilkan hasil penting. Frankel dan Wei (1995) mempelajari pengaruh volatilitas nilai tukar dengan menggunakan dataset penampang untuk periode 1965-1980.<sup>176</sup> Para penulis menggunakan model gravitasi, di mana perdagangan bilateral antara dua negara adalah proporsional terhadap PDB<sup>177</sup> dan berbanding terbalik dengan jarak antara mereka.<sup>178</sup> Temuan mereka mendukung

<sup>175</sup> Nilai tukar yang berdasarkan pada kekuatan pasar akan selalu berubah disetiap kali nilai-nilai salah satu dari dua komponen mata uang berubah. Sebuah mata uang akan cenderung menjadi lebih berharga bila permintaan menjadi lebih besar dari pasokan yang tersedia. nilai akan menjadi berkurang bila permintaan kurang dari suplai yang tersedia.

<sup>176</sup> Frankel, Jeffrey, and Shang-Jin Wei (1995). "Emerging Currency Blocks," in Hans Genberg (ed.), *The International Monetary System: Its Institutions and its Future*, Berlin: Springer.

<sup>177</sup> Transaksi permintaan uang sangat berhubungan dengan tingkat aktivitas bisnis negara berkaitan, *produk domestik bruto (PDB) (gross domestic product (GDP) atau gross domestic income (GDI))*, dan tingkat permintaan pekerja. Semakin tinggi tingkat menganggur pada suatu negara akan semakin sedikit masyarakatnya yang secara keseluruhan akan dapat menghabiskan uang pada belanja pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dan Bank Sentral.

<sup>178</sup> Model gravitasi baru-baru ini mendapatkan popularitas yang cukup besar dalam literatur perdagangan internasional.

hipotesis bahwa volatilitas nilai tukar riil telah menekan perdagangan bilateral sejak tahun 1965, meskipun besarnya efek ini relatif kecil dan telah jatuh sedikit dengan pengembangan perangkat lindung nilai. Sebuah studi *cross-sectional* yang terbaru oleh Rose (2000) mendukung hipotesis bahwa volatilitas nilai tukar memiliki dampak negatif terhadap perdagangan. Studi-studi empiris menggambarkan pentingnya volatilitas nilai tukar sebagai sumber biaya transaksi internasional.<sup>179</sup>

Efek dari ketidakpastian kurs terhadap volume perdagangan secara tidak langsung dapat dilihat pada kecenderungan perusahaan untuk melakukan perdagangan di dalam negeri dibandingkan di antara negara, fenomena yang dikenal sebagai "rumah-bias" dalam perdagangan internasional.<sup>180</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa Sistem Bretton Woods secara signifikan mampu mengurangi volatilitas nilai tukar pasca perang kedua. Secara prinsip, Bretton Woods tidak menyiratkan sebuah sistem yang bebas volatilitas nilai tukar. Para perancang sistem ini, hanya saja bertujuan untuk menghindari peristiwa krisis menyakitkan selama periode kurs mengambang yang memungkinkan fleksibilitas untuk memperbaiki ketidakseimbangan. Akibatnya,

---

<sup>179</sup> Andrew G. Terborgh, "The Post-War Rise of World Trade: Does the Bretton Woods System Deserve Credit?", hlm 10

<sup>180</sup> McCallum, John (1995). "National Borders Matter: Canada-U.S. Regional Trade Patterns," *American Economic Review* 85: 615-623.

sistem pasak (*fixed system*) disesuaikan.<sup>181</sup> Dalam Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchange Rate*) nilai tukar mata uang dibuat konstan ataupun hanya diperbolehkan berfluktuasi dalam kisaran yang sempit. Apabila pada suatu saat nilai tukar mulai berfluktuasi terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaga agar fluktuasi tetap berada dalam kisaran yang diinginkan. Biasanya, negara-negara yang menyatakan nilai nominal terhadap emas atau dolar AS dan mempertahankan mata uang mereka dalam margin satu persen. Dalam hal jangka pendek ketidakseimbangan, cadangan devisa dan sumber daya IMF akan berfungsi sebagai penyangga. Jika syok atau inflasi terus-menerus menghasilkan ketidakseimbangan, otoritas moneter bisa mengubah paritas setelah pemberitahuan dari IMF.

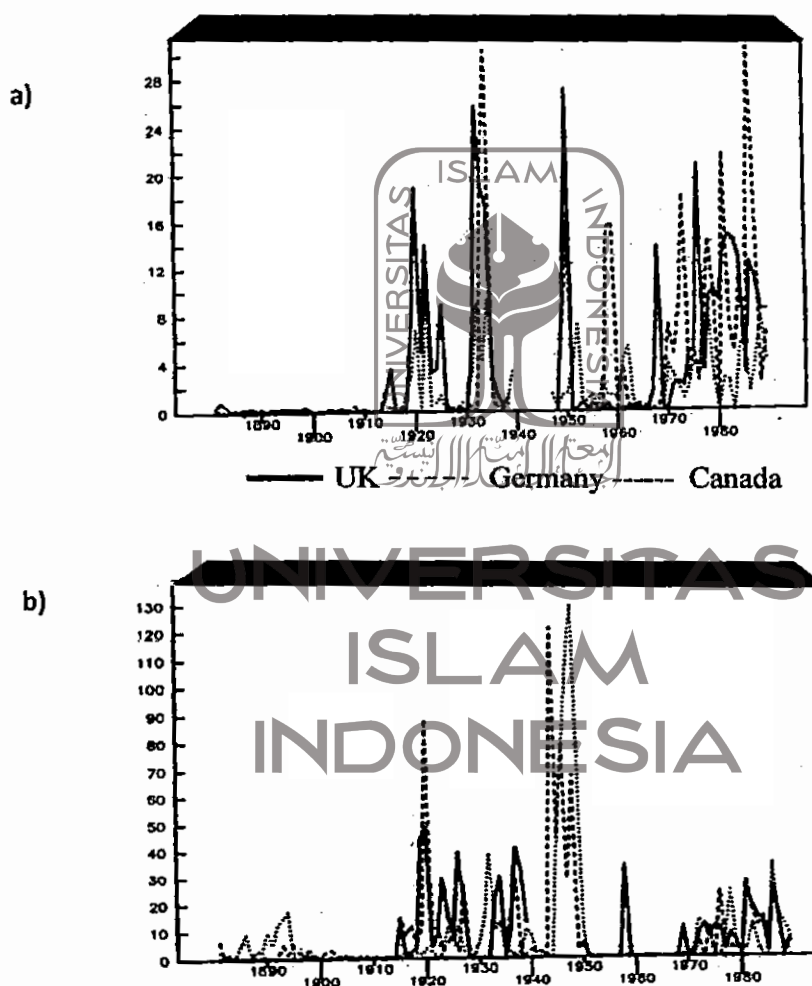
Bordo (1993) menyajikan bukti-bukti pada stabilitas Sistem Bretton Woods dengan menggunakan data nilai tukar resmi. Bagan di bawah ini menggambarkan perilaku nilai tukar nominal di *preconvertibility* dan periode konvertibilitas. Penulis juga membandingkan tren nilai tukar dalam periode ini dengan tren selama standar emas dan setelah keruntuhan Bretton Woods pada 1970-an. Tingkat rata-rata terendah dari perubahan untuk nilai tukar nominal terjadi selama periode konversi Bretton Woods dan selama periode standar emas. Tingkat rata-rata perubahan untuk kedua periode ini adalah 0,8 persen. Selanjutnya, periode konversi Bretton Woods terlihat tingkat terendah divergensi di seluruh sampel. Sebaliknya, nilai tukar nominal selama

---

<sup>181</sup> Bordo, Michael D. (1993). "The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview," in Michael D. Bordo and Berry Eichengreen (eds.), *A Retrospective on the Bretton Woods System*, Chicago: University of Chicago Press.

periode preconvertible hampir sebagai volatile seperti selama mengambang (*floating system*). Bordo menekankan bahwa volatilitas tinggi terutama disebabkan oleh devaluasi besar pada tahun 1949.<sup>182</sup>

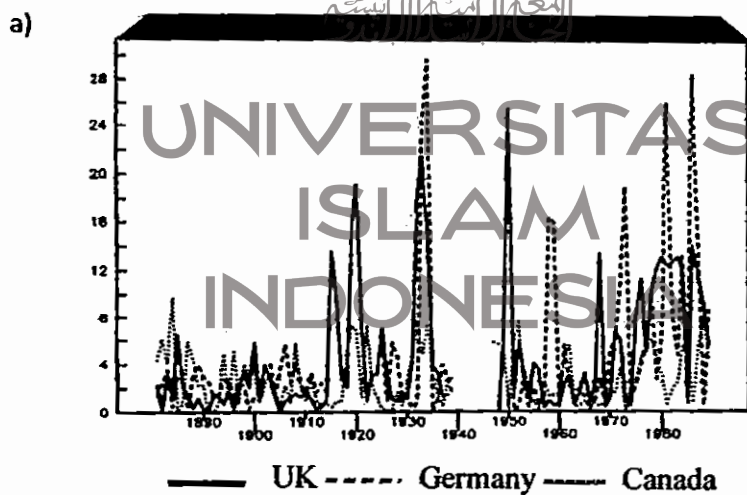
**Gambar 4.7 : Perubahan Tingkat Kurs Nominal antara tahun 1880-1989**

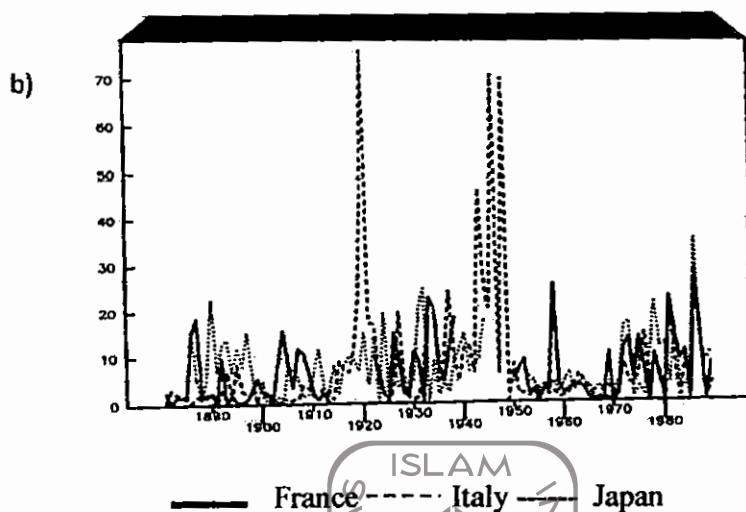


<sup>182</sup> Bordo, Michael D. (1993). "The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview..

Penelusuran nilai tukar riil menunjukkan bahwa Sistem Bretton Woods mencapai tingkat terbesar stabilitas. Nilai tukar riil menunjukkan tingkat rata-rata terendah perubahan dan perbedaan, setidaknya di negara-negara yang tergabung dan menerapkan Sistem Bretton Woods konversi. Sebagai perbandingan, nilai tukar riil sedikit lebih stabil selama baku emas klasik dan terutama lebih tidak stabil selama periode preconvertibility Bretton Woods. Dengan demikian, statistik resmi menunjukkan bahwa periode konvertibilitas, ketika Bretton Woods Sistem ini beroperasi penuh, menawarkan tingkat stabilitas nilai tukar yang unggul sebagai suatu rezim moneter internasional.

**Gambar 4.8 : Tingkat Perubahan Kurs Riil antara Tahun 1880-1989**





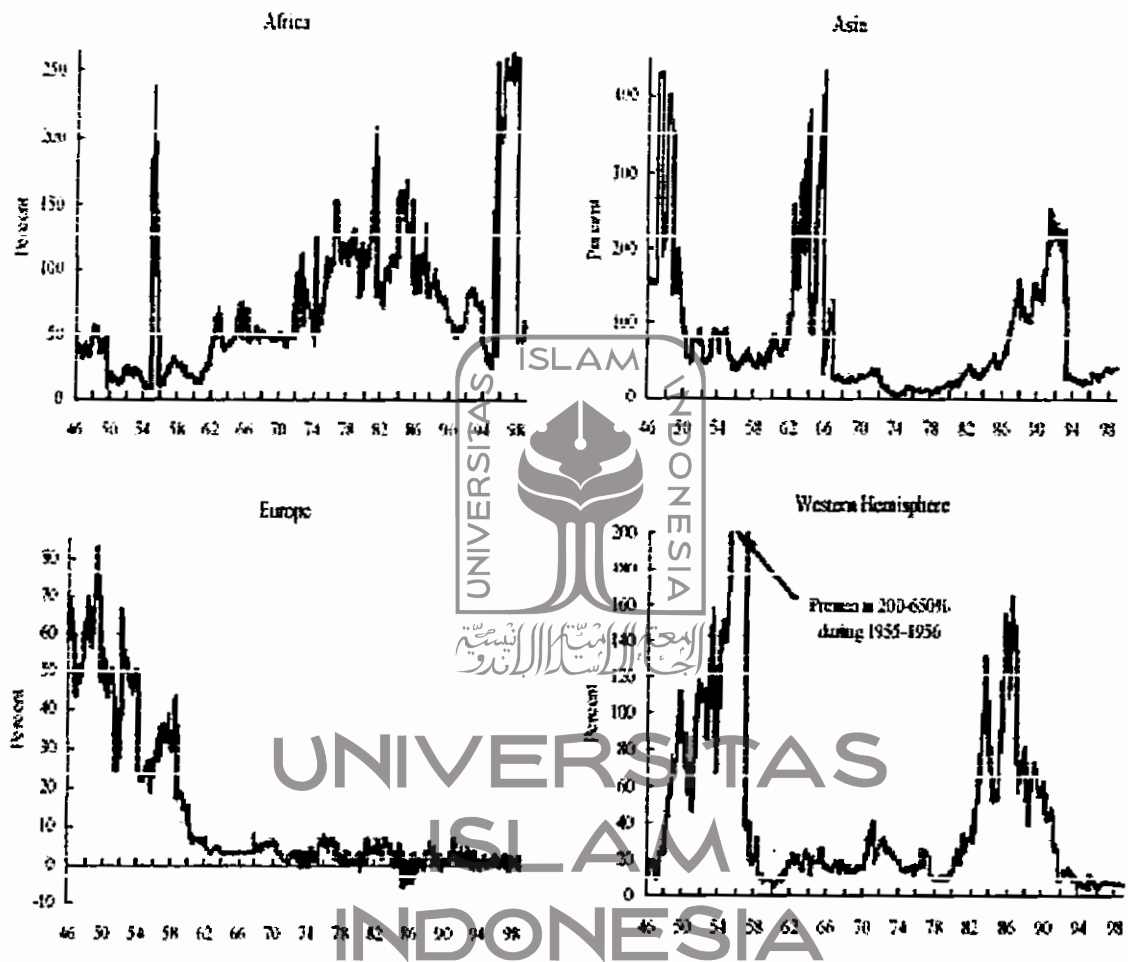
Namun, penelitian terbaru oleh Reinhart dan Rogoff (2002) dengan menggunakan statistik resmi untuk menilai stabilitas rezim nilai tukar. Para penulis mengumpulkan data nilai tukar bulanan untuk 153 negara antara tahun 1946 dan 1998. Studi mereka membedakan antara klasifikasi nilai tukar resmi, yang ditetapkan oleh IMF, dan "alami" klasifikasi nilai tukar, yang ditentukan oleh kondisi pasar. Setelah Perang Dunia Kedua, perbedaan-perbedaan ini melebar karena negara-negara paling bergantung pada kontrol modal dan / atau ganda nilai tukar pasar. Jika kurs terdepresiasi di pasar paralel, dengan menggunakan klasifikasi resmi tetap, kebijakan moneter yang mendasari adalah deflasi dan efek pada nilai tukar resmi. Secara historis, skenario ini akhirnya telah menyebabkan penyusutan nilai tukar resmi.<sup>183</sup>

Penelitian yang dilakukan Reinhart dan Rogoff di atas, dijawab dengan klasifikasi terbaru berdasarkan nilai tukar pasar yang mengungkapkan bahwa Sistem

<sup>183</sup> Reinhart, Carmen and Kenneth Rogoff (2002). "The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation," NBER Working Paper 8963.

Bretton Woods jauh lebih stabil daripada yang dipahami sebelumnya. Pada tahun 1950, klasifikasi IMF mengungkapkan bahwa 65 persen dari semua negara sebagai pasak. Namun, klasifikasi Reinhart dan Rogoff mengungkapkan bahwa kurang dari 40 persen dari semua rezim sebenarnya pasak. Perbedaan ini disebabkan adanya pasar paralel luas setelah Perang Dunia Kedua, terutama di Eropa Barat. Gambar 4.4 menggambarkan premi pasar paralel sejak 1946. Bukti menunjukkan bahwa klasifikasi yang diraih Eropa sungguh sangat menakjubkan. Dari tahun 1946 sampai pada awal tahun 1960-an, Eropa secara *de facto* diatur dibawah nilai tukar resmi tetap. Kecenderungan ini bahkan lebih jelas bagi negara berkembang, di mana volatilitas tingkat paralel tak jauh berbeda dengan volatilitas mengambang saat ini diterapkan. Untuk ekonomi-industri, premi ini bertahan sampai tahun 1960-an, menunjukkan bahwa durasi sebenarnya dari Sistem *fixed-rate* Bretton Woods jauh lebih pendek dari banyak teks sebagaimana yang sering dijelaskan. Untuk negara berkembang, pra dan pasca-1973 yang ditentukan pasar volatilitas nilai tukar terlihat sangat mirip.

**Gambar 4.9 : Rata-Rata Bulanan Premi Pasar Paralel: 1946-1998**



#### **D. Faktor dan Dampak Sistem Bretton Wood terhadap Stabilitas Perekonomian**

##### **Global dalam Tujuan Maqasid Syariah**

Berakhirnya Perang Dunia II menandai awal dari sebuah era baru bagi perekonomian dunia. Para pembuat kebijakan semakin memusatkan perdagangan internasional sebagai aspek terpenting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan tertatanya

sistem perdagangan dan sistem keuangan internasional sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods, terjadilah perubahan pesat bagi perdagangan dunia. Dalam kerangka baru kerjasama ini, perdagangan internasional berkembang pesat dan konsisten selama 1950-an dan 1960-an. Masa 50 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II, perkembangan perdagangan internasional mengalami pertumbuhan yang sangat fenomenal.

Antara 1948 dan 1960, total nilai ekspor barang dagangan negara-negara non-komunis meningkat dari \$ 53 miliar menjadi \$ 112.3 Billion, pada tingkat pertumbuhan rata-rata lebih dari 6 persen per tahun. Pertumbuhan bahkan lebih cepat pada 1960-an, ketika tingkat tahunan rata-rata volume ekspor meningkat menjadi lebih dari 8 persen.<sup>184</sup>

Tingkat pertumbuhan ini jauh melebihi laju ekspansi perdagangan dunia dalam setengah abad sebelum tahun 1914, periode yang menjadi tuan rumah "globalisasi pertama" yang sangat dibanggakan. Sejak 1973, perdagangan dunia telah berkembang pada kecepatan rata-rata lebih lambat sekitar 4 persen per tahun dan telah jauh lebih tidak menentu. Lebih penting lagi, pada 1950-an dan 1960-an pertumbuhan perdagangan dunia secara konsisten melampaui pertumbuhan output dunia. Sebagai contoh, 1953-1963, perdagangan produk diproduksi meningkat

---

<sup>184</sup> Kenwood and Lougheed (1992), hlm. 286, dan Ashworth (1987), hlm.285. dalam Andrew G. Terborgh, "The Post-War Rise of World Trade: Does the Bretton Woods System Deserve Credit?", Working Paper No. 78/03, Department of Economic History London School of Economics, 2003, hlm 3

sebesar 83 persen, sedangkan output manufaktur naik hingga 54 persen.<sup>185</sup> Ada beberapa hal yang dapat menjelaskan perkembangan ini :<sup>186</sup>

1. Dipergunkannya sistem nilai tukar tetap sebagaimana disepakati oleh *Bretton Woods Agreement* dan yang kemudian diatur pelaksanaannya oleh IMF membawa stabilitas yang sangat diharapkan bagi terjadinya perdagangan yang marak.
2. Diterapkannya sistem perdagangan international melalui perjanjian bersama yang dituangkan dalam *General Agreement on Tariffs and Trades*. Penerapan sistem ini serta upaya liberalisasi perdagangan melalui berbagai putaran perundingan akhirnya membawa dampak pada keterbukaan perekonomian yang lebih besar pada negara anggota GATT di seluruh dunia. Perkembangan ini membawa pengaruh yang sangat positif bagi perkembangan perdagangan international lebih lanjut.

Senada dengan di atas, penulis sepakat dengan pendapat Spero mengenai sistem *Bretton Woods*, dia mengatakan :

Peraturan Bretton Woods...disediakan bagi sistem nilai tukar mata uang saing tetap. Para pejabat publik, masih ingat atas apa yang mereka percayai sebagai pengalaman mengerikan dengan nilai tukar mengambang di 1930, menyimpulkan bahwa nilai tukar tetap adalah yang paling stabil dan yang paling kondusif untuk diperdagangkan.....Peraturan tersebut lebih jauh mendorong suatu sistem yang terbuka, dengan mengikat anggota pada

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> Cyrillus Harinowo, *IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*, hlm 81-83

konvertibilitas mata uang mereka masing-masing menjadi mata uang lainnya dan pada perdagangan bebas.<sup>187</sup>

Huntington juga menyebutkan bahwa Bretton Wood berfungsi untuk menjamin sistem perdagangan dan pembayaran yang kurang lebih terbuka sekaligus menyediakan perlindungan bagi stabilitas ekonomi dalam negeri melalui dana moneter internasional.<sup>188</sup> Pernyataan ini didukung dengan pernyataan Kindleberger yang menyebutkan bahwa sistem Bretton Wood sangat efektif dalam mengontrol konflik dan dalam rangka meraih tujuan-tujuan bersama yang telah dibuat oleh negara-negara bangsa.<sup>189</sup>

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya *Bretton Woods Agreements*, sebenarnya berpijak dari pengalaman Perang Dunia I. Sebagaimana yang pernah terjadi, menggambarkan masa yang sangat berat bagi perekonomian dunia. Kebangkitan perekonomian negara-negara yang terlibat perang, seperti peningkatan produksi bahan makanan dan industri, akan membuat produksi global meningkat cepat, jauh melebihi kebutuhan. Fakta membuktikan bahwa pada tahun 1930-an, dunia sedang mengalami kekacuan moneter akibat perang Dunia I. Tatanan ekonomi internasional telah mengalami desintegrasi sehingga menciptakan kekacuan nilai tukar yang bebas mengambang (*clean and dirty*), devaluasi yang berkompetensi,

---

<sup>187</sup> Spero, J.E. *Political Realism in International Theory*. (Cambridge : Cambridge University Press, 1996), hlm 37, dikutip dalam Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm 230

<sup>188</sup> Samuel P. Huntington, dkk. *Amerika dan Dunia*, hlm 158

<sup>189</sup> Charles. P, Kandleberger, *The World in Depression 1929-1939*. hlm 23

pengendalian pertukaran mata uang, kendala perdagangan, perang ekonomi dan moneter internasional yang terjadi antarmata uang-mata uang dan blok-blok mata uang (*Beggar they neighbor policy*). Perdagangan dan investasi internasional dapat dikatakan telah macet total, perdagangan yang dilakukan melalui kesepakatan barter antarpemerintah saling berkompetensi dan berkonflik satu sama lain. Keadaa ini dikenal dengan istilah *The Great Depression*.

Dengan demikian, terbentuknya *Bretton Woods Agreements* merupakan kesepakatan tokoh dan ekonom dunia untuk mengantisipasi gejala-gejala yang dapat menghantarkan umat manusia kepada krisis global seperti yang terjadi sebelumnya. Pendek kata, *Bretton Woods Agreements* pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan kemaslahatan.

Berbicara tentang kemaslahatan, menurut Thohir Ibnu Asur, pada prinsipnya semua ajaran *syari'ah* khususnya Islam datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.<sup>190</sup> Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Quran maupun al-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat. Meskipun sumber *syara'* tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam *syari'at* Islam.

---

<sup>190</sup> Muhammad Thohir Ibnu Asur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, ...hlm. 13

Jika ditinjau berdasarkan kaca mata *maqasidu al-Syari'ah*,<sup>191</sup> maka akan diawali dari pembahasan prinsip awalnya yaitu bahwa hukum Islam secara kualitatif maupun kuantitatif melindungi kemaslahatan setiap individu di tengah masyarakat yang meliputi aspek agama (*hifzu ad-din*), jiwa (*hifzu an-nafs*), keturunan (*hifzu an-nasl*), akal (*hifzu al-'aql*), dan harta (*hifzu al-mal*).<sup>192</sup> Konsekuensi logis dari prinsip ini telah memberikan pemahaman bahwa dalam konteks instabilitas (*mafsadah*) yang terjadi pada aspek perekonomian, adalah satu hal yang kontradiktif, karena bisa berakibat fatal pada ketidakseimbangan, bahkan keberlangsungan kehidupan manusia. Sehingga pada gilirannya dapat mengancam *al-kulliyat al-khams* atau *ad-dharurat al-khams* (lima hal inti) tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi.

<sup>191</sup> Dalam *ushul fiqh*, bahasan *maqashid syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan ijtihad. Ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan manusia, baca *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Azis Dahlan (ed), hal. 1108.

<sup>192</sup> Menurut berbagai pendapat bahwa *al-kulliyah al-khamsah* yang telah dirumuskan oleh para ahli fiqh klasik pada masa mereka sudah tidak cukup lagi jika sebatas lima kebutuhan primer tersebut. Sehingga inovasi dalam meletakkan kebutuhan-kebutuhan primer kekinian sebagai *maqashid al-syari'ah*, seperti hak kebebasan berpendapat, berpolitik, pemilu dan suksesi, hak mendapat pekerjaan, sandang, pangan dan papan, hak mendapat pendidikan, hak pengobatan dan sebagainya, sangat perlu adanya.

Dalam perspektif *maqasidu al-Syari'ah*, Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu; menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua dimilikinya); yang paling dasar adalah menjaga kehormatan, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan keluarga; menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam; menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.<sup>193</sup>

Kemaslahatan dasar di atas telah terguncang dengan guncangan yang sangat hebat, lantaran meletusnya Perang Dunia II. Tataran sosio-ekonomi, terutama stabilitas perekonomian dunia, menjadi tak terkendali dan menimbulkan kekacauan pada sistem moneter keuangan internasional. Keadaan ini memicu gelombang fluktuasi yang besar dan semakin tak terkendali, sehingga mengganggu aktivitas perdagangan global yang berujung pada kemacetan dan kemandekan. Ketidakseimbangan yang disebabkan oleh kekacauan arus perdagangan (ekspor dan impor) suatu negara ini, banyak memicu berbagai Negara untuk melakukan devaluasi terhadap mata uang domestiknya. Akhirnya berdampak pada ketidakpastian dalam pembayaran perdagangan internasional (*balance of payment*).

Kehancuran (*divastation*) pundi-pundi ekonomi global di atas, jelas akan mengancam keseimbangan kehidupan umat manusia dan melebarkan penderitaan

---

<sup>193</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*,...hlm xi

bagi ratusan juta umat manusia di muka bumi ini. Peristiwa *Great Depression* sebagaimana pernah terjadi pada sekitar tahun 1930, sebagai akibat Perang Dunia I telah menyebabkan terus berlanjutnya kemelaratan, kelaparan, dan kesengsaraan umat manusia di berbagai belahan dunia.

Sebagaimana tujuan didirikannya, Sistem Bretton Wood telah membantu negara-negara korban perang, terutama di wilayah Eropa, untuk segera merekonstruksi infrastruktur dan perekonomiannya yang hancur pascaperang dunia kedua. Sistem Bretton Wood melalui lembaga di bawah naungannya Bank Dunia, telah mendanai proyek-proyek di berbagai negara untuk mengembangkan beberapa hal, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, hingga lingkungan hidup. Pendek kata, kala itu pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan manusia pascaperang, sehingga segala bidang yang secara langsung berhubungan dengan kemanusiaan sangat diprioritaskan.

Islam, sebagaimana diyakini oleh para pemeluknya adalah satu sistem nilai yang bersumber dari Allah. Karena itu kebenarannya bersifat absolut, tunggal, eternal, dan universal.<sup>194</sup> Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan

---

<sup>194</sup> Dengan kemutlakannya ini, Islam sebagaimana halnya agama dan sistem kepercayaan lainnya senantiasa mengasumsikan kemutlakan agar dapat memberikan kepastian sehingga berfungsi sebagai pedoman hidup. Karena itu, dapat dimengerti ketika menyangkut al-Sunnah, kajian yang pertama kali dilakukan adalah kritik sanad yang bertujuan untuk mempertegas validitas dan outentisitasnya (*tsubut*). Universitas dan eternalitas Islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa Risalah Muhammad Saw. untuk seluruh ummat manusia (Q. S. Saba, 34: 28) dalam berbagai aspek kehidupan (Q. S. al-Baqarah, 2: 208), bahkan rahmatnya harus dapat dirasakan oleh seluruh alam (Q. S. al-Anbiya', 21: 107)

ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.

Menurut Abdullah Abdul Husein At-Tariqy bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeiurui dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dari aspek ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia sekaligus.<sup>195</sup> Pesan al-Qur'an dalam aktivitas ekonomi (transaksi keuangan) adalah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.....

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan di antara kamu secara batil.....”* (QS Al-Baqarah :188)

Sebagaimana telah dijelaskan di sub bab terdahulu, bahwa Sistem Bretton Woods terbukti telah menciptakan stabilitas perekonomian global. Sehingga pada masa ini, masyarakat internasional pada umumnya relatif mudah untuk memenuhi kebutuhan primernya, karena berbagai aspek yang membidangi peayanan kebutuhan

<sup>195</sup> Abdullah Abdul Husein At-Tariqy, *Al-Iqtishad Al-Islami, Ushuluhu wa Mubaun wa Ahdaf*, (Dar An-Nafais, Kuwait, 1999), hlm 282

masyarakat dunia telah diatur dengan baik, seperti pada sistem moneter, perdagangan, dan akselerasi pembangunan. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan kebutuhan primer itu dan mengingatkan manusia pertama keharusan pemenuhannya sebelum manusia pertama itu menginjakkan kakinya di bumi. Ketika Adam dan istrinya Hawa masih berada di Surga, Allah mengingatkan mereka berdua :

فَقُلْنَا يَتَّخِذُكُمْ هَذَا عَدُوًّا لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۗ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۗ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۗ

*"Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, karena (jika demikian) engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalam surga dan tidak akan telanjang. dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan disengai panas matahari di dalam surga".*

Yang dimaksud dengan susah payah adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka yang di dunia tidak diperoleh tanpa kerja tetapi di surga telah disediakan pangan atau dalam bahasa ayat di atas "tidak lapar dan tidak dahaga". Sandang diukiskan dengan "tidak telanjang", sedangkan papan diisyratkan oleh kalimat "tidak disengat panas matahari".<sup>196</sup>

<sup>196</sup> Sementara ulama menganalisis mengapa peringatan ini ditujukan kepada mereka berdua selaku suami istri, tetapi pernyataan bersusah payah dikemukakan dalam bentuk tunggal yang ditujukan kepada suami (Adam) saja. Jawabannya menurut mereka adalah karena kebutuhan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pria dan wanita (suami-istri), tetapi kewajiban bersusah payah mencarinya berada di pundak suami, sehingga merupakan kewajiban suami untuk mengihktikannya. baca lebih lanjut Quraish Shihab, *Warasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 2001), hlm 407-408

Menjaga *maqshâshid syarî'ah* sebagaimana yang digariskan oleh ahli Ushul Fiqh terbagi kepada tiga tingkatan: *dlarû riyah*, *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*. Dalam fiqh *aulawiyât*, *dlarûriyah* lebih didahulukan dari pada yang *hâjjiyah*. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*, kita dituntut untuk mendahulukan *hâjjiyah* daripada *tahsîniyah*. Pertama, *dlarûriyah* adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan.

Dalam kaitannya dengan *dlarûriyah* ini, hemat penulis, stabilitas perekonomian dunia merupakan hal yang *dharuri*. Sebab instabilitas yang terjadi, terutama pada masa Perang Dunia II ini merupakan suatu momok yang bisa membuat jutaan umat manusia melarat, sengsara, dan hidup dalam kemiskinan, bahkan tak jarang berujung pada kematian. Stabilitas perekonomian pada masa ini merupakan jembatan bagi warga internasional untuk menuju hidup yang lebih baik. Sehingga berdasarkan fakta ini, menurut penulis Sistem Bretton Woods berada pada dimensi *dharuri* yang menyandang status wajib hukumnya untuk ditetapkan sebagai sistem yang mengatur perekonomian internasional kala itu (*jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah*), sebab ketiadaanya bisa membahayakan stabilitas kehidupan jutaan umat manusia. Dalam keadaan darurat seperti ini, argumentatif istihsan juga dapat

---

mengihktarkannya. baca lebih lanjut Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 2001), hlm 407-408

kesukaran (*raf' al-haraj*), menghilangkan kemadlaratan dan menarik kemaslahatan baik kemaslahatan tersebut berupa kemaslahatan kategori *aharuriyyat*, *hujjiyyat*, maupun *tahsiniyyat*.<sup>198</sup>

Dalam konteks *maqashid syariah*, semakin kacaunya stabilitas perekonomian dunia mengancam eksistensi *al-kulliyât al-khams* yang harus dilindungi. *Pertama*, *hifdz al-din* (Perlindungan terhadap keyakinan agama), Islam mengajarkan umat manusia untuk berupaya menjaga akidah, apapun godaannya. Sebab rusaknya akidah seseorang berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Surah Al-Kafirun sangat jelas menggambarkan dan mengajarkan secara tegas bagaimana seharusnya seseorang mempertahankan akidahnya, sekalipun digoda dengan berbagai kenikmatan duniawi.<sup>199</sup>

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

<sup>198</sup> Dalam kerangka Sistem Bretton Woods mencapai kemaslahatan seperti itulah sebenarnya hukum Islam harus diarahkan. Seperti apapun keputusan hukum yang dikeluarkan, maka tercapainya kemaslahatan dan hilangnya kerusakan harus menjadi pertimbangan yang pertama dan utama. Pengembangan dan pembaharuan hukum Islam pada dasarnya juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum Islam bisa mengakomodasi perkembangan zaman sehingga bisa mencapai kemaslahatan bagi manusia yang merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam.

<sup>199</sup> Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."

Krisis moneter yang berkepanjangan membuat kehidupan manusia semakin sempit dari limpahan rezki untuk tiap beribadah. Kemiskinan dan kelaparan menjadi pandangan yang tak asing lagi, jutaan umat manusia di belahan bumi hidup terhimpit ekonomi lantaran krisis yang semakin menjadi-jadi. Pada masa perang Dunia II, keadaan serba tak terkendali, tak terkecuali aspek ekonomi. Sehingga tak jarang mendorong seseorang untuk berbuat diluar batas normal. Bisa saja, dengan himpitan ekonomi yang semakin mengikat, akidah tergadaikan, terutama bagi kaum muslim.<sup>200</sup>

*Kedua, hifdz al-nafs* (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan martabat manusia sebagai anugrah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketenteraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/civil society), (QS. Al-an'am 6: 151), (al-Baqarah 2: 179). Faktor ekonomi merupakan faktor fundamental dalam menciptakan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan. Terjadinya instabilitas, kerap kali mengundang ketidaktertaman, bahkan kekacauan. Sistem Bretton Woods diterapkan sebagai sistem moneter internasional dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian, sehingga tercipta kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan.

*Ketiga, hifdz al-âql* (Perlindungan terhadap eksistensi akal); akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Perlindungan terhadap kerusakan

---

<sup>200</sup> Penulis belum menemukan data yang menjelaskan tentang tingkat perpindahan agama masa ini pada satu wilayah tertentu. Namun kalau kita berkaca pada kasus-kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini, faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang mendorong seseorang untuk berpindah agama, walaupun hanya dengan sebungkus Supermi.

pemikiran maupun fungsi *aqliyah* manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama. Terguncangnya stabilitas perekonomian, tak jarang menimbulkan kegalauan dan kebingungan bagi umat manusia. Karena setiap kebutuhan pokok semakin meningkat seiring dengan meningkatnya guncangan yang mengancam stabilitas perekonomian. Dampaknya, banyak umat manusia yang stress bahkan hingga hilang akal lantaran di-PHK, dan bangkrut bisnisnya.

*Keempat, Hifdz al-nasl* (Perlindungan terhadap keturunan); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang. (QS. Al-Rum 30: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Faktor ekonomi menduduki posisi strategis dalam keberlangsungan keluarga. Banyak suami-isiri bercerai karena tidak dapat memenuhi tuntutan faktor ekonomi. Secara otomatis, keberlangsungan untuk membina keluarga dan menjaga keturunan pun menjadi terkendala.

Secara otomatis, kebelangsaan untuk membina keluarga dan menjaga keturunan pun menjadi terkendala.

*Kelima, Hifdz al mâl* (Perlindungan terhadap harta); Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang stabil, menciptakan keseimbangan (equilibrium) yang menghasilkan stabilitas dan tatanan perekonomian yang tangguh, dan terhindar dari krisis. Pada masa Perang Dunia I tatanan ekonomi internasional telah mengalami desintegrasi, sehingga menciptakan kekacauan nilai tukar yang bebas mengambang (*clean and dirty*), devaluasi yang berkompetensi, pengendalian pertukaran mata uang, kendala perdagangan, perang ekonomi dan moneter internasional yang terjadi antarmata uang-mata uang dan blok-blok mata uang (*Beggar they neighbor policy*). Perdagangan dan investasi internasional dapat dikatakan telah macet total, perdagangan yang dilakukan melalui kesepakatan barter antarpemerintah saling berkompetensi dan berkonflik satu sama lain.

Dengan disepakatinya Sistem Bretton Wood telah terjamin sistem perdagangan dan pembayaran yang terbuka sekaligus menyediakan perlindungan bagi stabilitas ekonomi dalam negeri melalui dana moneter internasional. Selain itu, sistem Bretton Wood sangat efektif dalam mengontrol konflik dan dalam rangka meraih tujuan-tujuan bersama yang telah dibuat oleh negara-negara bangsa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini antara lain :

1. Disepakatinya Sistem Bretton Woods berawal dari pengalaman Perang Dunia I yang mana pada masa itu merupakan keadaan yang sangat berat bagi perekonomian dunia. Kebangkitan perekonomian negara-negara yang terlibat perang, seperti peningkatan produksi bahan makanan dan industri, akan membuat produksi global meningkat cepat, jauh melebihi kebutuhan. Ketiadaan sistem yang mengatur perekonomian global pada saat berakhir Perang Dunia I, telah menggencarkan berbagai proteksi dan devaluasi yang bergantian terus-menerus (*competitive devaluation*) di masing-masing Negara. Kebijakan suatu negara pada akhirnya hanyalah ingin melindungi negaranya sendiri dan tidak memedulikan dampaknya bagi perekonomian negara lain. Istilah yang tepat untuk menggambarkan keadaan itu adalah *Beggar they neighbor policy*.
2. Faktor-faktor dominan yang terjadi pada masa Perang kedua II adalah tingginya fluktuasi nilai mata uang, ketidakpastian hubungan perdagangan

internasional, ketidakseimbangan neraca pembayaran (*Balance of payment*) Negara, dan *competitive devaluation* di masing-masing Negara.

3. Jika ditinjau dari perspektif *Maqashid syariah*, faktor-faktor tersebut merupakan ancaman yang harus diantisipasi, agar tidak terjadi ketiseimbangan ekonomi sehingga stabilitas perekonomian dunia tetap terjaga.
4. Di bawah Sistem Bretton Woods, pertumbuhan ekonomi sangat luar biasa. Hingga periode pascaperang hingga pertengahan tahun 1970-an ini disebut sebagai “Zaman Keemasan Kapitalisme” (*capitalist Golden Age*), yang ditandai dengan berkembangnya negara-negara kesejahteraan. Pelayanan sosial dan kolektif meluas, subsidi terhadap pendidikan, kebudayaan, perumahan, dan kesehatan mendapat perhatian tinggi. Tingkat pengangguran menurun drastis.
5. Dalam perspektif *Maqashid syariah*, Sistem Bretton Woods memegang peranan penting kala itu dalam menjaga eksistensi *al-kulliyât al-khams* yang meliputi aspek agama (*hifzu ad-din*), jiwa (*hifzu an-nafs*), keturunan (*hifzu an-nasl*), akal (*hifzu al-'aql*), dan harta (*hifzu al-mal*).

## B. Saran

Di dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang penulis rekomendasikan, antara lain :

1. Sistem ekonomi memegang peranan penting dalam praktek kehidupan manusia, sehingga perlu formulasi sistem yang betul-betul bisa menciptakan stabilitas perekonomian. Sistem Bretton Woods bisa dijadikan kaca perbandingan atau bahkan bisa digunakan sebagai sistem alternatif ditengah sistem saat ini yang seringkali menciptakan kehancuran ekonomi (*divastation*), sehingga pada gilirannya memberikan dampak yang cukup serius bagi kehidupan manusia di dunia.
2. Untuk mendukung penelitian ini, penulis berhipotesa bahwa IMF kala itu (pascaperang dunia II) menduduki peran *al-Hisbah* (lembaga moneter islam) yang mengatur secara konsisten sistem moneter perekonomian dunia, sehingga bisa meminimalisir terjadinya krisis moneter diberbagai negara. Dari hipotesa ini, penulis berharap untuk dilakukan penelitian secara khusus tentang komparasi peran lembaga *al-Hisbah* dan IMF dalam stabilitas perekonomian.
3. Ekonom Muslim hendaknya lebih aktif dalam usaha menciptakan sistem ekonomi, khususnya sistem moneter yang sarat dengan nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi islam selama ini hanya berjalan secara parsial, hanya terfokus pada praktek perbankan saja. Padahal aspek ekonomi merupakan satu hal yang sistemik dan mengglobal.

4. Untuk lembaga Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, penulis menyarankan agar memasukkan mata kuliah ekonomi-politik ke dalam kurikulum Magister Studi Islam, khususnya pada konsentrasi ekonomi islam, mengingat mata kuliah ini sangat penting sebagai modal mahasiswa dalam memahami kajian ekonomi global



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Moh Thahir Ibn. 2001. *Maqashid Syari'at al-Islamiyah*, Yordan: Dar Nafais
- al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. *al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ali, M. Sayuthi. 2002. *Metodologi Penelitian Agama ; pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anonim. 2008. "Menghidupkan kembali Bretton Woods", *Kompas*, 31 Oktober 2008
- Anonim. 2010. *Sekilas Tentang Sistem Bretton Woods*, dikutip dari <http://einvening.wordpress.com>, diakses pada tanggal 5 April 2010
- Anshori, Isa, Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Landasan Etika Global, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No.01, Maret 2009
- Arief, Sritua. 1996. *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Imamul dan Giana Hadi Wigiana. 2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta : PT Setia Purma.
- Arifin, Sjamsul (ed). 2008. *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur Satu Dekade setelah Krisis*. Jakarta : PT Elex Media Kompotindo.
- Asmuni. 2008. *Aktualisasi Teori Maqashid As-Syatibi (Upaya Menemukan Landasan Nilai-nilai Etis Religius dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah)*, dalam *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*. Yogyakarta : Safiria Insania Press.

- \_\_\_\_\_, 2011 ” Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis “ dikutip dari *www.yusdani.com*, diakses pada 8 Juli.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law : a Sistem Approach*. Washington : The International Institute of Islamic Thought.
- Azis, Dahlan, Abdul [ed. et al.]. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Barker, Chris and Dariusz GalasinÅski. 2001. *Cultural Studies and Discourse Analysis : A Dialogue on Language and Identity*, London : SAGE Publications Ltd.
- al-Buthi, Muhammad Said Ramadan. 1986. *Dlawabit Al-Maslahah Fi Syariat Al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Bordo, Michael D. 1993. “The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview,” in Michael D. Bordo and Berry Eichengreen (eds.), *A Retrospective on the Bretton Woods System*, Chicago: University of Chicago Press
- Capra, Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Clemens, Michael and Jeffrey Williamson. 2001. “A Tariff-Growth Paradox? Protection’s Impact the World Around 1875-1997,” NBER Working Paper 8459.
- Daniri. 2008. “Ekonomi Syariah, Bretton Wods, KTT ASEM, dan AS:,” *Republika*, 3 Nopember 2008
- Davies, Roy dan Glyn Davies. 1996. *A History of Money from Ancient Time to Present Day*. New York : Oxport University Press

- Duchrow, Ulrich. 1999. *Mengubah Kapitalime Dunai : sebuah tinjauan sejarah-al kitabiah Bagi Aksi Politis*. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media.
- Eiteman, David K., Stonchill, Arthur I., Moffett, Michael H.. 2001. *Multinational Business Finance*, ninth edition, Addison USA : Wesley Publishing Company, Inc.
- Ensiklopedi Islam*. 2003. Jakarta : PT. Ichtiar Baru van hove.
- Eriyanto, 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta : LkiS.
- Firdaus, Robitul. "Menggagas Konsep Maslahat Ala Indonesia (Studi Terhadap Fatwa Mui Nomor 6/Munas VII/Mui/10/2005 Tentang Kriteria Maslahat Dan Pandangan Jaringan Islam Liberal Terhadap Konsep Maslahat)." *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2008
- Frankel, Jeffrey, and Shang-Jin Wei. 1995. "Emerging Currency Blocks," in Hans Genberg (ed.), *The International Monetary System: Its Institutions and its Future*, Berlin: Springer.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Eknomi Makro*. Yogyakarta : Kanisius
- Grey, George B. 2002. *Federal Reserve Sistem : Background, Analyses, and Bibliography*. New York : Nova Science Publisher
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2002. *Politik Bisnis International*. Yogyakarta : Kanisius
- Hakim, Muhammad Hanif, *Konsep Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi (Studi Aplikatif Terhadap Hukum Kartu Kredit)*, " *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009

- Hallaq, Wael B. 1997. *a History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Ushul Fiqh* Cambridge: Cambridge University
- Halwani, Hendra. 2002. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Edisi Pertama. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Harinowo, Cyrillus. 2004. *IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hinkelman, Edward G. 2005. *Dictionary of International Trade*. 6<sup>th</sup> Edition. California, World Trade Press.
- Huntington, Samuel P, dkk. ,1989. *Amerika dan Dunia*. Jakarta : Yayasan Obor
- Insukindro. 1995. *Ekonomi Uang dan Bank*. Cet 1. Yogyakarta : BPFE.
- Iqbal, Muhaimin. 2009. *Dinar the Real Money : Dinar Emas, Uang dan Investastku*. Jakarta : Gema Insani.
- Irwin, D.A, "Multilateral and Bilateral Trade Policies in the World Trading System : An Historical Perspective", in J. de Melo and A. Panagariya (eds), *new Dimensions in Regional Integration*, Cambridge : Cambridge University Press, 1993
- Irwin, Douglas. 1995. "The GATT's Contribution to Economic Recovery in Post-War Western Europe," in Barry Eichengreen (ed.), *Europe's Postwar Recovery*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ismawan, Indra. 2002. *Di bawah Cengkraman IMF : Peran IMF dalam krisis Ekonomi Indonesia*, Solo : Pondok Edukasi.
- Iswardono. 1996. *Uang dan Bank*. Edisi ke-4. Yogyakarta : BPFE
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

- Jihad, Muh. Nur dkk., "Pergeseran Paradigma Dari Ushul Fiqh Ke *Maqashid Syari'ah*", *Makalah*, kumpulan makalah *ushul fiqih*, Yogyakarta: Perpustakaan Magister Studi Islam UII
- Johnston, Thomas. 2010 *The Depression Years*, dikutip dari <http://library.thinkquest.org/3483/Right/gd.html>, diakses tanggal 5 April 2010.
- Judesseno, Rimsky. K. 2002. *Sistem moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Judokusumo, Suherdi. 2002. *Pengantar Derivatif dalam Moneter International*. Jakarta : Cikal Sakti.
- Jusuf, Kasrori. 1991. *Ekonomi Internasional*. Buku ajar. Surabaya: Unipress IKIP Surabaya.
- al-Juwaini. 1400 H. *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Kasairin, Untung. 2010. "Sistem Nilai Tukar Uang dalam Islam", dikutip dari <http://www.kampusislam.com/index.php?mod=yes&aksi=lihat&id=645>, diakses pada tanggal 7 April 2010
- Kendleberger, Charles. P. 1973. *The World in Depression 1929-1939*. Berkeley : Calif, University of California Press
- Kenen, Peter B., 1994. *Managing the World Economy Fifty years after Bretton Woods*. Washington, Institute for International Economic.
- Kenwood, George and Alan Lougheed 1992. *The Growth of the International Economy, 1820-2000*. 4th Ed. London: Rutledge
- Khalid, Mas'ud Muhammad. 1995. *Shatibi's of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute

- Kotz, David M., Terrence McDonough, and Michael Reich. 1994. *Social Structures of Accumulation : The Political Economy of Growth and Crisis*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Kurnia, Akhmad Syakir. 2010. "Mempertanyakan Standar Emas sebagai Proposisi Ekonomi Islam", dikutip dalam <http://bs.ba.FB.com/topic.php?uid>, diakses pada tanggal 7 April 2010
- Linder, Staffan. 1960. *An Essay on Trade and Transformation*. New York: Wiley.
- Madura, Jeff. 2000. *Manajemen Keuangan Internasional*, Edisi Keempat. Jakarta : Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*. Jakarta : PT Gelora Akasara Pratama.
- Maurice, Levi. D. 2001. *Keuangan Internasional*, diterjemah oleh Handoyo Prasetyo Edisi Pertama, Yogyakarta
- McCallum, John. 1995.. "National Borders Matter: Canada-U.S. Regional Trade Patterns," *American Economic Review*.
- Mishkin, Frederic S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat
- Mundell, RA. 1963. Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rate, *Canadian Journal of Economics and Political Science*, Vol. 29
- Muslim, Imam. 1992. *Shohih Muslim*, Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah. XIII: 110.
- Nabhani, Taquuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*. (terj). Surabaya : Risalah Gusti.

- Nopirin, "Pertumbuhan Ekonomi dan Neraca Pembayaran Indonesia 1980-1996 : Suatu pendekatan Keynes dan Monetarist", dalam Jurnal KELOLA No. 18/ VIII/ 1998
- Nugraha, Hilman Fauzi, "*Al-Maqasid As-Syariah fii Muamalh Maliyah : Sebuah Tinjauan Implikasi Maqashid Terhadap Prilaku Ekonomi (Analisa Ekonomi Mikro dan Makro)*", dikutip dari <http://selaluberharapuntukmu.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Juli 2011
- Pontoh, Coen Husein. 2003. *Akhir Globalisasi : Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa*, Jakarta : C-Books.
- Pronk, J.P. 1993. *Sedunia Perbedaan : Sebuah Acuan Baru dalam Kerjasama Pembangunan*, diterjemah oleh S. Maemoen, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- al-Raisuny, Ahmad. 1992. *Nazariyat al-Maqasid 'inda Al-Imam Syatibi*, Riyad: al-Dâr al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami
- Reinhart, Carmen and Kenneth Rogoff.. 2002. "The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation," NBER Working Paper 8963.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economic : Ekonomi Syari'ah bukan Opsi tetapi Solusi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Rose, Andrew K. 1991. "Why Has Trade Grown Faster Than Income?" The Canadian Journal of Economics.
- Rostiana, Endang, *Penyesuaian neraca Pembayaran Secara Otomatis*, dikutip dari [www.feunpas.org/dir\\_dok/EMI6.pdf](http://www.feunpas.org/dir_dok/EMI6.pdf) di akses tanggal 8 April 2011
- Rothbard, Murray N. 2007. *Apa yang Dilakukan Pemerintah terhadap Uang kita : Sebuah Pengantar Komprehensif Ekonomi Uang dari Mazhab Austria; terjemahan dan pengantar : Sukasah Syahdan; Edisi I. Jakarta : Granit.*

- As-Sam'ani, Abu al-Muzaffar, *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), II/343
- Sarwono, Hartadi A., dan Perry Warjiyo, .Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk Penerapannya di Indonesia., *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Juli 1998*
- Seregar, Mulya E. 2001. *Manajemen Moneter Alternatif*, dalam Ismail Yusanto, *Dinar Emas; Solusi Krisis Moneter*. Cet. 1. Jakarta : PIRAC SEM Institut INFID.
- Shiddiqy, Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, Quraish. 2001. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1987. *Uang dan Bank*, Jakarta : PT Bina Aksaram
- Soediyono. 1995. *Ekonomi Makro : Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*. Yogyakarta : Liberty.
- Spero, J.E. *Political Realism in International Theory*. (Cambridge : Cambridge University Press, 1996), hlm 37, dikutip dalam Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan International*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999
- Spero, Joan Edelman, Jeffrey A. Hart. 2010. *The Politics of International Economic Relation*. Boston: Wadsworth CENGAGE Learning Publisher.
- Sudibyo, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, LkiS : Yogyakarta
- Sukardi. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktekny*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

- al-Syatibi. 1991. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Abdullah Darraz (ed). Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Tarmidi, Lepi T., Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran, Tulisan Ini Merupakan Revisi Dan Updating Dari Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Pada Feui Dengan Judul "Krisis Moneter Tahun 1997/1998 Dan Peran Imf", Jakarta, 10 Juni 1998.
- at-Tariqy, Abdullah Abdul Husein. 1999. *Al-Iqtishad Al-Islami, Ushuluhu wa Mubaun wa Ahdaf*, Dar An-Nafais, Kuwait.
- al-Thufi, Najm al-Din. 1989. *Syarh al-Mukhtashar al-Raudlah*. Jilid III. Beirut : Muassasah al-Risalah.
- Today, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Tohir, Kaslan A. 1969. *Pengantar Ekonomi Tentang Uang Kredit, Bank*, Jakarta : Gunung Agung.
- al-'Ubaydi, Hammadi. 1992. *al-Syāthibi wa Maqāshid al-Syārī'ah*, Tharablus: al-Jamahiriyah al-'Uzhma
- Wahyudi, Yudian. 2007. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik : Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press.
- Waters, W. G. 1970. "Transport Costs, Tariffs and the Patterns of Industrial Protection," *American Economic Review*.
- Wibisono, Sjamsul Arifin, dkk. 2007. *IMF dan Stabilitas Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

- Wibowo, Hendro. 2010. *Sistem Keuangan Islam dan Implikasi Bunga bagi Perekonomian*, dikutip dari <http://hendrowibowo.niriah.com/> diakses tanggal 18 Maret 2010
- Winarno, Budi. 2009. *Pertarungan Negara dan Pasar*. Yogyakarta : MedPress.
- Wood, Geoffrey (editor). 1998. *Money, Prices and the Real Economy*. Cheltenham : The Institute of Economic Affairs.
- Yusdani. 2000. *Peranan kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*. Yogyakarta : UII Press.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz. II. Beirut : Dar al-Fikr.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## Curriculum Vitae

### **I. Data Pribadi**

Nama Lengkap : Ayif Fathurrahman  
Alamat Rumah : Jln. Mardeka, RT 2, RW 1, No. 18 Puruk Cahu. Kalteng  
Alamat Email : Ayief\_ospp@yahoo.com  
Nomor Handphone : 085228773568  
Tempat/Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 28 Februari 1987  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam

### **II. Pendidikan :**

#### **1. Pendidikan Formal**

1. 2006-2009 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi UII
2. 2005-2009 Jurusan Keuangan Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
3. 2002-2005 Madrasah Aliyah Darul Hijrah Martapura Kalimantan Selatan
4. 1999-2002 Madrasah Tsanawiyah Darul Hijrah Martapura Kalimantan Selatan
5. 1993-1996 SDN Beriwit 2 Puruk Cahu Kalimantan Tengah

#### **2. Pendidikan Non-Formal**

1. 2006-2010 Pondok Pesantren Mahasiswa Unggulan Universitas Islam Indonesia
2. 1999-2005 Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura Kalsel
3. 1996-1999 Madrasah Ibtidaiyah Awaliyah Muhammadiyah Puruk Cahu

### **III. Pengalaman Organisasi:**

1. 2005-2007 Departemen Bahasa Arab SPBA UIN Sunan Kalijaga
2. 2006-2008, Divisi Keagamaan Himpunan Mahasiswa Islam FE UII
3. 2007-2008, Bendahara Lembaga Kajian Masyarakat (eLKIM) PP UII
4. 2008-2010, Sekretaris Jenderal HIPMA MURA Yogyakarta
5. 2008-2010, Ketua Umum HPMKT (Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kalimantan Tengah) Yogyakarta 2010
6. 2010-sekarang, Ketua Umum Kerukunan Mahasiswa Bakumpai (KMB)

#### IV. Karya Tulis

##### 1. Buku

- Tiga Puluh Hari Menuju Taqwa (Bunga Rampai), Tahun 2010 Penerbit Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI UII)

##### 2. Jurnal Ilmiah

- a. Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah Di Indonesia (Telaah atas teori Kontruksi Fiqh Klasik), Jurnal Al-Mawarid Vol. XI Tahun 2010, Fakultas Ilmu Agama Islam UII
- b. Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik), Jurnal La Riba Tahun 2010, Fakultas Ilmu Agama Islam UII

##### 3. Buletin

- a. Membungkus Sejarah untuk Bekal Masa depan Tahun 2007 Buletin Al-Lulu' Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia
- b. Cinta Allah kepada Hamba-Nya, tahun 2010 Buletin Al-Rasikh Universitas Islam Indonesia
- c. *Tijarah Hurroh, Aa Hiya Tahlil am Ahammiyah*, tahun 2008 Buletin El-Marjan Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia

##### 4. Penelitian

- a. Studi Komparasi Kinerja Keuangan BMT segmented Campus dan Non-segmented Campus (studi kasus BMT Iqtisaduna UII dan BMT Sunan Kalijaga)
- b. Analisis Kompetensi Manajerial terhadap Kinerja Pimpinan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

#### IV. Pengalaman Karir

- a. Staff Badan Perencana Universitas Islam Indonesia 2010-2011
- b. Pengurus Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia 2009-2011
- c. Manager Tim Nasyid El-Fityan 2008- Sekarang